



ITS
Institut
Teknologi
Sepuluh Nopember

TUGAS AKHIR-RM 184831

**EVALUASI PEMANFAATAN RUANG LAUT DAN
PESISIR UNTUK KEGIATAN WISATA BAHARI
SEBAGAI UPAYA TERTIB ADMINISTRASI
KELAUTAN
(Studi Kasus: Kabupaten Tulungagung)**

Riva Dianita
NRP 0331154000048

Dosen Pembimbing
Yanto Budisusanto. ST, M.Eng
Cherie Bhukti Pribadi, ST, MT

DEPARTEMEN TEKNIK GEOMATIKA
Fakultas Teknik Sipil Lingkungan dan Kebumihan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya 2019

“Halaman ini sengaja dikosongkan”



TUGAS AKHIR-RM 184831

**EVALUASI PEMANFAATAN RUANG LAUT DAN
PESISIR UNTUK KEGIATAN WISATA BAHARI
SEBAGAI UPAYA TERTIB ADMINISTRASI
KELAUTAN
(Studi Kasus: Kabupaten Tulungagung)**

Riva Dianita
NRP 0331154000048

Dosen Pembimbing
Yanto Budisusanto. ST, M.Eng
Cherie Bhukti Pribadi, ST, MT

DEPARTEMEN TEKNIK GEOMATIKA
Fakultas Teknik Sipil Lingkungan dan Kebumihan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya 2019

“Halaman ini sengaja dikosongkan”



FINAL ASSIGNMENT - RM 184831

**EVALUATION OF UTILIZATION OF SEA AND
COASTAL SPACES FOR MARINE TOURISM
ACTIVITIES AS AN EFFORT FOR MARINE
ADMINISTRATIVE ORDER
(Case Study: Tulungagung Region)**

Riva Dianita
NRP 0331154000048

Supervisor
Yanto Budisusanto. ST, M.Eng
Cherie Bhukti Pribadi, ST, MT

DEPARTEMENT OF GEOMATICS ENGINEERING
Faculty of Civil, Environmental, and Geo Engineering
Sepuluh Nopember Institute of Technology
Surabaya 2019

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

**EVALUASI PEMANFAATAN RUANG LAUT DAN
PESISIR UNTUK KEGIATAN WISATA BAHARI
SEBAGAI UPAYA TERTIB ADMINISTRASI
KELAUTAN
(Studi Kasus: Kabupaten Tulungagung)**

Nama Mahasiswa : Riva Dianita
NRP : 0331154000048
Departemen : Teknik Geomatika
Dosen Pembimbing : Yanto Budisusanto, S.T., M.Eng.
Cherie Bhekti P., S.T., M.T.

ABSTRAK

Sebagai salah satu negara yang dikelilingi oleh laut, Indonesia memiliki banyak wisata di kawasan pesisir dan ruang laut, salah satunya berupa wisata bahari. Pemanfaatan ruang laut dan pesisir untuk kegiatan wisata bahari ini memerlukan pengelolaan yang terorganisir agar menghasilkan tertib administrasi kelautan. Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu daerah yang memiliki wilayah pesisir yang dimanfaatkan untuk kegiatan wisata bahari. Namun pengelolaan wisata bahari tersebut dikelola oleh banyak pihak sehingga belum menghasilkan tertib administrasi kelautan. Pada penelitian ini dilakukan inventarisasi terkait pengelolaan wisata seperti hak dan tanggungjawab pengelola, nilai retribusi, pemanfaatan wilayah ruang laut dan pesisir selain untuk pariwisata, kesesuaian kondisi eksisting dengan dokumen perencanaan berupa RTRW dan RZWP-3-K, dan kewaspadaan terhadap zona rawan bencana tsunami. Kemudian dilakukan penggabungan data dengan metode *overlay*. Penelitian ini menganalisa kondisi eksisting pengelolaan kelautan di bidang wisata bahari dokumen perencanaan RZWP-3-K dan RTRW Kabupaten Tulungagung agar dapat menghasilkan tertib administrasi kelautan dan kewaspadaan terhadap bencana tsunami. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa wisata bahari

di Kabupaten Tulungagung dikelola oleh 3 pihak, yaitu pihak pertama Dinas Perhutani, pihak kedua pemerintah daerah setempat, dan pihak ketiga masyarakat sekitar. Masing-masing pihak menerima bagi hasil dari penjualan tiket masuk dengan besar yang berbeda-beda. Pihak pertama menerima bagi hasil 30%, pihak kedua 20%, dan pihak ketiga 50%. Pada kesesuaian kondisi eksisting dengan dokumen perencanaan ditemukan bahwa lokasi wisata bahari kondisi eksisting sesuai dengan lokasi yang direncanakan yaitu di dalam Kawasan Strategis Pariwisata. Sedangkan estimasi retribusi yang diterima pihak kedua adalah Rp. 2.032.320.000,00 pertahun dan apabila ke empat wisata di ambil alih oleh Pemerintah Daerah maka menghasilkan tambahan estimasi retribusi sebesar Rp. 12.000.000,00 pertahun. Lokasi wisata bahari di Kabupaten Tulungagung ini termasuk dalam zona rawan bencana tsunami karena letaknya menghadap Samudra Hindia.

Kata Kunci: Administrasi Kelautan, RTRW, RZWP-3-K, Tsunami, Wisata Bahari.

**EVALUATION OF UTILIZATION OF SEA AND
COASTAL SPACES FOR MARINE TOURISM
ACTIVITIES AS AN EFFORT FOR MARINE
ADMINISTRATIVE ORDER
(Case Study: Tulungagung Region)**

Name : Riva Dianita
NRP : 0331154000048
Department : Geomatics Engineering
Supervisor : Yanto Budisusanto, S.T., M.Eng.
Cherie Bhekti P., S.T., M.T.

ABSTRACT

As one of the countries surrounded by the sea, Indonesia has a lot of tourism in the coastal area and sea space, one of which is marine tourism. The Utilization of marine and coastal spaces for marine tourism activities requires organized management to produce orderly maritime administration. Tulungagung Region is one of the regions that has a coastal area that is used for marine tourism activities. But the management of marine tourism is managed by many parties so that it has not produced orderly maritime administration. In this study an inventory of tourism management was carried out such as the rights and responsibilities of managers, the value of levies, the utilization of marine and coastal areas in addition to tourism, the suitability of existing conditions with planning documents in the form of RTRW and RZWP-3-K, and awareness of tsunami-prone zones. Then the data is combined with the overlay method. This study analyzes the existing conditions of marine management in the field of marine tourism, the planning documents of RZWP-3-K and RTRW of Tulungagung Region to produce orderly maritime administration and alertness to the tsunami disaster. From the results of this study, it is known that maritime tourism in Tulungagung Region is managed by 3 parties, namely the first party Perhutani Service, the second

party local government, and third parties surrounding communities. Each party receives profit-sharing from the entrance ticket sales with different sizes. The first party receives 30% profit sharing, 20% second party, and 50% third party. On the suitability of existing conditions with planning documents, it was found that the existing marine tourism locations were in accordance with the planned location, namely in the Tourism Strategic Area. While the estimated retribution received by the second party is Rp. 2,032,322,000.00 per year and if the four tours are taken over by the Regional Government then produce additional estimated retribution of Rp. 12,000,000.00 per year. The location of marine tourism in Tulungagung Region is included in the tsunami-prone zone because it is located in the Indian Ocean.

Keywords: Marine Administration, RTRW, RZWP-3-K, Tsunami, Marine Tourism.

HALAMAN PENGESAHAN

**EVALUASI PEMANFAATAN RUANG LAUT DAN
PESISIR UNTUK KEGIATAN WISATA BAHARI
SEBAGAI UPAYA TERTIB ADMINISTRASI
KELAUTAN
(Studi Kasus: Kabupaten Tulungagung)**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Teknik
pada
Program Studi S-1 Departemen Teknik Geomatika
Fakultas Teknik Sipil, Lingkungan, dan Kebumihan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Oleh:

RIVA DIANITA
NRP. 03311540000048

Disetujui oleh Pembimbing Tugas Akhir:

Yanto Budisusanto, S.T., M.Eng.
NIP. 19720613 200604 1 001

Cherie Bhakti Pribadi, S.T., M.T.
NIP. 19910111 201504 2 001



SURABAYA, JULI 2019

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini yang berjudul “Evaluasi Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir untuk Kegiatan Wisata Bahari sebagai Upaya Tertib Administrasi Kelautan (Studi Kasus: Kabupaten Tulungagung)”.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini belum sempurna dan masih banyak terdapat kekurangan baik mengenai isi, tata bahasa, dan juga keilmiahannya yang disebabkan oleh adanya keterbatasan pengetahuan dari penulis. Namun demikian, penulis tetap berharap Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini atas bantuan, bimbingan, dan petunjuk dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orangtua, saudara, dan keluarga penulis yang selalu memberikan doa dan restu, moral dan materiil yang diberikan kepada penulis.
2. Bapak Mokhamad Nur Cahyadi, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Ketua Departemen Teknik Geomatika ITS sekaligus dosen wali penulis.
3. Bapak Yanto Budisusanto, S.T., M.Eng., dan Ibu Cherie Bhekti Pribadi, S.T., M.T., selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih atas segala kesempatan, kesabaran, saran serta dukungan dan bimbingan selama pengerjaan Tugas Akhir ini.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Timur, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Tulungagung, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tulungagung yang telah memberi dukungan berupa data-data yang

dibutuhkan oleh penulis dalam pengerjaan Tugas Akhir ini.

5. Mbak Resti Yully Astuti yang telah memberikan dukungan berupa diskusi dan motivasi selama pengerjaan Tugas Akhir ini.
6. Teman-teman G17 selaku teman seangkatan penulis yang selalu memberi dukungan, doa, dan motivasi.
7. Pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis.

Semoga amal baik dan bantuan yang telah diberikan mendapatkan imbalan dan balasan yang berlimpah dari Allah SWT. Aamiin.

Akhir kata, penulis menyampaikan terima kasih atas segala kesempatan yang telah diberikan, semoga penelitian ini dapat bermanfaat.

Surabaya, Juli 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	ix
HALAMAN PENGESAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Batasan Masalah	3
1.4 Tujuan Tugas Akhir.....	4
1.5 Manfaat Tugas Akhir	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Administrasi Kelautan	7
2.1.1 Lokakarya tentang Administrasi Kelautan....	8
2.2 Konsep Kadaster Laut.....	11
2.2.1 Pengertian Kadaster Laut.....	11
2.2.2 Subjek dan Objek Kadaster Laut	12
2.2.3 Tujuan dan Manfaat Penyelenggaraan Kadaster Laut.....	13
2.3 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut.....	15
2.4 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (RZWP-3-K)	17
2.5 Rencana Tata Ruang Wilayah.....	21
2.5.1 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung.....	21
2.6 Ruang Laut.....	24
2.7 Wilayah Pesisir	26

2.8 Wisata Bahari.....	27
2.8.1 Pengertian Wisata Bahari.....	27
2.8.2 Kriteria dan Karakteristik Wisata Bahari.....	28
2.9 Retribusi Daerah	29
2.9.1 Pengertian Retribusi Daerah	29
2.9.2 Sistem Pemungutan Retribusi dan Cara Perhitungannya	30
2.10 Penelitian Sebelumnya.....	31
BAB III METODOLOGI.....	35
3.1 Lokasi Penelitian.....	35
3.2 Data dan Peralatan	36
3.2.1 Data.....	36
3.2.2 Peralatan	36
3.3 Metodologi Penelitian.....	36
3.3.1 Metodologi Pekerjaan	36
3.3.2 Metodologi Pengolahan	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	47
4.1 Administrasi Kelautan	47
4.1.1 Penguasaan Laut (<i>Marine Tenure</i>)	47
4.1.2 Pemanfaatan Laut (<i>Marine Use</i>)	56
4.1.3 Pengembangan Kelautan (<i>Marine Development</i>).....	58
4.1.4 Nilai/ Pajak Kelautan (<i>Marine Tax/ Value</i>)	67
4.2 Resiko Bencana Tsunami di Lokasi Wisata Bahari.....	72
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	79
5.1 Kesimpulan	79
5.2 Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar	2. 1	Tampilan Administrasi Kelautan (Rajabifar dkk. 2005).....	7
Gambar	2. 2	Pentingnya Menghubungkan Lingkungan Darat Dan Laut (Rajabifard dkk. 2005)	10
Gambar	2. 3	Ilustrasi Alokasi Ruang Laut Tiga Dimensi (Kementrian Kelautan dan Perikanan 2013)..	25
Gambar	3. 1	Peta Batas Administrasi Penelitian di Kabupaten Tulungagung.....	35
Gambar	3. 2	Diagram Alir Metodologi Pekerjaan	37
Gambar	3. 3	Diagram Alir Metodologi Pengolahan Tahap Pertama	40
Gambar	3. 4	Diagram Alir Metodologi Pengolahan Tahap Kedua.....	41
Gambar	3. 5	Diagram Alir Metodologi Pengolahan Tahap Ketiga.....	43
Gambar	3. 6	Diagram Alir Metodologi Pengolahan Tahap Keempat.....	45
Gambar	4. 1	Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut RZWP-3-K.....	59
Gambar	4. 2	Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut RZWP-3-K Desa Besole.....	60
Gambar	4. 3	Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut Kec. Tanggungnung dan Kec. Kalidawir	61
Gambar	4. 4	Identifikasi Pemanfaatan Pesisir RTRW	62
Gambar	4. 5	Identifikasi Pemanfaatan Pesisir Ripparda	63
Gambar	4. 6	Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir Eksisting.....	64
Gambar	4. 7	Kesesuaian Lokasi Wisata Kondisi Eksisting dengan Dokumen Perencanaan	65
Gambar	4. 8	Resiko Bencana Tsunami Di Lokasi Wisata Bahari	72
Gambar	4. 9	Resiko Bencana Tsunami di Lokasi Wisata Bahari Desa Keboireng.....	73

Gambar	4. 10 Resiko Bencana Tsunami di Lokasi Wisata Bahari Desa Besole.....	74
Gambar	4. 11 Resiko Bencana Tsunami di Lokasi Wisata Bahari Desa Ngrejo	75
Gambar	4. 12 Resiko Bencana Tsunami di Lokasi Wisata Bahari Desa Jengglunharjo	75
Gambar	4. 13 Resiko Bencana Tsunami di Lokasi Wisata Bahari Desa Kalibatur, Desa Rejosari, Desa Panggungkalak.....	76
Gambar	4. 14 Resiko Bencana Tsunami di Lokasi Wisata Bahari Desa Pucanglaban	77

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Identifikasi Objek - objek Ruang Perairan terhadap Pemanfaatan Laut (BPN-RI dan LPPM-ITB 2000).....	13
Tabel 2. 2	Isu dan Kebijakan Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur (Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur 2018). 20	
Tabel 2. 3	Program Kegiatan dan Fasilitas <i>Outdoor</i> (Raharjo 2002).....	29
Tabel 2. 4	Program Kegiatan dan Fasilitas <i>Indoor</i> (Raharjo 2002).....	29
Tabel 4. 1	Daftar Pengelola Wisata Bahari	47
Tabel 4. 2	Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan	56
Tabel 4. 3	Koordinat Lokasi Wisata Bahari	64
Tabel 4. 4	Inventarisasi Retribusi Wisata Bahari	67
Tabel 4. 5	Perhitungan Bagi Hasil Untuk Para Pihak/ Tahun	68
Tabel 4. 6	Estimasi Retribusi	70
Tabel 4. 7	Estimasi Retribusi untuk PemKab.....	71
Tabel 4. 8	Estimasi Retribusi untuk Pemkab dari pengelola lain.....	71
Tabel 4. 9	Luas Daerah di Desa Pesisir	72

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Daftar Karakteristik Wisata	87
Lampiran 2.	Dokumentasi	149
Lampiran 3.	Peta Pengelola Wisata Bahari Skala 1:100.000.....	151
Lampiran 4.	Peta Estimasi Retribusi Tiket Masuk Wisata Bahari Skala 1:100.000	152
Lampiran 5.	Peta Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir Skala 1:100.000.....	153
Lampiran 6.	Peta Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir untuk Kegiatan Wisata Bahari dengan Dokumen Perencanaan Skala 1:100.000.....	154
Lampiran 7.	Peta Resiko Rawan Bencana Tsunami di Lokasi Wisata Bahari Kabupaten Tulungagung Skala 1:100.000.....	155
Lampiran 8.	Biodata Penulis	156

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik (Pemerintah Republik Indonesia 1945), Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan Undang-Undang Pasal 18 (Pemerintah Republik Indonesia 1945). Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang Pasal 25 (Pemerintah Republik Indonesia 1945). Untuk penetapan hak tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Astor 2014). Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tersebut menyampaikan bahwa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dimaksud adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati, sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan. Sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, mangrove dan biota laut lain. Sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut. Sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.

Kegiatan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil salah satunya berupa pengembangan wisata bahari. Kegiatan wisata bahari tersebut memiliki potensi ekonomi yang bernilai tinggi sehingga dapat menambah perekonomian daerah dalam bentuk retribusi. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan (Pemerintah Republik Indonesia 2009). Untuk retribusi daerah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang penetapan retribusinya terdapat dalam masing-masing peraturan daerah Kabupaten/Kota.

Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu daerah di pesisir selatan Jawa Timur yang wilayah pesisirnya dimanfaatkan untuk kegiatan wisata bahari. Akan tetapi terdapat beberapa wilayah pesisir yang dijadikan lokasi pariwisata tersebut dikelola oleh berbagai pihak sehingga wilayah tersebut perlu dilakukan identifikasi terkait kejelasan pengelola agar tercapainya tertib administrasi kelautan. Dengan adanya tertib administrasi kelautan ini diharapkan mampu meningkatkan retribusi daerah dari adanya kegiatan pariwisata di wilayah pesisir dan ruang laut serta dapat memperbarui pemanfaatan ruang laut dan pesisir sehingga meminimalisir terjadinya tumpang tindih antara kondisi eksisting dengan dokumen perencanaan.

Administrasi kelautan merupakan salah satu tujuan diselenggarakannya *marine cadastre*. *Marine cadastre* atau kadaster kelautan ini didefinisikan sebagai suatu sistem informasi publik yang berisi catatan, daftar dan dokumen mengenai kepentingan hak, kewajiban, dan batasannya, termasuk catatan mengenai nilai/pajak, serta hubungan hukum dan perbuatan hukum yang ada dan berkaitan dengan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan partisi atau persil laut, dalam rangka mewujudkan tertib hukum, tertib

administrasi, tertib penggunaan dan tertib pemeliharaan ekosistem laut serta mendukung tertib perencanaan, penataan, dan pengelolaan wilayah laut secara spasial terpadu (BPN-RI dan LPPM-ITB 2000).

Sehingga dari masalah tersebut dilakukan penelitian yang membahas tentang administrasi kelautan dengan adanya kegiatan wisata bahari yang dikelola oleh dinas terkait dan masyarakat setempat. Serta melakukan evaluasi terhadap resiko rawan bencana tsunami di lokasi wisata bahari yang lokasinya terletak di pantai selatan dan langsung menghadap ke Samudra Hindia. Penelitian ini mengevaluasi hasil inventarisasi pemanfaatan objek-objek pesisir dan ruang laut untuk kegiatan wisata bahari yang terdapat di wilayah Kabupaten Tulungagung, agar dalam pengaturan hak, kewajiban, dan batasan terkait objek-objek tersebut terintegrasi sehingga dapat dijadikan pendukung ke arah penerapan salah satu tujuan kadaster laut.

Dengan adanya pengelolaan sumberdaya kelautan melalui kadaster kelautan ini diharapkan dapat mengorganisir data dan informasi yang lengkap serta akurat mengenai kelautan dengan standar administrasi yang seragam sehingga dapat dilakukan saling berbagi informasi serta perubahan data secara cepat.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana evaluasi dari inventarisasi pemanfaatan ruang laut dan pesisir untuk kegiatan wisata bahari di Kabupaten Tulungagung sebagai upaya tertib administrasi kelautan.
2. Bagaimana evaluasi kewaspadaan lokasi wisata bahari terhadap resiko rawan bencana.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Wilayah daerah penelitian yaitu daerah perairan 4 mil dari garis pantai dan wilayah pesisir dari garis pantai kearah

darat sampai ke wilayah batas administrasi desa yang masih terdapat batas terluar bagian hulu kawasan wisata bahari.

2. Menggunakan peta RTRW Kabupaten Tulungagung Skala 1:200.000 Tahun 2012-2032 dan peta RZWP-3-K Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Skala 1:250.000 untuk menentukan kesesuaian lokasi pemanfaatan wilayah ruang laut dan pesisir serta kesesuaian dengan kondisi eksisting untuk wisata bahari.
3. Menggunakan 14 dari 21 lokasi wisata bahari di Kabupaten Tulungagung.
4. Menggunakan peta resiko bencana tsunami di wilayah pesisir Kabupaten Tulungagung untuk mengevaluasi tingkat resiko rawan bencana tsunami di lokasi wisata bahari.

1.4 Tujuan Tugas Akhir

Tujuan dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi dari inventarisasi pemanfaatan ruang laut dan pesisir untuk kegiatan wisata bahari sebagai upaya tertib administrasi kelautan.
2. Mengevaluasi lokasi wisata bahari yang termasuk dalam zona rawan bencana.

1.5 Manfaat Tugas Akhir

Manfaat yang ingin diperoleh dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mampu mengevaluasi hasil inventarisasi pemanfaatan ruang laut dan pesisir di sektor wisata bahari dan pengelolaannya agar terlaksana tertib administrasi kelautan.
2. Mampu menunjukkan pemanfaatan di pesisir Kabupaten Tulungagung selain yang dimanfaatkan untuk wisata bahari.
3. Mampu menunjukkan kesesuaian lokasi wisata bahari kondisi ekisting dengan dokumen perencanaan.

4. Mampu menunjukkan estimasi retribusi yang diterima oleh pemerintah kabupaten.
5. Mampu menganalisa lokasi wisata bahari yang termasuk dalam lokasi zona rawan bencana.

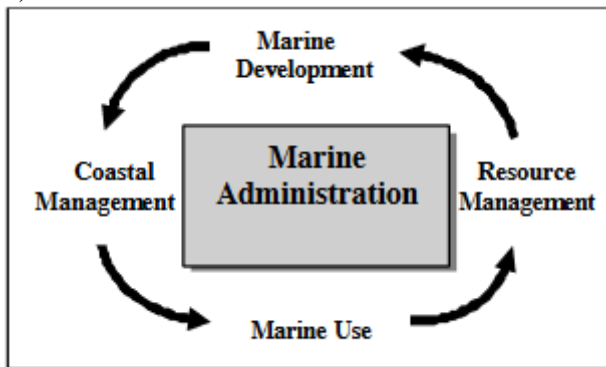
“Halaman ini sengaja di kosongkan”

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Administrasi Kelautan

Ruang laut dan pesisir adalah lingkungan yang sangat kompleks, tunduk pada tekanan dan tuntutan yang saling bertentangan, termasuk pembangunan ekonomi, interaksi sosial dan kebutuhan untuk melindungi ekosistem dan habitat lautan. Lingkungan laut juga mengandung banyak sumber daya aktual dan potensial, dengan permintaan untuk eksploitasi meningkat dengan cepat. Untuk menyeimbangkan penggunaan laut yang saling bertentangan, pengelolaan sumber daya pesisir, dan pengembangan laut, diperlukan kerangka kerja tata kelola yang harus berkelanjutan, holistik dan terinformasi (Rajabifard dkk. 2005).



Gambar 2. 1 Tampilan Administrasi Kelautan (Rajabifard dkk. 2005)

Kerangka kerja yang mendasari tata kelola ini adalah interaksi yang kompleks antara hak, pembatasan, dan tanggung jawab yang tumpang tindih dan terkadang berbeda dari berbagai kegiatan di lingkungan laut dan di zona pesisir. Banyak informasi yang diperlukan untuk menyeimbangkan dimensi spasial yang menawarkan potensi dan tantangan untuk analisis dan manajemen yang tepat (PCGIAP-WG3 2004 dalam Rajabifard dkk. 2005).

Adopsi baru-baru ini dari KTT Dunia tentang komitmen Pembangunan Berkelanjutan untuk Laut Asia Timur di Kongres Laut Asia Timur adalah langkah maju dalam menangani bidang-bidang lingkungan laut. Namun belum ada langkah secara aktif untuk memperkenalkan infrastruktur yang seragam dan koheren, seperti *Spatial Data Infrastructure* (SDI), untuk mendukung manajemen sumber daya laut. SDI akan memungkinkan administrasi yang lebih efektif dan efisien dalam mendukung pengelolaan sumber daya laut, terutama dalam hal hak, pembatasan, dan tanggung jawab. Kemampuan yang secara jelas membatasi zona di dalam lautan, dan mengakses informasi spasial yang akurat dan relevan juga merupakan tujuan utama dari infrastruktur. Juga diharapkan bahwa pengelolaan lingkungan laut harus diintegrasikan dengan sistem informasi berbasis daratan. Ini akan membantu memfasilitasi pendekatan yang lebih terintegrasi dan efektif untuk pengelolaan zona pantai, menangani masalah-masalah seperti polusi laut dari sumber-sumber berbasis lahan (Binns 2004 dalam Rajabifard dkk. 2005).

2.1.1 Lokakarya tentang Administrasi Kelautan

Sebagai bagian dari Rencana Kerja, WG3 (Kelompok Kerja 3 dari PCGIAP (*Permanent Committee for GIS Infrastructure in Asia and the Pacific*)) menyelenggarakan lokakarya empat hari (4 - 7 Mei 2004) tentang Pengelolaan Lingkungan Laut - Dimensi Spasial di Asia dan Pasifik. Lokakarya ini diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia dan dipandu oleh Departemen Survei dan Pemetaan Malaysia. Tujuan dari lokakarya ini adalah untuk lebih memahami dimensi spasial dari pengelolaan lingkungan laut di wilayah Asia dan Pasifik dan khususnya untuk memfasilitasi (Rajabifard dkk. 2005):

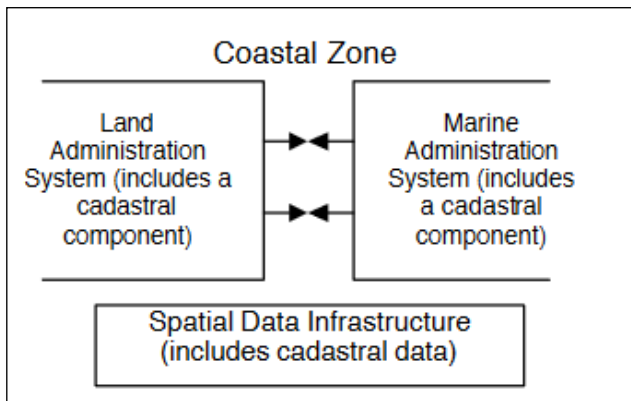
- pemahaman tentang kebutuhan SDI dan kadaster dalam konteks kelautan;
- pemahaman dan apresiasi yang lebih baik tentang administrasi hak laut, pembatasan dan tanggung jawab dan untuk menyetujui terminologi; dan
- dokumentasi masalah dalam menetapkan dimensi kelautan sebagai komponen utama NSDI.

Terminologi yang digunakan untuk menggambarkan dimensi spasial lingkungan laut tidak jelas, dengan peserta memiliki pemahaman yang berbeda tentang istilah kadaster kelautan dan SDI laut. Oleh karena itu, lokakarya merekomendasikan bahwa istilah sistem administrasi kelautan diadopsi untuk administrasi hak, pembatasan dan tanggung jawab dalam lingkungan kelautan, dengan dimensi spasial yang difasilitasi oleh SDI kelautan.

Lebih lanjut merekomendasikan bahwa kadaster kelautan didefinisikan sebagai alat manajemen yang secara spasial menggambarkan, memvisualisasikan dan menyadari batas-batas yang didefinisikan secara formal dan informal dan hak terkait, pembatasan dan tanggung jawab di lingkungan laut sebagai lapisan data dalam SDI laut, yang memungkinkan mereka untuk lebih diidentifikasi, dikelola, dan diakses secara efektif (Rajabifard dkk. 2005).

Komponen kadaster kelautan dari administrasi kelautan dapat mencakup komponen kadaster berbasis darat, di samping itu harus mempertimbangkan sifat batas-batas di darat untuk di terapkan di laut. Pentingnya memahami hubungan antara lingkungan darat dan laut (mereka tidak dapat diperlakukan secara terpisah) dan perlunya kerja sama antar negara karena tindakan maritim yang melampaui batas-batas nasional juga merupakan topik utama diskusi sebagaimana dicantumkan pada Gambar 2.2. Perlunya menilai sistem saat ini untuk mengidentifikasi masalah sosial-ekonomi, kebijakan dan teknis yang menghambat

koordinasi dan manajemen lingkungan laut yang efektif juga ditekankan dan dibahas secara lebih rinci di bawah ini.



Gambar 2. 2 Pentingnya Menghubungkan Lingkungan Darat Dan Laut (Rajabifard dkk. 2005)

Administrasi kelautan akan dibantu oleh definisi spasial yang jelas tentang hak, pembatasan, dan tanggung jawab yang ada dan struktur yang komprehensif untuk mengelola definisi spasial ini. Istilah SDI laut dan kadaster kelautan saat ini sedang digunakan untuk menggambarkan berbagai sistem informasi batas laut dan spasial yang sedang dilaksanakan oleh negara-negara seperti Amerika, Kanada dan Australia. Lokakarya menjelaskan kebutuhan untuk membedakan keduanya.

Kegiatan administrasi kelautan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Mencatat persil pesisir dan laut serta batas-batas terkait, hak atas persil termasuk hak adat atau ulayat;
2. Batas-batasnya adalah batas yuridiksi (laut teritorial); batas administratif (provinsi, kabupaten, dan lainnya); batas laut, selat dan teluk; batas estat laut (pemanfaatan ruang laut untuk kepentingan ekonomi masyarakat, perseorangan, dan badan hukum);

3. Merupakan ruang laut 3-dimensi yang menggambarkan stratifikasi hak pada permukaan laut, kolom air (laut), dasar laut dan tanah di bawahnya (Purwaningdyah dan Wahyudi 2017).

2.2 Konsep Kadaster Laut

2.2.1 Pengertian Kadaster Laut

Kadaster Laut adalah penerapan prinsip-prinsip kadaster di wilayah laut, yaitu mencatat: penggunaan ruang laut oleh aktifitas masyarakat dan pemerintah; ruang laut yang dilindungi, diskonservasi, taman nasional, taman suaka margasatwa, dan sebagainya; dan penggunaan ruang laut oleh komunitas adat (Tamtomo 2006).

Secara garis besar kadaster kelautan berkaitan dengan bagaimana suatu negara dalam mengelola dan mengatur administrasi sumber daya laut, dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu kedudukan dan kedaulatan negara tersebut di dalam hukum laut internasional (UNCLOS 1982) maupun faktor internal yakni bentuk negara, sistem pemerintah dan bentuk pemerintahan yang dianut oleh negara tersebut (Maulana dkk. 2016).

Marine Cadastre diselenggarakan dalam rangka mewujudkan tertib hukum, tertib administrasi, tertib penggunaan dan tertib pemeliharaan ekosistem laut serta mendukung tertib perencanaan, penataan, dan pengelolaan wilayah laut secara spasial terpadu. Sebagai suatu bagian dari sistem hukum (*legal cadastre*), maka *marine cadastre* ditujukan untuk mengelola dan menyediakan data, informasi, dan dokumen jaminan kepastian hukum atas pemanfaatan ruang pesisir dan laut. *Marine Cadastre* merupakan pengembangan dari *land cadastre*, namun tidak semua aspek *land cadastre* dapat diterapkan ke dalam konsep *marine cadastre*. Dalam beberapa hal batas persil laut dapat ditandai

dengan benda fisik di permukaan maupun di dasar laut dangkal, namun dalam banyak hal batas persil laut hanya ditetapkan dalam sistem koordinat geografis namun tidak dibangun tanda-tanda fisik batas di laut.

2.2.2 Subjek dan Objek Kadaster Laut

Subjek dalam konteks Kadaster kelautan merupakan bagian utama yang harus dipahami. Keberadaan subjek tersebut berhubungan dengan hak-hak yang tercantum dalam objek ruang perairan berdasarkan pola kepemilikan dan penguasaan sumberdaya kelautan.

Menurut Hanna dkk. (1996) pengelompokan pola kepemilikan dan penguasaan sumberdaya (*property-right regime*) kelautan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu mencakup kepada milik masyarakat (*common property*), milik pemerintah (*public/state property*), dan milik pribadi/swasta (*private property*) dan kelompok tanpa pemilik (*open acces property*). Sementara kelompok tanpa pemilik tidak tercakup dalam pola kepemilikan dan pengelolaan kadaster kelautan karena mencakup laut lepas yang dapat dimanfaatkan oleh semua orang (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia).

Objek ruang perairan adalah bagian-bagian tertentu dari perairan meliputi estuari (bagian perairan tempat bertemunya air laut dengan air tawar), teluk (perairan yang menjorok ke darat), laguna (danau asin dekat pantai), dan lain-lain (Djunarsjah 2007). Pada Tabel 2.1 berikut ini dapat dilihat hak-hak pemanfaatan ruang laut beserta objek-objek ruang perairan yang teridentifikasi di dalamnya. Menurut BPN RI dan LPPM ITB (2000) objek-objek kadaster laut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Identifikasi Objek-objek Ruang Perairan terhadap Pemanfaatan Laut (BPN-RI dan LPPM-ITB 2000)

Pemanfaatan Laut	Objek-objek Ruang Perairan yang Teridentifikasi
Pemukiman	Perumahan Nelayan, Rumah Ibadah
Perikanan	Bagan
Pariwisata Laut	Hotel, Vila, Restoran, kafe di atas air, Kawasan Menyelam
Pekerjaan dan Konservasi Laut	Taman Laut, Daerah Konservasi, Penangkaran Hewan Laut Dilindungi
Peletakan Kabel dan Pipa Bawah Laut	Kabel Laut dan Pipa Bawah Laut
Eksplorasi Minyak, Gas dan Mineral	Wahana pengeboran lepas pantai (<i>rig</i>)
Pelayaran	Jalur Pelayaran, Suar
Budidaya	Kawasan Budidaya Rumput Laut, Budidaya Mutiara
Harta Karun	Bangkai Kapal (<i>shipwreck</i>), Peninggalan Sejarah
Kultur Adat	Pasar Terapung, Zona Adat
Militer	Kawasan Militer, Zona Latihan Militer

2.2.3 Tujuan dan Manfaat Penyelenggaraan Kadaster Laut

Tujuan penyelenggaraan kadaster laut oleh suatu negara adalah untuk (Tamtomo 2006):

1. Mengadministrasikan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan laut berikut sumberdaya alam dan buatan serta termasuk pula semua kepentingan, hak batasan, dan kewajiban yang ada di wilayah itu;
2. Mewujudkan ketertiban wilayah, yaitu tertib administrasi, tertib hukum, tertib tata ruang wilayah, tertib pemanfaatan dan penggunaan ruang dan sumberdaya wilayah, serta tertib pemeliharaan wilayah dan ekosistem wilayah;

3. Memberikan perspektif manajemen sumberdaya alam kepada pemerintah dan mengembangkannya agar manfaat dan kegunaan kadaster laut menjadi lebih nyata bagi para pemangku kepentingan, seperti: pemerintah dan daerah, sektor industri, serta masyarakat akademis dan masyarakat disektor pesisir dan kelautan khususnya;
4. Menyediakan infrastruktur data spasial yang komprehensif termasuk hak, batasan, dan kewajiban di lingkungan pesisir dan kelautan dapat dinilai, di administrasikan dan di kelola;
5. Menyediakan informasi wilayah laut yang berguna untuk: (1) mengidentifikasi masalah dan prioritas; (2) merumuskan dan menerapkan kebijakan dan strategi pembangunan kelautan yang sesuai dan tepat sasaran; (3) membantu perencanaan tata guna ruang dalam aktifitas pembangunan kelautan; (4) menyediakan suatu proses perijinan yang proporsional dalam mendukung pembangunan perekonomian sektor kelautan; (5) dapat menerapkan suatu sistem pengelolaan pajak yang tepat dan efisien; dan (6) mengawasi tata guna ruang untuk dapat mengidentifikasi permasalahan baru dan mengevaluasi pengaruh dari suatu kebijakan kelautan. Direktorat Jenderal Pajak telah memungut PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) atas bangunan-bangunan kelautan seperti penambangan minyak “*offshore*”, rumpon dan bagan-bagan ikan, dan bangunan kelautan, jasa kelautan serta akuakultur lainnya.

Manfaat dari penyelenggaraan kadaster laut bagi suatu negara adalah sebagai berikut (Tamtomo 2006):

1. Tersedianya mekanisme untuk mendefinisikan, menggambarkan, menganalisis, dan menghitung, serta menyatakan hak kedaulatan dari setiap jengkal lahan di

wilayah pesisir dan lepas pantai berikut kekayaan alam atau sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya;

2. Tersedianya mekanisme untuk mengidentifikasi tumpang tindih dan konflik hak, kepentingan, dan tanggungjawab di wilayah pesisir dan lautan serta untuk mendorong dan menyelenggarakan pemerintahan yang baik di bidang kelautan (*Good ocean governance*);
3. Serta meningkatnya akses terhadap sumber-sumber ekonomi dan efisiensi penggunaan sumberdaya dan ruang laut sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap terjadinya degradasi lingkungan akibat kegiatan pembangunan kelautan.

2.3 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut

Kawasan pesisir adalah sebagai kawasan peralihan antara darat dan laut yang ke arah darat mencakup daerah yang masih dipengaruhi oleh hempasan percikan air pasang-surut, sedangkan ke arah laut meliputi daerah paparan benua (*continental shelf*). Kawasan pesisir yang ke arah laut masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di daratan, seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Berdasarkan hasil Rapat Kerja Proyek *Marine Resource Evaluation and Planning* (MREP) bulan Agustus di Manado, Sulawesi Utara disepakati bahwa dalam pengelolaan kawasan pesisir tersebut digunakan tiga batasan wilayah pesisir (Anonim 2001, lihat juga pada Pramudji 2002). Batasan wilayah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara ekologis: Kawasan daratan yang masih dipengaruhi oleh proses-proses yang ada di laut, seperti pasang-surut, sedangkan ke arah laut dipengaruhi oleh proses-proses yang ada di daratan, seperti sedimentasi dan pencemaran.
2. Secara administrasi: batas terluar sebelah hulu dan kecamatan atau kabupaten, sedangkan ke arah laut sejauh 12

mil dari garis pantai untuk propinsi atau sepertiga untuk kabupaten.

3. Berdasarkan perencanaan: batas kawasan pesisir tergantung pada permasalahan atau substansi yang menjadi fokus pengelolaan kawasan pesisir:
 - a. pencemaran dan sedimentasi: suatu kawasan darat yang dampak pencemaran dan sedimentasi yang ditimbulkan memberikan pengaruh terhadap kawasan perairan.
 - b. hutan mangrove: batas terluar bagian hulu kawasan mangrove (Pramudji 2002).

Wilayah pesisir merupakan wilayah pertemuan dan interaksi antara daratan dan lautan, sehingga menjadikan wilayah ini dalam posisi yang sangat rentan, unik, bernilai, dan tertekan. Mengingat posisi alam dan topografi wilayah pesisir sebagai “penampung” limpahan kegiatan di darat, maka respons sistem pesisir terhadap aktifitas manusia di darat tersebut sangat sensitif. Kegiatan di daratan seperti pertanian, pembangunan perkotaan dan industri, kehutanan dan pertambangan perumahan dan lain sebagainya menyumbang lebih dari 70% dari seluruh polusi wilayah pantai dan lautan, mulai dari transpor erosi dan sedimen, material dan bahan-bahan kimia serta bahan beracun lainnya (Collier dkk. 2001).

Mengingat demikian besarnya pengaruh daratan terhadap pesisir, maka konsep pembangunan pesisir tidak hanya bersifat sektoral (melainkan multisektor dan interdisiplin) dan berbasis lautan, namun harus pula berbasis daratan, sehingga merupakan suatu konsep pembangunan wilayah yang integral. Kebijakan penataan ruang laut pada umumnya, dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan khususnya dewasa ini masih bersifat parsial baik ditinjau dari sisi cara pandang sektoralisme parsial: baik sektor kegiatan maupun sektor wilayah (keruangan), pembangunan daratan terpisah dengan pembangunan kelautan (Kusumastanto 2002)

maupun dari sudut pandang pengutamakan strategi tertentu saja (Nikijuluw 2002).

Pengembangan konsep pembangunan wilayah pesisir dan laut yang berkeadilan harus menggunakan bersama-sama dengan prinsip keadilan dalam aspek tripatif lintas pemangku kepentingan, aspek keadilan dan kewilayahan, serta aspek keadilan dalam menghindari dan menyelesaikan konflik. Penyebab konflik tersebut adalah karena tidak adanya aturan yang jelas tentang penataan ruang dan alokasi sumberdaya yang terdapat di kawasan pesisir dan lautan. Artinya bahwa, konsep perencanaan tata ruang daratan, pesisir dan lautan harus menjadi satu kesatuan perencanaan dengan memaksimalkan saling menguntungkan serta meminimalkan kerugian dan kerusakan. Untuk itu maka prinsip utama yang harus dipedomani adalah melakukan sinergi perencanaan dan pembangunan wilayah daratan dan pesisir, melalui prinsip kesetaraan dan kesesuaian tata ruang dan ekologi, sesuai dengan daya dukung lingkungan dan sumberdaya alamnya, dan diseleenggarakan dalam rangka untuk mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat (Kusumastanto 2002).

2.4 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K)

Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin (Pemerintah Republik Indonesia 2014).

Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan

wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu (Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur 2018).

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat dengan RZWP-3-K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang mempuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur 2018).

Ruang lingkup pengaturan RZWP-3-K meliputi:

- a. Ke arah darat mencakup batas wilayah administrasi kecamatan di wilayah pesisir; dan
- b. Ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mils laut diukur dari garis pantai pada saat pasang tertinggi ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Pengaturan RZWP-3-K meliputi:

- a. Ruang lingkup, asas, dan tujuan;
- b. Jangka waktu, kedudukan, dan fungsi;
- c. Kebijakan dan strategi;
- d. Rencana alokasi ruang;
- e. Peraturan pemanfaatan ruang;
- f. Rencana pemanfaatan ruang;
- g. Mitigasi bencana;
- h. Pengawasan dan pengendalian;
- i. Reklamasi;
- j. Hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat;
- k. Penyelesaian sengketa; dan
- l. Gugatan perwakilan.

Kebijakan pengembangan kawasan pemanfaatan umum dilakukan melalui upaya pengembangan zona budidaya yang mampu mengoptimalkan potensi sektor produksi kawasan pesisir dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan pesisir dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya

sehingga dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, meliputi:

- a. Zona pariwisata;
- b. Zona pelabuhan;
- c. Zona perikanan tangkap;
- d. Zona perikanan budidaya;
- e. Zona industri;
- f. Zona pertambangan;
- g. Zona energi; dan
- h. Zona bandar udara.

Strategi pengembangan zona pariwisata sebagaimana dimaksud diatas dilakukan dengan:

- a. menetapkan dan mengembangkan zona pariwisata menjadi sub zona wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil dan sub zona wisata alam bawah laut;
- b. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pariwisata bahari; dan
- c. mengintegrasikan aktivitas wisata bahari dengan pemanfaatan umum lainnya dan kawasan konservasi.

Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dirumuskan berdasarkan:

- tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- karakteristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- kapasitas sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam mewujudkan tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dirumuskan dengan kriteria:

- mengakomodasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil nasional dan provinsi yang berlaku pada wilayah provinsi bersangkutan;

- jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi bersangkutan;
- mampu menjawab isu-isu strategis baik yang ada sekarang maupun yang diperkirakan akan timbul di masa yang akan datang; dan
- tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Tabel 2.2 berikut merupakan isu dan kebijakan strategis di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di provinsi Jawa Timur:

Tabel 2. 2 Isu dan Kebijakan Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur (Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur 2018).

Isu Strategis	Kebijakan	Strategi
Kawasan Pemanfaatan Umum		
<ul style="list-style-type: none"> • Integrasi pengelolaan ruang darat dan ruang laut. • Mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim global. • Peningkatan kualitas SDM kelautan. 	Pengembangan zona budidaya yang mampu mengoptimalkan potensi sektor produksi kawasan pesisir dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan pesisir dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya sehingga dapat terwujudkan kesejahteraan masyarakat pesisir.	<p style="text-align: center;">Strategi pengembangan zona pariwisata</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan dan mengembangkan zona pariwisata menjadi sub zona wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil dan sub zona wisata alam bawah laut • Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pariwisata bahari • Mengintegrasikan aktivitas wisata bahari dengan pemanfaatan umum lainnya dan kawasan konservasi.

2.5 Rencana Tata Ruang Wilayah

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya (Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur 2018). Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan penetapan rencana tata ruang (Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung 2012).

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disingkat RTRW Provinsi adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Provinsi Jawa Timur. (Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur 2018).

2.5.1 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Provinsi, yang berisi tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten; rencana struktur ruang wilayah kabupaten; rencana pola ruang wilayah kabupaten; penetapan kawasan strategis kabupaten; arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten (Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung 2012).

Muatan RTRW meliputi:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi rencana tata ruang wilayah;
- b. rencana struktur ruang wilayah;

- c. rencana pola ruang wilayah;
- d. penetapan kawasan strategis;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah;
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah; dan
- g. hak, kewajiban, dan peran masyarakat.

Kebijakan penataan ruang wilayah meliputi:

- a. pemantapan kawasan agropolitan mandiri dan ramah lingkungan;
- b. pengembangan industri berdaya saing tinggi dalam menarik investasi berdasarkan potensi lokal;
- c. pengembangan pariwisata secara berkelanjutan;
- d. pemantapan struktur pusat pelayanan bersinergis;
- e. pengembangan sistem sarana dan prasarana wilayah terpadu;
- f. pengendalian secara ketat terhadap pemanfaatan ruang kawasan lindung;
- g. pengembangan kawasan budi daya sesuai daya tampung dan daya dukung lingkungan;
- h. pengembangan kawasan strategis di wilayah kabupaten; dan
- i. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Pengembangan pariwisata secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan dengan strategi:

- a. mengembangkan pariwisata berbasis ekowisata;
- b. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung pariwisata; dan
- c. mengembangkan kawasan pariwisata unggulan.

Rencana pola ruang kabupaten merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kabupaten yang terdiri atas:

- a. Kawasan lindung;
- b. Kawasan budi daya; dan
- c. Kawasan andalan

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam rencana pola ruang terdiri atas:

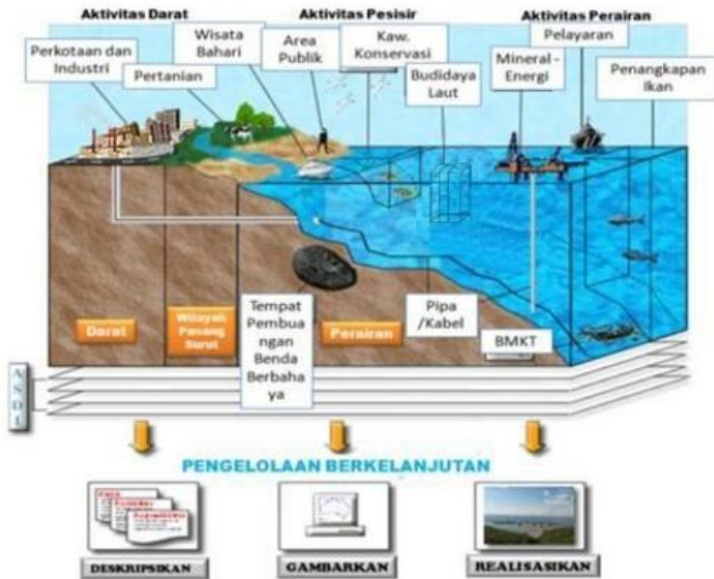
- a. Kawasan perlindungan
 - sempadan pantai;
 - sempadan sungai;
- b. Kawasan pantai berhutan bakau
 - Kecamatan Kalidawir;
 - Kecamatan Besuki;
 - Kecamatan Pucanglaban; dan
 - Kecamatan Tanggunggunung.
- c. Kawasan lindung geologi
 - Kawasan rawan gempa bumi:
Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud diatas terdapat di seluruh wilayah Kabupaten.
 - Kawasan rawan abrasi pantai dan tsunami:
Kawasan rawan abrasi pantai dan tsunami sebagaimana dimaksud diatas berada di wilayah: Kecamatan Besuki, Kecamatan Tanggunggunung, Kecamatan Kalidawir, dan Kecamatan Pucanglaban.
- d. Kawasan budi daya
 - Terdiri dari kawasan peruntukan pariwisata berupa wisata alam, yaitu wisata pantai yang meliputi:
 1. Pantai Popoh berada di Kecamatan Besuki;
 2. Pantai Dlado berada di Kecamatan Pucanglaban;
 3. Pantai Sidem berada di Kecamatan Besuki;
 4. Pantai Bayem berada di Kecamatan Besuki;
 5. Pantai Gemah berada di Kecamatan Besuki;
 6. Pantai Klatak berada di Kecamatan Besuki;
 7. Pantai Nglarap berada di Kecamatan Besuki;
 8. Pantai Brumbun berada di Kecamatan Tanggunggunung;
 9. Pantai Sine berada di Kecamatan Kalidawir; dan
 10. Pantai Molang berada di Kecamatan Pucanglaban.

2.6 Ruang Laut

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Rencana alokasi ruang RZRWP-3-K di perairan ditetapkan sebagai hasil analisis tiga dimensi ruang, yaitu permukaan, kolom, dan dasar laut. Pada setiap dimensi, alokasi ruang laut dapat mengakomodasi kegiatan yang multifungsi pada zona tertentu. Dalam kolom perairan pesisir dan pulau-pulau kecil secara vertikal dapat dialokasikan untuk berbagai zona/subzona peruntukan. Pemanfaatan ruang dimaksud didasarkan pada hasil analisis peruntukan ruangnya secara vertikal.

Walaupun demikian, alokasi berbagai zona/subzona tersebut harus disertai dengan peraturan pemanfaatan ruang yang memuat aturan-aturan kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan tidak diperbolehkan, serta kegiatan yang hanya boleh dilakukan dengan syarat, yang disertai pengaturan tata waktu. Sebagai contoh, misalnya didalam praktek biasanya pada layer permukaan dapat digunakan untuk kegiatan pelayaran dan wisata bahari, pada layer kolom perairan dapat digunakan untuk penangkapan ikan, sedangkan pada layer perairan dasar laut dapat digunakan untuk kegiatan konservasi dan wisata selam (Kementerian Kelautan dan Perikanan 2013).

Berikut ini merupakan gambaran dari pemanfaatan ruang laut dengan penerapan analisis tiga dimensi:



Gambar 2. 3 Ilustrasi Alokasi Ruang Laut Tiga Dimensi (Kementerian Kelautan dan Perikanan 2013)

Data dan informasi yang dikumpulkan pada pemanfaatan dan pengelolaan ruang laut meliputi: area pertambangan, konservasi (daerah yang dapat dimanfaatkan) yang sudah ditetapkan, pariwisata, BMKT, Tambat Labuh, *Rig*, *Floating Unit*, bangunan perikanan permanen (KJA, *Seabed*, dll), area penangkapan ikan modern dan tradisional, budidaya laut: rumput laut, mutiara. Objek ruang perairan adalah bagian-bagian tertentu dari perairan meliputi estuari (bagian perairan tempat bertemunya air laut dengan air tawar), teluk (perairan yang menjorok ke darat), laguna (danau asin dekat pantai), dan lain-lain (Kementerian Kelautan dan Perikanan 2013). Hak-hak pemanfaatan ruang laut beserta objek-objek ruang perairan yang teridentifikasi di dalamnya terdapat dalam tabel 2.1.

2.7 Wilayah Pesisir

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional (Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur 2018). Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut (Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung 2012). Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna (Kementerian Kelautan dan Perikanan 2013).

Pengaturan wilayah pesisir dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam RTRW Provinsi dan/atau Rencana Detail Tata Ruang yang berlaku. Pengaturan wilayah pesisir membutuhkan wilayah laut agar menyesuaikan dengan ketentuan RZWP-3-K sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RZWP-3-K. Dalam hal terjadinya perubahan garis pantai secara alami, maka ukuran garis pantai yang digunakan adalah ukuran garis pantai yang ditetapkan oleh lembaga/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur 2018).

Dalam pembagian urusan bidang Kelautan dan Perikanan di kegiatan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, kewenangan terbagi menjadi dua perhatian, yaitu untuk Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Hal ini diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan (tecantum pada Bab V tentang Kewenangan Daerah Provinsi di Laut dan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan Bagian Kesatu

Kewenangan Daerah Provinsi di Laut Pasal 27). Pengaturan wilayah pesisir sebagaimana dimaksud dalam RZWP-3-K dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan/atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang berlaku.

2.8 Wisata Bahari

2.8.1 Pengertian Wisata Bahari

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara (Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung 2012).

Wisata Bahari adalah seluruh kegiatan yang bersifat rekreasi yang aktifitasnya dilakukan pada media kelautan atau bahari dan meliputi daerah pantai, pulau-pulau sekitarnya, serta kawasan lautan dalam pengertian pada permukaannya; dalamnya, ataupun pada dasarnya termasuk didatarannya taman laut. Aktifitas wisata bahari pada dasarnya mengundang tantangan, keberanian, ketenangan, historis, dan yang lebih penting adalah cinta terhadap alam lingkungan laut dan kehidupannya. Pada umumnya taman wisata bahari berlokasi pada tempat yang memiliki lingkungan yang alami, sejuk dan sehat sehingga dapat mencapai suatu kegiatan rekreasi yang optimal.

Didalam perwujudan sebuah taman wisata bahari terdapat beberapa karakteristik yang secara langsung dapat membedakan dengan wisata lainnya. Perbedaan karakteristik tersebut dapat dilihat dari program kegiatan dan fasilitas yang disediakan serta pada kapasitas pengunjung taman wisata bahari (Raharjo 2002).

2.8.2 Kriteria dan Karakteristik Wisata Bahari

Didalam perwujudan suatu taman wisata bahari terdapat kriteria tertentu, diantaranya (Raharjo 2002):

1. Lokasi
 - a. Lokasi ini dapat dipandang sebagai kawasan yang akan mendukung kegiatan Wisata Bahari (cukup kaya akan produk kebaharian).
 - b. Lokasi cukup luas untuk dinilai sebagai kawasan yang akan menampung berbagai kegiatan yang terkait dengan Wisata Bahari.
 - c. Merniliki pengaruh yang cukup besar terhadap aktifitas kepariwisataan yang dapat menyangkut aktifitas peristirahatan, menikmati pemandangan alam, rekreasi, pengenalan alam dan budaya setempat bahkan untuk promosi wisata daerah setempat.
 - d. Lokasi tersebut memiliki daya tarik yang cukup tinggi dilihat dari beberapa variabel penentu seperti halnya aksesibilitas, utilitas, dan kenyamanan.
2. Fasilitas
 - a. Fasilitas kegiatan wisata bahari berupa dermaga untuk berlabuh kapa layar atau boat.
 - b. Area bermain, area berjemur, area berkemah, panggung terbuka.
 - c. Fasilitas penginapan.
 - d. Sarana restoran, kafe, warung makan.

Di dalam perwujudan sebuah taman wisata bahari, terdapat beberapa karakteristik yang secara langsung dapat membedakan dengan wisata lainnya. Perbedaan karakteristik tersebut dapat dilihat dari program kegiatan dan fasilitas yang disediakan serta pada kapasitas pengunjung taman wisata bahari (Raharjo 2002).

Tabel 2. 3 Program Kegiatan dan Fasilitas *Outdoor* (Raharjo 2002)

Jenis Kegiatan	Tujuan	Fasilitas
<i>Banana Boat</i>	Menikmati suasana pemandangan laut dan kawasan rekreasi melalui perairan	<ul style="list-style-type: none"> • Loket • Perahu motor • Perahu karet <i>banana</i>
<i>Boat tour</i>	Menikmati perjalanan sambil sambil meihat keindahan alam sekitar	<ul style="list-style-type: none"> • Dermaga • Gudang • <i>Trayler park</i>
Memancing	Penyaluran hobi dan menikmati keindahan alam sekitar.	<ul style="list-style-type: none"> • Alat pancing • Gudang • Loket
Duduk santai	<ul style="list-style-type: none"> • Rekreasi pasif • Menikmati suasana kawasan rekreasi dan laut • Makan, minum 	Tempat duduk ditaman
Berjemur	Bersantai sambil menikmati panas pantai ditepi pantai	Ruang jemur

Tabel 2. 4 Program Kegiatan dan Fasilitas *Indoor* (Raharjo 2002)

Jenis Kegiatan	Tujuan	Fasilitas
Makan dan minum	Makan dan minum	<ul style="list-style-type: none"> • Kafe restoran
Bermalam	Memberikan alternatif menginap bagi wisatawan.	<ul style="list-style-type: none"> • area kemah • pondok/ penginapan

2.9 Retribusi Daerah

2.9.1 Pengertian Retribusi Daerah

Pengertian retribusi daerah adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada daerah atas pelayanan yang diterima secara langsung atau atas perizinan yang diperoleh. Berbeda dengan pajak yang dikenakan tidak

berdasarkan pelayanan langsung, retribusi hanya dapat dikenakan apabila pemerintah daerah memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat atau pemerintah daerah memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan tertentu (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2018).

Sejalan dengan penjelasan di atas UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai pengganti dari UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000, lebih mempertegas pengertian retribusi dalam tataran pemerintahan yang lebih rendah, sebagai berikut: “Retribusi daerah adalah pungutas daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan.”

Retribusi terdiri dari 3 macam, yaitu retribusi jasa umum, jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Salah satu dari objek retribusi jasa usaha yaitu retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang terdapat pada peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2009 yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2009. Sedangkan setiap daerah Kota/Kabupaten memiliki peraturan daerah mengenai retribusi jasa usaha. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha, bab 3 mengenai retribusi tempat rekreasi dan olahraga pasal 4 nomor 2 dengan rincian yang berkaitan dengan wisata bahari adalah pantai. Tarif retribusi pada objek wisata bahari yang berupa pantai tersebut bekisar Rp. 1.500,- hingga Rp. 10.000,- dengan jenis dan keterangan tertentu.

2.9.2 Sistem Pemungutan Retribusi dan Cara Perhitungannya

Sistem pemungutan retribusi daerah adalah sistem *official assessment*, yaitu pemungutan retribusi daerah berdasarkan penetapan kepala daerah dengan menggunakan

Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan (Sari 2013). Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud diatas dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. Wajib retribusi setelah menerima SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan tinggal melakukan pembayaran menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) pada kantor pos atau bank persepsi. Jika wajib retribusi tidak atau kurang membayar akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) yang didahului dengan Surat Teguran (Pemerintah Republik Indonesia 2009).

Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 151 ayat 1, tata cara perhitungan retribusi dilakukan dengan rumus pada Persamaan (1) sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Penggunaan Jasa} \times \text{Tarif Retribusi} \quad (1)$$

Tingkat Penggunaan Jasa diukur dengan:

1. Jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biasa yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan, misalnya berapa jumlah penjualan tiket.

Tarif retribusi diukur dengan:

1. Nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan.
2. Dapat ditentukan seragam atau diadakan perbedaan sesuai prinsip dan sasaran tarif.

2.10 Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian kadaster kelautan baik di dalam maupun di luar negara Indonesia adalah sebagai berikut:

- a) *Marine Administration Research Activities within Asia and the Pacific Region – Towards a Seamless Land-Sea Interface* oleh Abbas Rajabifard, Ian Williamson dan Andrew Binns tahun 2006 dengan inti penelitian yaitu menciptakan mekanisme yang lebih efektif untuk

pengambilan keputusan mengelola lingkungan laut secara lebih efektif dan efisien. Bertujuan untuk menggambarkan kegiatan penelitian berbasis SDI dalam bidang administrasi kelautan di seluruh wilayah Asia dan Pasifik. Memberikan tinjauan umum tentang tugas-tugas insentif, tujuan dan prinsip serta hasil dari kegiatan penelitian yang saat ini dilakukan melalui Kelompok Kerja 3 (Kadastre) dari PCGIAP.

- b) Membangun Kadaster Kelautan Untuk Mewujudkan Pemerintahan Di Laut oleh Yackob Astor tahun 2016, dengan inti penelitian yaitu permasalahan yang timbul di Indonesia sebagai negara kepulauan yang multikultural tidak terlepas dari konflik penyelenggaraan pengelolaan pesisir dan laut antar sektor, antara pusat dan daerah, antar pemerintah daerah, dan antar pemangku kepentingan. Maka perlu dibangun pola penyelenggaraan kadaster kelautan di Indonesia dalam perspektif Indonesia sebagai negara kepulauan.
- c) Analisa Kesesuaian RZWP-3-K dengan Eksisting Penggunaan Ruang Laut berdasarkan UU No. 1 Tahun 2014 dan Permen-KP No. 23 Tahun 2016 oleh Resti Yully Astuti, Yanto Budisusanto, dan Danar Guruh Pratomo, tahun 2017, dengan inti penelitian yaitu menginventarisasi penggunaan ruang laut kemudian dianalisis terkait kesesuaian antara rencana zonasi dengan kondisi eksistingnya. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu kajian literatur terkait aspek legal dan teknis menggunakan perangkat lunak SIG.
- d) Membangun Peta Kadaster Kelautan dalam Perspektif UU RI No. 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial Wilayah Studi: Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat oleh Suhadi Maulana, Yackob Astor, dan Dedi Supriyadi tahun 2016, dengan inti penelitian yaitu membangun Peta Kadaster Kelautan Kota Cirebon berdasarkan ruang laut yang berbeda yaitu permukaan laut, kolom laut, dan dasar

laut. Bertujuan agar setiap kegiatan yang mempergunakan ruang laut dapat dipetakan. Hasil penelitian ini adalah Peta Kadaster Kelautan Permukaan Laut, Peta Kadaster Kelautan Kolom Laut, dan Peta Kadaster Kelautan Dasar Laut.

- e) Analisis Kebijakan Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Laut dalam Kerangka “*Marine Cadastre*” (Studi Kasus di Wilayah Pulau Bintan, Kabupaten Kepulauan Riau) oleh Johan P. Tamtomo tahun 2006, dengan inti penelitian yaitu menggunakan analisis dengan cara menggabungkan lima prosedur dalam satu langkah, dimulai dari analisis spasial, analisis prioritas dan realisasi kebijakan, riset persepsional konsep “*marine cadastre*”, TEV kebijakan eksisting, dan TEV kebijakan dalam kerangka “*marine cadastre*” dalam skema analisis “*ex-post Φ ex-ante*” kebijakan publik. Model tersebut dalam penelitian ini dinamakan skema analisis kebijakan dalam Satu Prosedur Lima Langkah (SPLL).
- f) Peranan Retribusi Obyek Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik oleh Nur Indah Sari tahun 2013 dengan inti penelitian yaitu mengetahui besarnya kontribusi retribusi daerah wisata Makam Sunan Giri terhadap pendapatan retribusi daerah Kabupaten Gresik dengan metode deskriptif kuantitatif.
- g) Sedangkan pada penelitian ini melakukan evaluasi hasil inventarisasi pemanfaatan ruang laut dan pesisir untuk kegiatan wisata bahari yang dikelola oleh dinas terkait dan masyarakat setempat. Sebagai upaya tertib administrasi kelautan maka dilakukan identifikasi 4 komponen administrasi kelautan yaitu *marine tenure*, *marine development*, *marine use*, dan *marine tax/value* serta mengevaluasi lokasi wisata bahari yang berada di zona resiko rawan bencana tsunami.

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

BAB III METODOLOGI

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi daerah penelitian berada di Kabupaten Tulungagung. Secara geografis wilayah Kabupaten Tulungagung terletak antara koordinat $111^{\circ}43'$ - $112^{\circ}07'$ BT dan $7^{\circ}51'$ - $8^{\circ}18'$ LS. Secara keseluruhan Kabupaten Tulungagung memiliki luas mencapai 1.055,65 km² terbagi menjadi 19 kecamatan 14 kelurahan dan 257 desa. Kabupaten Tulungagung terdapat 4 (empat) kecamatan yang berbatasan langsung dengan laut, yang biasa disebut dengan kecamatan pesisir yakni Kec. Besuki, Kec. Pucanglaban, Kec. Kalidawir, dan Kec. Tanggunggunung.

Kabupaten Tulungagung ini berbatasan dengan: sebelah utara Kabupaten Kediri, selatan Samudera Hindia, timur Kabupaten Blitar, dan barat Kabupaten Trenggalek. Gambar 3.1 berikut ini menunjukkan batas administrasi penelitian di Kabupaten Tulungagung:



Gambar 3. 1 Batas Administrasi Penelitian di Kabupaten Tulungagung

3.2 Data dan Peralatan

3.2.1 Data

1. Peta RZWP-3-K Jawa Timur Tahun 2016 Skala 1:250.000
2. Peta RTRW Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2032 Skala 1:200.000
3. Peta Ripparda Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Skala 1:150.000
4. Peta Eksisting Penggunaan Ruang Laut dan Pesisir Kabupaten Tulungagung Tahun 2016
5. Data survei eksisting karakteristik wisata bahari
6. Data retribusi daerah dari penarikan tiket masuk wisata bahari
7. Peta bahaya tsunami Tulungagung Tahun 2015 skala 1:45.000

3.2.2 Peralatan

Peralatan yang dibutuhkan pada penelitian ini antara lain:

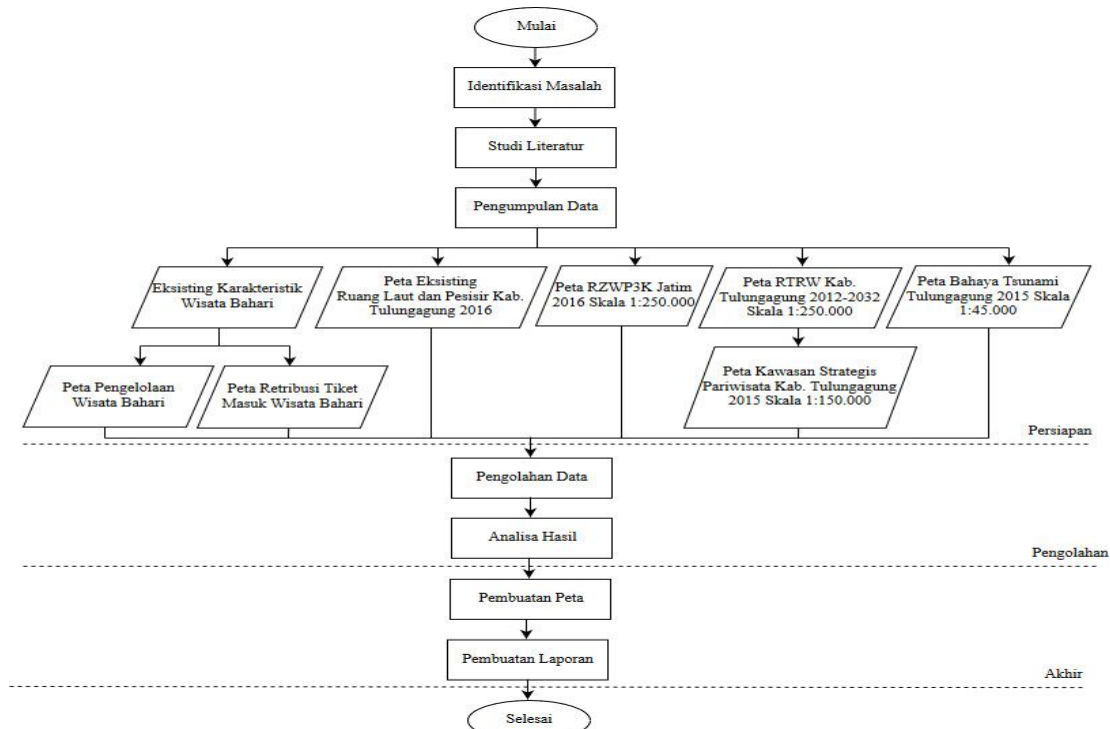
- a. Perangkat lunak pengolah data ArcGIS 10.6.1
- b. Microsoft Office 2016 (Ms. Word, Ms. Point, dan Ms. Excel)
- c. Google Earth
- d. Kamera

3.3 Metodologi Penelitian

Tahapan metodologi penelitian yang akan dilaksanakan pada penelitian ini dibagi menjadi dua (2) yaitu Metodologi Pekerjaan dan Metodologi Pengolahan, dengan rincian sebagai berikut:

3.3.1 Metodologi Pekerjaan

Tahapan yang akan dilaksanakan dalam metodologi pekerjaan ini adalah sebagai berikut:



Gambar 3. 2 Diagram Alir Metodologi Pekerjaan

Dengan penjelasan diagram alir metodologi pekerjaan adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu Kabupaten Tulungagung yang merupakan salah satu daerah di pesisir selatan Jawa Timur wilayah pesisirnya dimanfaatkan untuk kegiatan wisata bahari. Akan tetapi terdapat beberapa wilayah pesisir yang dijadikan lokasi pariwisata tersebut dikelola oleh berbagai pihak sehingga wilayah tersebut perlu dilakukan identifikasi terkait kejelasan pengelola agar tercapainya tertib administrasi di bidang kelautan.

2. Studi Literatur

Bertujuan untuk mendapatkan referensi yang berhubungan dengan administrasi kelautan, peraturan pemerintah mengenai tata ruang kelautan dan pesisir, retribusi daerah hasil pemanfaatan wisata bahari, serta resiko bencana tsunami di wilayah pesisir selatan Kabupaten Tulungagung

3. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data sebagai berikut:

- a. Data eksisting karakteristik wisata bahari
- b. Peta Eksisting Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir Kabupaten Tulungagung Tahun 2016
- c. Peta RZWP-3-K Jawa Timur Tahun 2016 Skala 1:250.000
- d. Peta RTRW Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2032 Skala 1:200.000 dan Peta Ripparda (KSP) Tahun 2015 Skala 1:150.000
- e. Peta bahaya tsunami Tulungagung Tahun 2015 skala 1:45.000

4. Pengolahan data

Setelah mendapatkan data yang diperlukan selanjutnya melakukan pengolahan yang akan di jelaskan pada metodologi pengolahan.

5. Analisa Hasil

Analisa hasil disini dilakukan sebelum pembuatan peta, karena analisa yang digunakan disini adalah kesesuaian antara dokumen perencanaan dengan kondisi eksisting saat ini.

Analisa hasil ini dibagi menjadi 4 analisa, yaitu:

a. Analisa Administrasi Kelautan:

1. Penguasaan Laut (*Marine Tenure*)
2. Nilai/Pajak Kelautan (*Marine Tax/ Value*)
3. Pengembangan Kelautan (*Marine Development*)
4. Penggunaan Laut (*Marine Use*)

b. Analisa resiko bencana tsunami di lokasi wisata bahari

6. Pembuatan Peta

Setelah pengolahan data kemudian melakukan pembuatan peta, diantaranya:

- Peta Pemanfaatan Ruang Laut Dan Pesisir Untuk Kegiatan Wisata Bahari
- Peta Resiko Bencana Tsunami di Lokasi Wisata Bahari

7. Pembuatan Laporan

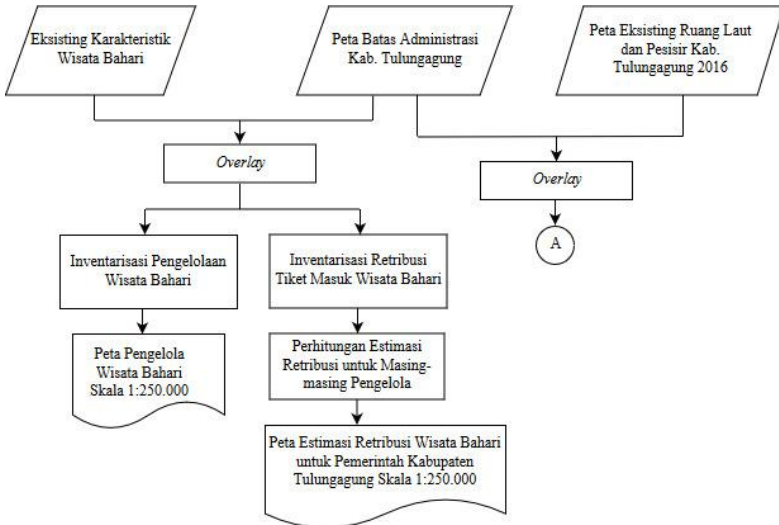
Kemudian setelah tahap-tahap diatas selesai maka selanjutnya membuat laporan Tugas Akhir yang mengacu pada aturan pembuatan laporan KP/TA Teknik Geomatika ITS.

3.3.2 Metodologi Pengolahan

Tahapan yang akan dilaksanakan dalam metodologi pengolahan ini adalah sebagai berikut:

a. Metodologi Pengolahan Tahap Pertama

Gambar 3.3 dibawah ini akan menjelaskan pengolahan tahap pertama dengan alur sebagai berikut:



Gambar 3. 3 Diagram Alir Metodologi Pengolahan Tahap Pertama

Dengan penjelasan diagram alir metodologi pengolahan adalah sebagai berikut:

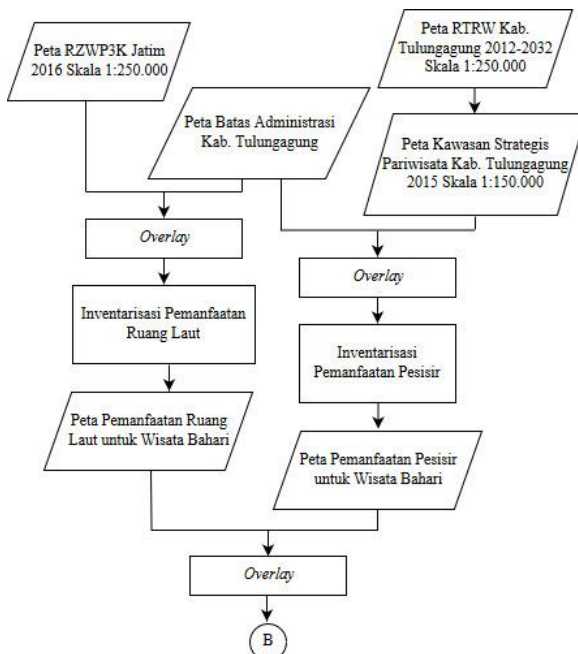
1. Setelah melakukan pengumpulan data yaitu data eksisting karakteristik wisata bahari selanjutnya dilakukan *overlay* dengan batas administrasi Kab. Tulungagung, kemudian dilakukan inventaris mengenai pengelolaan dan retribusi.
2. Pengelolaan wisata bahari meliputi daftar hak dan tanggungjawab pengelola. Sedangkan retribusi diambil dari harga tiket masuk dengan perhitungan jumlah pengunjung berdasarkan hasil survei peneliti.
3. Setelah dilakukan inventarisasi pengelolaan wisata bahari dari adanya komponen Penguasaan Laut (*Marine Tenure*) selanjutnya membuat peta pengelola wisata bahari. Sedangkan inventarisasi retribusi tiket masuk sebagai adanya komponen Nilai/ Pajak Laut (*Marine Tax/ Value*) dilakukan perhitungan Nilai/ Pajak Laut untuk masing-masing pengelola,

selanjutnya dibuat peta estimasi retribusi wisata bahari untuk Pemerintah Kabupaten Tulungagung sebagai pengelola Pihak ke 2.

4. Retribusi ini diambil dari tarif tiket masuk wisata. Data tersebut diperoleh dari survei langsung ke lapangan yang dibantu oleh kelompok sadar wisata /masyarakat setempat.
5. Peta eksisting ruang laut dan pesisir Kab. Tulungagung 2016 dilakukan *overlay* dengan batas administrasi kabupaten. Selanjutnya akan dijelaskan pada tahap kedua.

b. Metodologi Pengolahan Tahap Kedua

Gambar 3.4 dibawah ini akan menjelaskan pengolahan tahap kedua dengan alur sebagai berikut:



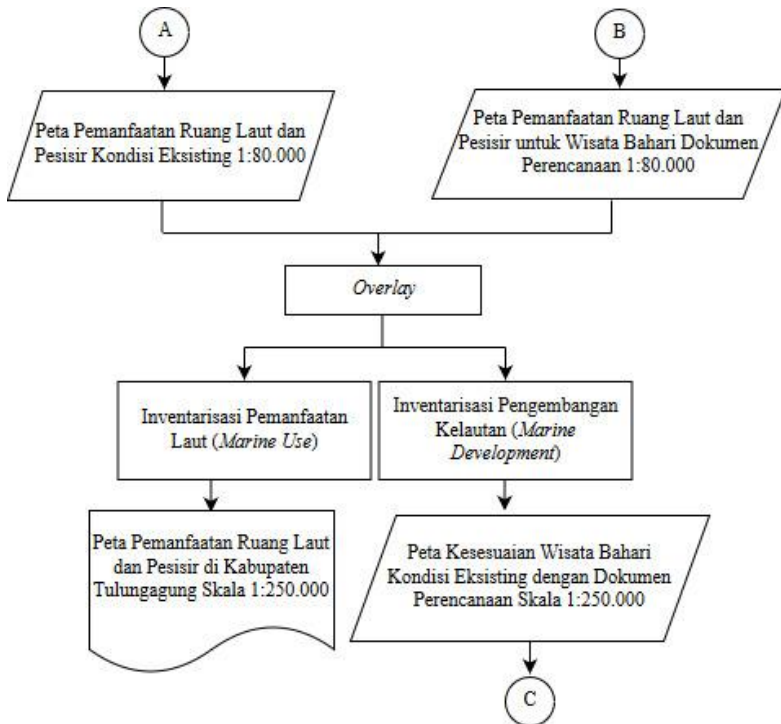
Gambar 3. 4 Diagram Alir Metodologi Pengolahan Tahap Kedua

Dengan penjelasan diagram alir metodologi pengolahan adalah sebagai berikut:

1. Peta RZWP-3-K Jawa Timur dilakukan *overlay* dengan batas administrasi kabupaten. Lalu dilakukan inventaris pemanfaatan ruang laut untuk selanjutnya dilakukan pembuatan peta pemanfaatan ruang laut untuk wisata bahari.
2. Dari peta RTRW Kab. Tulungagung dilakukan pemilahan data untuk diambil peta Kawasan Strategis Pariwisata (KSP), karena peta kawasan strategis pariwisata penyusunannya berpedoman pada RTRW.
3. Peta kawasan strategis pariwisata ini dilakukan *overlay* dengan batas administrasi kabupaten. Lalu dilakukan inventaris pemanfaatan pesisir untuk selanjutnya dilakukan pembuatan peta pemanfaatan pesisir untuk wisata bahari.
4. Kemudian peta pemanfaatan ruang laut dan pesisir dilakukan *overlay* dengan menggunakan fungsi *identity* yang akan dilakukan analisa kesesuaian dengan Kawasan Strategis Pariwisata. Selanjutnya akan dijelaskan pada tahap ketiga.

c. Metodologi Pengolahan Tahap Ketiga

Gambar 3.5 dibawah ini akan menjelaskan pengolahan tahap ketiga yang merupakan lanjutan poin A dari pengolahan tahap pertama dan poin B dari pengolahan tahap kedua dengan alur sebagai berikut:

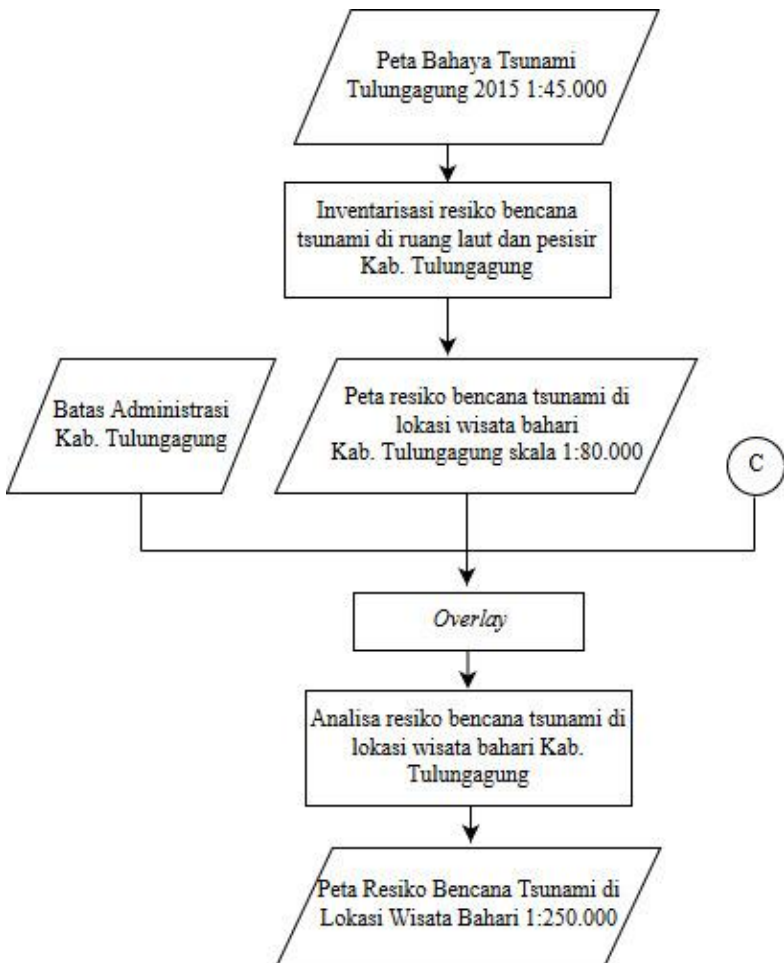


Gambar 3. 5 Diagram Alir Metodologi Pengolahan Tahap Ketiga

Dengan penjelasan diagram alir metodologi pengolahan adalah sebagai berikut:

1. Pada poin A, setelah peta eksisting ruang laut dan pesisir Kab. Tulungagung 2016 dilakukan *overlay* dengan batas administrasi kabupaten, maka akan menghasilkan peta pemanfaatan ruang laut dan pesisir eksisting Kab. Tulungagung.
2. Pada poin B, setelah peta pemanfaatan ruang laut dan pesisir dilakukan *overlay* dari kedua dokumen perencanaan tersebut (RTRW dan RZWP3K), maka menghasilkan peta pemanfaatan ruang laut dan pesisir untuk wisata bahari Kab. Tulungagung.

3. Kedua poin 1 dan 2 diatas dilakukan *overlay* lalu lakukan inventarisasi sebagai adanya komponen Penggunaan Laut (*Marine Use*) dan Pengembangan Kelautan (*Marine Development*).
 4. Selanjutnya dari inventarisasi pemanfaatan laut, dibuat Peta Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir di Kabupaten Tulungagung Skala 1:250.000. Pengelolaan tersebut diambil pengelola pihak ke 2 karena pihak kedua merupakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung.
 5. Dari inventarisasi pengembangan kelautan, dibuat Peta Kesesuaian Wisata Bahari Kondisi Eksisting dengan Dokumen Perencanaan Skala 1:250.000. Kesesuaian tersebut adalah dimana lokasi wisata yang berupa titik koordinat berada dalam kawasan yang telah direncanakan Pemerintah Daerah (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata) untuk dilakukan pengembangan yaitu berupa Peta KSP (Kawasan Strategis Pariwisata) yang berasal dari Peta Ripparda yang penyusunannya berpedoman pada Dokumen RTRW.
 6. Dari peta kesesuaian tersebut selanjutnya dilakukan *overlay* dengan peta resiko bencana tsunami yang akan dijelaskan pada tahap keempat.
- d. Metodologi Pengolahan Tahap Keempat
- Gambar 3.6 dibawah ini akan menjelaskan pengolahan tahap keempat dengan alur sebagai berikut:



Gambar 3. 6 Diagram Alir Metodologi Pengolahan Tahap Keempat

Dengan penjelasan diagram alir metodologi pekerjaan adalah sebagai berikut:

1. Peta bahaya tsunami dilakukan inventarisasi mengenai resiko bencana tsunami berupa luas daerah yang beresiko tsunami di ruang laut dan pesisir Kab. Tulungagung.

2. Selanjutnya dibuat peta resiko bencana tsunami di lokasi wisata bahari Kab. Tulungagung dengan skala 1:250.000. Peta tersebut dibuat menjadi 2 bagian yaitu wilayah timur dan wilayah barat agar lebih terlihat jelas.
3. Batas administrasi kabupaten, peta resiko bencana tsunami di lokasi wisata bahari skala 1:80.000, dan peta kesesuaian wisata bahari kondisi eksisting dengan dokumen perencanaan dilakukan *overlay* dengan menggunakan fungsi *identity*. Kemudian di lakukan analisa resiko bencana tsunami di wilayah lokasi wisata bahari Kab. Tulungagung. Dengan hasil akhir yaitu Peta Resiko Bencana Tsunami di Lokasi Wisata Bahari Kab. Tulungagung Skala 1:250.000 dengan perbesaran skala 1:100.000 dan keterangan Disclaimer untuk menjelaskan tingkat kedetailan peta.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Administrasi Kelautan

Administrasi kelautan ini di peroleh dari adaptasi administrasi pertanahan yang memiliki 4 komponen, diantaranya: penguasaan laut (*marine tenure*), pemanfaatan laut (*marine use*), pengembangan kelautan (*marine development*), dan nilai/pajak kelautan (*marine tax value*). Berikut ini akan menjelaskan masing-masing komponen tersebut.

4.1.1 Penguasaan Laut (*Marine Tenure*)

Pada penelitian ini dihasilkan penguasaan laut dengan lokasi penelitian menggunakan 14 dari 21 wisata bahari. Tujuh (7) lokasi wisata bahari lainnya belum dikelola oleh dinas/warga setempat sehingga belum dikembangkan ke arah pemanfaatan yang lebih kompleks. Pantai-pantai tersebut tidak dilakukan survei karena akses menuju lokasi sulit dijangkau dan masih berupa jalan setapak yang amat terjal. Akses jalan tersebut akan ditampilkan pada Lampiran 1.

Dibawah ini merupakan tabel 4.1 mengenai daftar pengelola wisata bahari yang diperoleh dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan hasil survei lapangan:

Tabel 4. 1 Daftar Pengelola Wisata Bahari

No.	Nama Wisata Bahari	Pengelola – Pihak ke		
		1	2	3
1.	Pantai Popoh	Perhutani	Pemkab (Disbudpar)	Bumdes (Pokdarwis)
2.	Pantai Sidem	Perhutani	Pemkab (Disbudpar)	Bumdes (Pokdarwis)
3.	Pantai Sine	Perhutani	Pemkab (Disbudpar)	Bumdes (Pokdarwis)
4.	Pantai Kedung Tumpang	Perhutani	Pemkab (Disbudpar)	Bumdes (Pokdarwis)

Lanjutan tabel 4.1

No.	Nama Wisata Bahari	Pengelola – Pihak ke		
		1	2	3
5.	P. Dlodo Pucanglaban	Perhutani	Pemkab (Disbudpar)	Bumdes (Pokdarwis)
6.	Pantai Dlodo (Kalidawir)	Perhutani	Bumdes	Masyarakat lokal
7.	Pantai Gemah	Perhutani	Pemkab (Disbudpar)	Bumdes (Pokdarwis)
8.	Pantai Klatak	Perhutani	Pemkab (Disbudpar)	Bumdes (Pokdarwis)
9.	Pantai Bayem	Perhutani	Pemkab (Disbudpar)	Bumdes (Pokdarwis)
10.	Pantai Coro	Perhutani	Swasta	Masyarakat lokal
11.	Pantai Brumbun	Perhutani	Bumdes	LMDH
12.	Pantai Gerangan	Perhutani	Bumdes	LMDH
13.	Pantai Sanggar	Perhutani	Pemkab (Disbudpar)	Bumdes (Pokdarwis)
14.	Pantai Ngalur	Perhutani	Pemkab (Disbudpar)	Bumdes (Pokdarwis)

- Dalam pengelolaan lingkungan kelautan untuk wisata bahari, hak dan kewajiban penanggung jawab sebagai pengelola wisata yang telah disebutkan pada subbab 4.1.1, bahwa pengelola terkait adanya kegiatan wisata tersebut ada tiga (3). Berikut merupakan hak dan kewajiban masing-masing pengelola menurut Perjanjian Kerjasama Kemitraan Pengelola Wana Wisata antara Perum Perhutani KPH Blitar dengan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, dan Badan Usaha Milik Desa yang diperoleh dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung:

i. Pihak Kesatu

Hak Pihak kesatu:

- Menerima bagi hasil sebesar 30% dari pendapatan netto untuk tiket masuk dan parkir objek perjanjian dan 30% dari pemafaatan lahan.
- Melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan pengelola kawasan wana wisata.
- Menugaskan personil untuk ikut serta bersama Pihak Kedua dan Pihak Ketiga memonitor penjualan tiket masuk pada hari libur dan atau hari-hari tertentu.
- Meminta bantuan kepada Pihak Kedua dan Pihak Ketiga untuk mengamankan dan menjaga keketarian sumber daya hutan.
- Melakukan penutupan sementara apabila terjadi bencana alam dan atau sebab lainnya.

Kewajiban Pihak Kesatu:

- Menyediakan kawasan hutan untuk keperluan pengembangan wana wisata dan pembangunan sarana prasarana dan fasilitas pendukung lainnya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prioritas anggaran serta kemampuan keuangan daerah.
- Bersama Para Pihak meningkatkan dan melindungi sumber daya hutan yang terletak di kawasan hutan.
- Melakukan pengamanan hutan disekitar lokasi wana wisata.
- Mendampingi Pihak Kedua dalam pengurusan perizinan terkait dengan pengelolaan wisata yang menjadi objek perjanjian ini.

ii. Pihak Kedua

Hak Pihak Kedua:

- Menerima bagi hasil sebesar 20% dari pendapatan netto untuk tiket masuk dan parkir objek perjanjian dan 20% dari pemanfaatan lahan.
- Memanfaatkan kawasan hutan bersama Pihak Kesatu dan Pihak Ketiga untuk keperluan pengembangan wana wisata dan pengembangan sarana prasarana dan fasilitas pendukung lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prioritas anggaran serta kemampuan keuangan daerah.
- Bersama Pihak Kesatu dan Pihak Ketiga melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan pengelolaan di kawasan wana wisata .
- Bersama Para Pihak menetapkan harga Karcis Tanda Masuk (KTM).
- Memasang rambu tanda bahaya untuk para pengunjung.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Mengadakan penataan, pembenahan, pengembangan, dan pemeliharaan fasilitas obyek wisata dengan memperhatikan kaidah konservasi dan batas kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah dikomunikasikan terlebih dahulu dengan Pihak Kesatu.
- Bersama Pihak Kesatu dan Pihak Ketiga melindungi, mengamankan, memelihara sumber daya hutan dan melaksanakan konservasi dan rehabilitasi lahan pada sekitar lokasi yang menjadi objek perjanjian.
- Memberikan fasilitas pelaksanaan perlindungan masyarakat apabila terjadi bencana alam pada obyek perjanjian ini termasuk upaya kesiagaan

(Mitigasi Bencana, pemasangan plang peringatan dan lain lain) dan penanggulangan bencana, rekonstruksi dan penanganan pengunjung yang dalam hal ini dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah (BPBD) Kabupaten Tulungagung.

- Mengurus perizinan terkait kegiatan usaha jasa wisata atas nama Pihak Kesatu dengan beban biaya Pihak Kedua.
- Memasang rambu-rambu tanda peringatan bahaya untuk para pengunjung.

iii. Pihak Ketiga

Hak Pihak Ketiga:

- Menerima bagi hasil sebesar 50% dari pendapatan netto untuk tiket masuk dan parkir objek perjanjian serta 50% dari pemanfaatan lahan.
- Melakukan penarikan seluruh retribusi diobyek wana wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 perjanjian ini, yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Kewajiban Pihak Ketiga:

- Membayar kewajiban bagi hasil kepada Pihak Kedua dari pendapatan netto (bersih) obyek perjanjian terhitung sejak tanggal dimulainya operasional sampai dengan berakhirnya perjanjian ini.
- Memberikan bagi hasil dari pendapatan bersih untuk Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dari kegiatan pengelolaan wana wisata setelah penandatanganan perjanjian kerjasama ini.
- Pengadaan tiket masuk parkir pengunjung wana wisata.
- Melakukan porporasi terhadap tiket masuk dan parkir obyek wana wisata melalui Pihak Kedua.

- Menyiapkan personil untuk penarikan karcis pengunjung dan biaya jasa usaha pariwisata/ pemanfaatan lahan, pengamanan, ketertiban dan pemeliharaan, termasuk kebersihan dan kelesatarian wana wisata dalam obyek perjanjian.
- Membayar asuransi kecelakaan pengunjung dalam lokasi obyek kerjasama.
- Bersama Para Pihak melindungi, mengamankan, dan menjaga sumber daya hutan, menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, fasilitas, serta melaksanakan konservasi dan rehabilitasi lahan pada dan sekitar lokasi yang menjadi obyek kerjasama secara berkelanjutan.
- Berperan aktif dalam kesiagaan dan penanggulangan bencana alam bersama Para Pihak

6.1.1.1 Analisa *Marine Tenure*

Tabel 4.1 menunjukkan pantai-pantai yang dilakukan survei langsung ke lapangan. Berikut ini terdapat tujuh (7) pantai lainnya yang tidak dilakukan survei:

1. Pantai Nglarap
2. Pantai Molang
3. Pantai Sawah Ombo
4. Pantai Sioro
5. Pantai Banyu Mulok
6. Pantai Lumbang
7. Pantai Patok Gebang

Ke tujuh pantai tersebut tidak terdapat dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan. Karena belum dikelola sepenuhnya dan masih bergabung dengan pantai terdekat. Selain jalan yang masih belum dibuka untuk akses umum, ke tujuh pantai tersebut belum dibentuk pengelola oleh dinas terkait.

Ke tujuh pantai tersebut sebenarnya memiliki pemandangan yang bagus, pantai yang masih bersih, dan air laut yang jernih, meskipun belum ada fasilitas untuk pengunjung. Akses jalan yang cukup sulit mengakibatkan ke tujuh pantai tersebut jarang sekali di kunjungi. Pantai-pantai tersebut akan memiliki potensi yang cukup besar apabila dari segi akses jalannya dilakukan perbaikan, seperti pelebaran jalan, pembangunan jalan, baik di aspal maupun di paving serta di tambah fasilitas pendukung lainnya seperti toilet, warung dan gubuk untuk berteduh.

Dari 21 pantai yang ada di Kabupaten Tulungagung tersebut yang memiliki potensi pengunjung terbanyak saat ini adalah di Pantai Sine dan Pantai Gemah. Pantai tersebut memiliki pemandangan yang cukup bagus, akses yang baik, jalan yang sudah beraspal dan dapat dilalui kendaraan roda empat serta fasilitas di sekitar pantai seperti toilet, mushala, warung, parkir, dan sarana rekreasi. Sehingga kedua pantai tersebut juga menghasilkan retribusi yang lebih banyak daripada pantai yang lain. Deskripsi aksesibilitas dapat dilihat pada Lampiran 1 Daftar Karakteristik Pariwisata.

Pada pernyataan diatas, hasil yang dapat di analisa adalah sebagai berikut:

- Pengelola pihak pertama adalah Perhutani, karena lokasi wisata bahari tersebut terletak di dalam kawasan Perum Perhutani.
- Pengelola pihak kedua adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
- Pengelola pihak kedua atas nama Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan dibantu oleh Bumdes dengan membentuk pokdarwis ini hanya berlaku di lokasi wisata bahari antara lain: Pantai Popoh,

Pantai Sidem, Pantai Sine, Pantai Kedung Tumpang, Pantai Dlodo Pucanglaban, Pantai Gemah, Pantai Klatak, Pantai Bayem, Pantai Sanggar, dan Pantai Ngalur.

- Sedangkan untuk Pantai Dlodo Kalidawir^[1], Pantai Brumbun, dan Pantai Gerangan^[2] pihak keduanya adalah Bumdes sendiri karena Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata atas nama Pemerintah Kabupaten Tulungagung belum menindak lanjuti pengelolaan wisata bahari di lokasi tersebut. Sehingga pihak ketiganya dibentuk oleh Dinas Perhutani dengan membentuk LMDH (Masyarakat Desa Hutan).
- Untuk Pantai Coro^[3] pihak keduanya adalah swasta karena Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata atas nama Pemerintah Kabupaten Tulungagung belum menindak lanjuti pengelolaan wisata bahari di Pantai Coro, dan untuk saat ini sedang dalam proses pengembangan yang dibantu swasta.
- Pengelola pihak ketiga adalah BUMDes, pihak ketiga sebagai utusan dari pihak kesatu dan kedua untuk membantu mengelola kepentingan pariwisata, seperti: pengadaan dan penarikan karcis, pengamanan, ketertiban, pemeliharaan kebersihan dan kelestarian, serta membayar asuransi kecelakaan pengunjung.
 - BUMDes menunjuk Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) untuk membantu proses pengelolaan wisata bahari.
 - Sedangkan LMDH merupakan Lembaga Masyarakat Desa Hutan yang dibentuk oleh

¹ wawancara dengan Bapak Kayani (penjaga parkir Pantai Dlodo Kalidawir). Pada hari Minggu, 10 Maret 2019 Pukul 12.10 WIB.

² wawancara dengan Bapak Sutrisno (anggota LMDH). Pada hari Minggu, 24 Maret 2019 Pukul 11.00 WIB.

³ wawancara dengan Bapak Damis Setiawan (masyarakat lokal). Pada hari Senin, 11 Maret 2019 Pukul 13.00 WIB.

masyarakat desa dibawah Perum Perhutani untuk membantu mengelola wisata bahari yang belum di tindak lanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

- Pengelola pihak ketiga yang merupakan masyarakat lokal merupakan utusan dari Swasta untuk membantu proses pengembangan di lokasi wisata bahari.
- Wilayah pesisir dan ruang laut yang dijadikan kegiatan wisata bahari semuanya belum melakukan pendaftaran. Pengelola hanya melakukan inventarisasi pemanfaatan di lokasi wisata tersebut, seperti adanya wahana rekreasi, penginapan, dan warung makan. Pengelola juga belum pernah meresmikan adanya tempat wisata.^[4]
- Ketiga pengelola tersebut dibentuk berdasarkan Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara Perum Perhutani KPH Blitar dengan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan Badan Usaha Milik Desa.
- Peta pengelolaan wisata bahari akan ditampilkan pada Lampiran 3.

Dari analisa tersebut dapat di simpulkan bahwa untuk komponen Penguasaan Laut (*Marine Tenure*), semua wisata bahari di Kabupaten Tulungagung tidak sesuai dengan tertib administrasi kelautan, karena dari hasil survei menyebutkan bahwa pengelola wisata bahari tidak melakukan pendaftaran penggunaan ruang laut dan pesisir untuk kegiatan pariwisata, padahal pendaftaran penggunaan suatu ruang merupakan salah satu unsur yang harus di penuhi untuk memiliki izin penggunaan dan agar tercapainya tertib administrasi. Namun sebagian besar pariwisata tersebut sudah memiliki pengelola.

⁴ wawancara dengan bapak Hari Moedo (pegawai Disbudpar). Pada hari Senin, 25 Maret 2019 Pukul 10.00 WIB.

4.1.2 Pemanfaatan Laut (*Marine Use*)

Pada hasil penelitian untuk komponen *Marine Use* atau pemanfaatan sumber daya kelautan di wilayah pesisir, selain untuk wisata bahari juga digunakan untuk pemanfaatan lain oleh masyarakat sekitar. Tabel 4.2 berikut merupakan pemanfaatan sumber daya kelautan di wilayah pesisir yang diperoleh dari hasil survei lapangan dan analisis Peta RTRW Kabupaten Tulungagung:

Tabel 4. 2 Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan

No.	Nama Desa di Pesisir	Pemanfaatan
1.	Keboireng	Wisata bahari (Pantai Gemah, Pantai Klatak Pantai Bayem, Pantai Nglarap), warung, pemukiman nelayan, perikanan tangkap.
2.	Besuki	Pantai Widodaren, Sawah tadah hujan, pemukiman.
3.	Besole	Wisata bahari (Pantai Popoh, Pantai Sidem, Pantai Coro, Pantai Banyu Mulok), warung, pemukiman nelayan, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Popoh, Keramba Jaring Apung (KJA), perikanan tangkap, pemancingan, pelabuhan, penginapan, gedung pertunjukan dan kawasan konservasi.
4.	Ngrejo	Wisata bahari (Pantai Brumbun, Pantai Gerangan, Pantai Sawah Ombo, Pantai Sioro), rumah apung, pemukiman nelayan, sandar kapal nelayan, perikanan tangkap dan kawasan konservasi.
5.	Jengglungharjo	Wisata bahari (Pantai Sanggar, Pantai Ngalur, Pantai Patok Gebang) dan kawasan konservasi.
6.	Kalibatur	Wisata bahari (Pantai Sine), pemukiman nelayan, warung, TPI, perikanan tangkap dan kawasan konservasi.
7.	Rejosari	Wisata Pantai Dlado Kalidawir, kebun kelapa, pemukiman.
8.	Panggungkalak	Wisata Pantai Dlado Pucanglaban, kebun kelapa, pemukiman.

Lanjutan Tabel 4.2

No.	Nama Desa di Pesisir	Pemanfaatan
9.	Pucanglaban	Wisata Pantai (Kedung Tumpang, Pantai Molang, Pantai Lumbang).

4.1.2.1 Analisa *Marine Use*

Dilihat dari tabel 4.2, dari ke 9 desa yang terletak di pesisir, semuanya memiliki wisata pantai. Dari semua pantai tersebut yang sudah digunakan untuk pariwisata ada di semua desa kecuali Desa Besuki. Di Desa Besuki terdapat sebuah pantai yaitu Pantai Widodaren, akan tetapi pantai tersebut belum ada yang mengelola, pengunjungnya hanya warga sekitar yang ingin mencari ikan.

Dari 9 desa tersebut, 8 desa wilayah pesisirnya selain dimanfaatkan untuk pariwisata juga dimanfaatkan untuk pemukiman, perikanan tangkap dan pelabuhan penangkapan ikan, serta kawasan konservasi. Satu desa lainnya yaitu desa Pucanglaban Kecamatan Pucanglaban, pesisirnya tidak dijadikan pemukiman karena akses jalan yang belum dibuka serta tidak ada jaringan listrik.

Dari pemanfaatan ruang laut tersebut yang paling mendominasi adalah digunakan untuk perikanan tangkap dan perikanan budidaya, sedangkan untuk pemanfaatan pesisir yang paling mendominasi adalah untuk kegiatan pariwisata untuk sebagian besar dan pemukiman untuk sebagian kecil. Sehingga dari pemanfaatan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan ruang laut dan pesisir sudah tertib administrasi kelautan sesuai dengan RZWP-3-K, karena sebagian besar ruang laut dimanfaatkan untuk kegiatan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pelabuhan, dll. Sedangkan untuk pesisir sebagian besar telah di manfaatkan untuk kegiatan pariwisata yang

sebagaimana mestinya pesisir memiliki daya tarik yang tinggi dengan adanya pantai.

Peta pemanfaatan ruang laut dan pesisir akan ditampilkan pada Lampiran 5.

4.1.3 Pengembangan Kelautan (*Marine Development*)

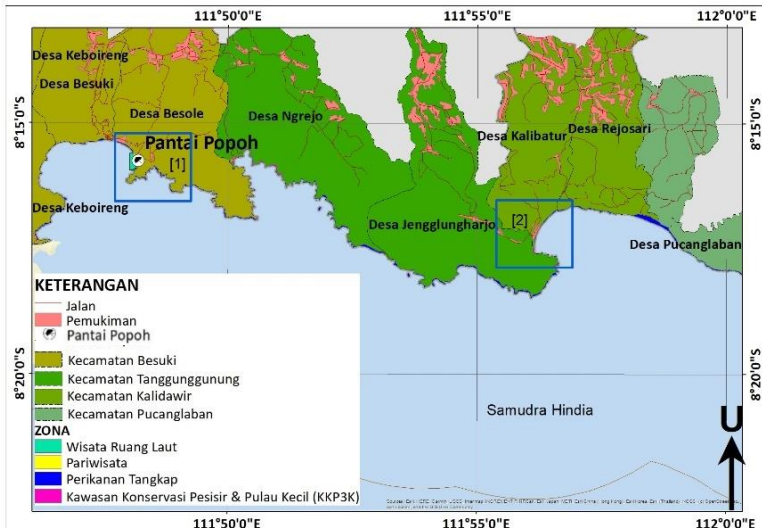
Pada hasil penelitian untuk pengembangan kelautan ini diperoleh kesesuaian kondisi eksisting dengan dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan di darat berupa pesisir menggunakan Peta RTRW dengan bantuan Peta Kawasan Strategis Pariwisata Skala 1:150.000 yang berasal dari Peta Ripparda (Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata) dan penyusunannya berpedoman pada dokumen RTRW Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2032 dengan skala petanya 1:200.000, menggunakan dokumen perencanaan di ruang laut berupa dokumen RZWP-3-K Jawa Timur Tahun 2016 dengan skala petanya 1:250.000, dengan kondisi eksisting yang di peroleh dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur.

a. Dokumen RZWP-3K

Menurut dokumen RZWP-3-K Jawa Timur Tahun 2016, pemanfaatan di wilayah ruang laut untuk wisata bahari hanya terdapat di Desa Besuki, yaitu Pantai Popoh. Sedangkan pada desa-desa lain hanya masuk ke dalam zona-zona pemanfaatan. Untuk zona pemanfaatan terbagi dalam 4 zona diantaranya: zona KKP3K (Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil), zona pariwisata, zona perikanan tangkap, dan zona wisata ruang laut.

Pada Gambar 4.1 terlihat bahwa pemanfaatan ruang laut untuk wisata bahari hanya terdapat di Desa Besole yaitu di Pantai Popoh. Pantai Popoh ini terletak di sekitar pemukiman warga. Selain itu, pemanfaatan ruang laut di Desa Besole, Desa Besuki, dan Desa Keboireng adalah untuk perikanan tangkap. Berikut ini merupakan tampilan

peta pemanfaatan ruang laut untuk wisata bahari menurut dokumen RZWP-3-K yang diperbesar pada Gambar 4.2 dan Gambar 4.3:



Gambar 4. 1 Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut RZWP-3-K

Ruang laut yang termasuk ke dalam zona KKP3K adalah Desa Ngrejo dan Desa Jengglunharjo Kecamatan Taggunggunung, dan Desa Kalibatur Kecamatan Kalidawir. Sedangkan yang termasuk dalam zona perikanan tangkap adalah Desa Kalibatur dan Desa Rejosari Kecamatan Kalidawir, Desa Panggungkalak dan Desa Pucanglaban Kecamatan Pucanglaban.

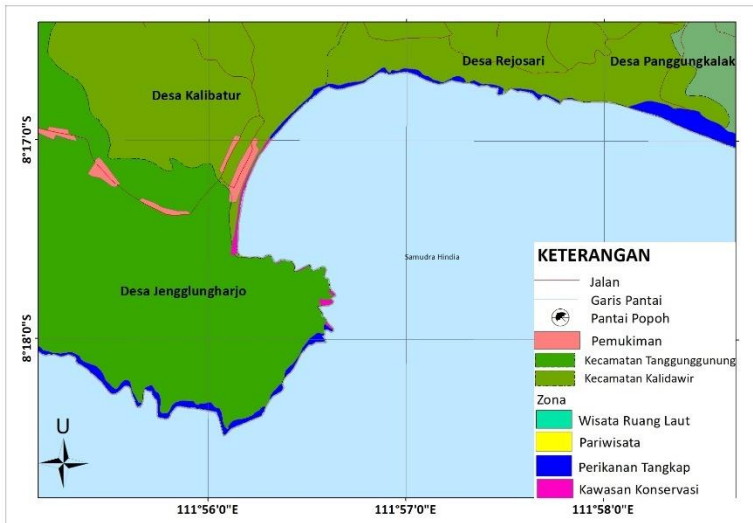
Gambar 4.2 berikut ini akan mewakili pemanfaatan ruang laut dan pesisir RZWP-3-K di Desa Besole:



Gambar 4. 2 Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut RZWP-3-K Desa Besole

Di Desa Besole, pemanfaatan pesisir untuk pariwisata adalah berwarna kuning, sedangkan untuk pariwisata ruang laut berwarna hijau. Warna biru di sekitar pantai dimanfaatkan untuk kawasan perikanan tangkap. Warna magenta untuk pemanfaatan pesisir berupa Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KKP3K). Kawasan konservasi tersebut berada di Desa Kalibatur dan Desa Rejosari Kec. Kalidawir dan Desa Jengglunharjo Kec. Tanggunggunung.

Gambar 4.3 berikut ini menggambarkan pemanfaatan ruang laut dan pesisir untuk kawasan konservasi KKP3K sesuai dengan dokumen RZWP-3-K yang berada di Desa Jengglunharjo Kec. Tanggunggunung dengan wilayah ruang lautnya dimanfaatkan untuk perikanan tangkap dan sebagian kecil untuk kawasan konservasi. Di Desa Kalibatur ruang lautnya dimanfaatkan untuk kawasan konservasi dan perikanan tangkap.



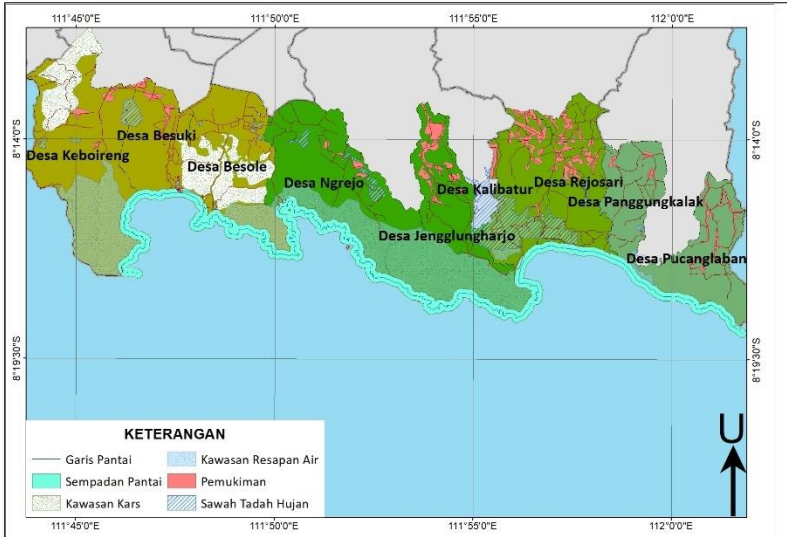
Gambar 4. 3 Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut Kec. Tanggunggunung dan Kec. Kalidawir

b. Dokumen RTRW Kab. Tulungagung

Menurut dokumen RTRW Kabupaten Tulungagung tahun 2012-2032 tidak terdapat lokasi wisata bahari yang direncanakan di wilayah pesisir ataupun ruang laut. Hal ini karena kawasan peruntukan pariwisata dalam konstelasi wilayah menjadi wewenang Kementerian Pariwisata yang kawasan pengembangannya diatur dalam PP. No. 26 Tahun 2008 Tentang RTRWN. Kawasan pariwisata tersebut terdapat dalam Ripparda (Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan) yang dalam penyusunan Ripparda berpedoman pada RTRW. Pembangunan pariwisata berbasis wilayah dilaksanakan dengan menetapkan kawasan strategis pariwisata sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang yang berlaku. Di dalam Ripparda tersebut, pesisir di Kabupaten Tulungagung terdapat 16 lokasi wisata bahari. Padahal dari hasil survei lapangan terdapat 21 lokasi wisata

bahari dengan yang mampu di jangkau peneliti ada 14 lokasi wisata bahari.

Gambar 4.4 berikut akan menampilkan pemanfaatan pesisir pada dokumen RTRW:



Gambar 4. 4 Identifikasi Pemanfaatan Pesisir RTRW

Gambar 4.4 menunjukkan bahwa pada dokumen RTRW tidak terdapat perencanaan lokasi wisata bahari, karena tanggungjawab wisata bahari telah sepenuhnya diserahkan pada Kementerian Pariwisata dalam dokumen Ripparda yang penyusunannya berpedoman pada dokumen RTRW.

Gambar 4.5 berikut ini merupakan hasil identifikasi pemanfaatan ruang laut dan pesisir untuk kegiatan wisata bahari pada peta Ripparda:



Gambar 4. 5 Identifikasi Pemanfaatan Pesisir Ripparda

Dari Gambar 4.5 tersebut dapat dilihat bahwa terdapat 16 lokasi wisata bahari yang terbagi dalam 3 kawasan strategis. Kawasan pertama terdapat dalam Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) IV A Pesisir Barat. Kawasan pertama tersebut terdapat 8 pantai yaitu Pantai Nglarap, Pantai Klatak, Pantai Bayem, Pantai Sidem, Pantai Popoh, Pantai Coro, Pantai Banyu Muluk, dan Pantai Brumbun.

Kawasan kedua terdapat dalam Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) IV B Pesisir Tengah. Kawasan kedua tersebut terdapat 4 pantai yaitu Pantai Gerangan, Pantai Sanggar, Pantai Pathok Gebang, dan Pantai Sine.

Kawasan ketiga terdapat dalam Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) IV C Pesisir Timur. Kawasan ketiga tersebut terdapat 4 pantai yaitu Pantai Dlodo, Pantai Kedung Tumpang, Pantai Lumbang, dan Pantai Molang.

c. Kondisi Eksisting

Menurut kondisi eksisting, lokasi wisata bahari dapat dilihat pada Gambar 4.6 dibawah ini:



Gambar 4. 6 Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir Eksisting

Dari Gambar 4.6 dapat dilihat bahwa pemanfaatan ruang laut dengan batas 4mil dari garis pantai, tidak hanya dijadikan daerah pariwisata, namun juga dimanfaatkan untuk kawasan lain seperti migrasi biota laut, kawasan konservasi, kawasan perikanan budidaya dan perikanan tangkap, serta PPI (Pelabuhan Penangkapan Ikan). Dari survei kondisi eksisting tersebut juga diketahui bahwa terdapat 14 lokasi di pesisir yang dijadikan wisata bahari. Tabel 4.3 berikut ini merupakan koordinat UTM 14 wisata bahari menurut survei kondisi eksisting.

Tabel 4. 3 Koordinat Lokasi Wisata Bahari

No.	Nama Pantai	Koordinat	
		X	Y
1.	P. Popoh	588234	9086674
2.	P. Sidem	588077	9087130
3.	P. Sine	603420	9084369
4.	P. Kedung Tumpang	611380	9082037
5.	P. Dlodo (Pucanglaban)	607617	9084310

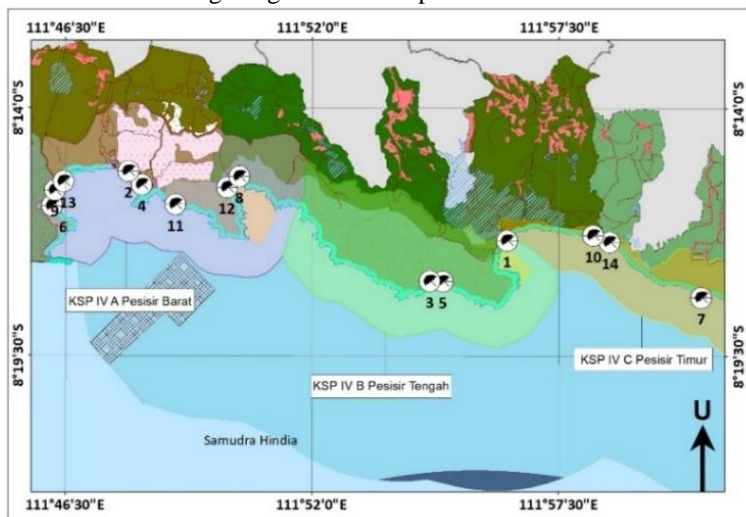
Lanjutan Tabel 4.3

No.	Nama Pantai	Koordinat	
		X	Y
6.	P. Dlado (Kalidawir)	606948	9084581
7.	P. Gemah	584915	9086465
8.	P. Klatak	584649	9085977
9.	P. Bayem	585594	9087088
10.	P. Coro	589857	9085875
11.	P. Brumbun	591971	9086568
12.	P. Gerangan	592469	9087008
13.	P. Sanggar	600259	9082718
14.	P. Ngalur	600787	9082712

4.1.3.1 Analisa *Marine Development*

Pada hasil *overlay* dokumen perencanaan dengan eksisting menghasilkan lokasi wisata bahari yang terdapat pada dokumen RZWP-3-K, dokumen Ripparda, dan kondisi eksisting, yang ketiganya masuk ke dalam kawasan strategis wisata.

Gambar 4.7 berikut ini akan menampilkan hasil kesesuaian kondisi eksisting dengan dokumen perencanaan:



Gambar 4. 7 Kesesuaian Lokasi Wisata Kondisi Eksisting dengan Dokumen Perencanaan

Dengan keterangan sebagai berikut:



Dari Gambar 4.7 dapat dilihat bahwa lokasi wisata bahari pada kondisi eksisting berada dalam kawasan yang di rencanakan pemerintah daerah yaitu KSP (Kawasan Strategi Pariwisata), maka dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa lokasi wisata kondisi eksisting yang diperoleh dari survei lapangan sesuai dengan kawasan yang telah direncanakan pemerintah.

Dapat dilihat dalam zona Kawasan Strategis Pariwisata yang dibagi menjadi tiga KSP, yaitu KSP IV A, KSP IV B, dan KSP IV C. Pada KSP IV A terdapat 8 lokasi yaitu Pantai Klatak, Pantai Gemah, Pantai Bayem, Pantai Sidem, Pantai Popoh, Pantai Coro, Pantai Brumbun, dan Pantai Gerangan. KSP IV B terdapat 3 lokasi, yaitu Pantai Pantai Sanggar, Pantai Ngalur, dan Pantai Sine. Serta KSP IV C terdapat 3 lokasi yaitu Pantai Dlodo Kalidawir, Pantai Dlodo Pucanglaban, dan Pantai Kedung Tumpang.

Dari analisa Pengembangan Laut dapat disimpulkan bahwa keberadaan wisata bahari di ruang laut dan pesisir Kabupaten Tulungagung tidak tertib dalam administrasi kelautan karena dalam dokumen perencanaan berupa RZWP-3-K Jawa Timur (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil) tidak terdapat perencanaan lokasi

wisata. Menurut dokumen perencanaan berupa RTRW Kabupaten Tulungagung juga tidak terdapat perencanaan lokasi wisata di pesisir, namun terdapat dalam dokumen perencanaan berupa Ripparda (Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan).

Peta Kesesuaian pemanfaatan ruang laut dan pesisir untuk kegiatan wisata bahari dengan dokumen perencanaan akan ditampilkan pada Lampiran 6.

4.1.4 Nilai/ Pajak Kelautan (*Marine Tax/ Value*)

Hasil penelitian *marine tax/value* yang merupakan bagian dari administrasi kelautan adalah komponen nilai pajak. Nilai pajak ini berada di pesisir yaitu berupa retribusi adanya kegiatan wisata bahari. Data retribusi ini merupakan data yang diperoleh dari hasil survei lapangan pada bulan Maret 2019. Tabel 4.4 berikut merupakan inventarisasi retribusi di bidang wisata bahari:

Tabel 4. 4 Inventarisasi Retribusi Wisata Bahari

Nama Wisata Bahari	Harga Jual Tiket(Rp)		A (Rp)	B
	H. Biasa	H. Libur		
P. Popoh	8.000	10.000	9.000	115.200
P. Sidem	8.000	10.000	9.000	12.000
P. Sine	5.000	15.000	10.000	530.880
P. Kedung Tumpang	5.000	12.000	9.000	96.000
P. Dlodo (Pucanglaban)	5.000	10.000	7.500	9.600
P. Dlodo (Kalidawir)	5.000	5.000	5.000	2.400
P. Gemah	5.000	7.500	6.250	432.000
P. Klatak	-	-	-	-
P. Bayem	-	-	-	-
P. Coro	5.000	10.000	7.500	4.800
P. Brumbun	-	5.000	2.500	2.400
P. Gerangan	-	5.000	2.500	2.400
P. Sanggar	5.000	7.000	7.500	4.800
P. Ngalur	5.000	7.000	7.500	4.800

Keterangan:

A: Rata-rata harga tiket perminggu

B: Rata-rata jumlah pengunjung pertahun

█ : Dikelola oleh selain Pemkab

- Pantai Klatak dan Pantai Bayem tidak dikenakan biaya tiket masuk karena tidak memiliki portal sendiri dan masih bergabung pengelolaannya dengan Pantai Gemah.
- Jumlah pengunjung akan mengalami kenaikan saat musim libur telah tiba, seperti libur sekolah dan libur Hari Raya.

Dari pendapatan retribusi sebagaimana telah disampaikan pada Tabel 4.4, kemudian dilakukan perhitungan bagi hasil yang telah disampaikan pada subbab 4.1.1, maka menghasilkan besar penerimaan retribusi untuk masing-masing pengelola.

Berdasarkan data diatas, maka akan diperoleh pembagian penghasilan retribusi kepada para pemangku kepentingan/ Para Pihak. Pada Tabel 4.5 berikut ini merupakan besar perhitungan bagi hasil untuk para pihak dalam mengelola wisata bahari:

Tabel 4. 5 Perhitungan Bagi Hasil Untuk Para Pihak/Tahun

No.	Nama Wisata Bahari	Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3
		× 1. 0 0 0 (R p)		
1.	Pantai Popoh	311.040	207.360	518.400
2.	Pantai Sidem	32.400	21.600	54.000
3.	Pantai Sine	1.592.640	1.061.760	2.654.400
4.	Pantai Kedung Tumpang	259.200	172.800	432.000
5.	Pantai Dlodo (Pucanglaban)	21.600	14.400	36.000
6.	Pantai Dlodo (Kalidawir)	3.600	2.400	6.000
7.	Pantai Gemah	810.000	540.000	1.350.000
8.	Pantai Klatak	-	-	-
9.	Pantai Bayem	-	-	-
10.	Pantai Coro	10.800	7.200	18.000
11.	Pantai Brumbun	1.800	1.200	3.000
12.	Pantai Gerangan	1.800	1.200	3.000
13.	Pantai Sanggar	10.800	7.200	18.000
14.	Pantai Ngalur	10.800	7.200	18.000

4.1.4.1 Analisa *Marine Tax/Value*

Dari hasil inventarisasi *marine tenure*, dapat diketahui bahwa penerima retribusi terbesar diterima oleh pihak ketiga sebesar 50%, penerima terkecil adalah pihak kedua sebesar 20%, dan pihak pertama menerima retribusi sebesar 30%. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa tidak semua kegiatan wisata di kelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, maka retribusi tidak sepenuhnya diterima oleh Pemerintah Kabupaten.

Pemerintah Kabupaten hanya menerima 20% dari seluruh penghasilan adanya kegiatan wisata bahari, hal ini karena lokasi wisata bahari tersebut berada dalam kawasan Dinas Perhutani, dan Pemerintah Kabupaten sendiri tidak sepenuhnya mampu mengelola wisata bahari. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten memberdayakan masyarakat di sekitar pesisir untuk membantu mengelola kawasan wana wisata agar selain menambah lapangan pekerjaan dan penghasilan masyarakat, juga dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat akan potensi wisata.

Perbedaan hasil estimasi retribusi yang cukup tinggi tersebut disebabkan oleh akses jalan yang sulit, amat terjal, dan tidak dapat dilalui kendaraan roda empat yang mengakibatkan sedikitnya wisatawan yang berkunjung karena faktor keselamatan, kenyamanan dan keamanan di jalan.

Dari analisa Nilai/Pajak Laut diketahui bahwa untuk komponen tersebut sudah tertib administrasi kelautan karena sebagian besar pendapatan retribusi diserahkan kepada Disbudpar (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata) atas nama Pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan pembagian hasil retribusi terdapat dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan yang disebutkan dalam subbab 4.1.1.

4.1.4.2 Estimasi Retribusi untuk Pemerintah Kabupaten dari Kegiatan Wisata Bahari

Pada hasil penelitian untuk pendapatan daerah yang berupa retribusi dari adanya kegiatan wisata bahari tahun 2019, maka Pemerintah Kabupaten memperoleh penerimaan daerah yaitu berupa retribusi. Estimasi retribusi atau perkiraan penghasilan keuangan daerah yang apabila semua wisata tersebut dikelola oleh satu (1) pihak yakni Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atas nama Pemerintah Kabupaten Tulungagung sebagai pihak kedua dengan perhitungan sebagai berikut adalah sebesar:

Estimasi retribusi = Tingkat Penggunaan Jasa \times Tarif Retribusi

Tingkat penggunaan jasa diukur dengan rata-rata jumlah harga tiket masuk dan tarif retribusi diukur dengan nilai rupiah pada harga tiket masuk.

Dari Tabel 4.6 dapat dilihat besar estimasi retribusi keseluruhan adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Estimasi Retribusi

Nama Wisata Bahari	B	Ax4x12	X= A \times B
		(Rp)	\times 1.000 (Rp)
P. Popoh	115.200	432.000	1.036.800
P. Sidem	12.000	432.000	108.000
P. Sine	530.880	480.000	5.308.800
P. Kedung Tumpang	96.000	432.000	864.000
P. Dlodo (Pucanglaban)	9.600	360.000	72.000
P. Gemah	432.000	300.000	2.700.000
P. Sanggar	4.800	360.000	36.000
P. Ngalur	4.800	360.000	36.000
P. Dlodo Kalidawir	2.400	240.000	12.000
P. Coro	4.800	360.000	36.000
P. Brumbun	2.400	120.000	6.000
P. Gerangan	2.400	120.000	6.000
Jumlah	1.217.280	3.996.000	10.221.600

Keterangan:

A: Rata-rata harga tiket perminggu

B: Rata-rata jumlah pengunjung pertahun

X: Rata-rata Estimasi Retribusi/tahun

Tabel 4.7 berikut ini akan menampilkan besar estimasi retribusi yang diterima PemKab sebagai pihak ke 2 dengan bagi hasil sebesar 20% pertahun adalah sebesar:

Tabel 4. 7 Estimasi Retribusi untuk PemKab

Nama Wisata Bahari	20%*X (Rp)
P. Popoh	207.360.000
P. Sidem	21.600.000
P. Sine	1.061.760.000
P. Kedung Tumpang	172.800.000
P. Dlodo (Pucanglaban)	14.400.000
P. Gemah	540.000.000
P. Sanggar	7.200.000
P. Ngalur	7.200.000
Jumlah	2.032.320.000

Tabel 4.8 berikut ini akan menampilkan besar estimasi retribusi yang apabila ke 4 wisata dikelola oleh PemKab dengan bagi hasil sebesar 20% pertahun adalah sebesar:

Tabel 4. 8 Estimasi Retribusi untuk Pemkab dari pengelola lain

Nama Wisata Bahari	20%*X (Rp)
P. Dlodo Kalidawir	2.400.000
P. Coro	7.200.000
P. Brumbun	1.200.000
P. Gerangan	1.200.000
Jumlah	12.000.000

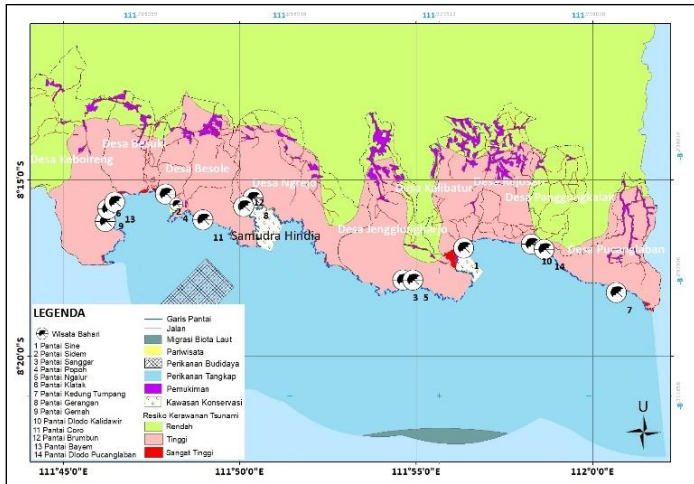
Tabel 4.7 menampilkan besar retribusi untuk pihak kedua dengan total Rp. 2.032.320.000 pertahun. Dan dari Tabel 4.8 menunjukkan besar estimasi retribusi apabila empat (4) lokasi wisata yang dikelola oleh selain Pemkab diambil alih dan dikelola oleh Pemkab, maka menghasilkan tambahan estimasi retribusi sebesar Rp.12.000.000,00 pertahun.

Peta estimasi retribusi tiket masuk wisata bahari akan ditampilkan pada Lampiran 4.

4.2 Resiko Bencana Tsunami di Lokasi Wisata Bahari

Pada hasil penelitian resiko bencana tsunami di lokasi wisata bahari adalah sebagai berikut:

Seperti yang terlihat pada gambar 4.8 dibawah ini, lokasi wisata bahari berada dalam zona kerawanan tsunami dengan tingkat resiko tinggi hingga sangat tinggi. Berikut tampilan kawasan resiko bencana tsunami di lokasi wisata bahari:



Gambar 4. 8 Resiko Bencana Tsunami Di Lokasi Wisata Bahari

Tabel 4.9 berikut ini akan menampilkan luas daerah di setiap desa yang terdapat lokasi wisata yang wilayahnya memiliki resiko terkena bencana tsunami dengan tingkat resiko sangat tinggi.

Tabel 4. 9 Luas Daerah di Desa Pesisir

No.	Nama Desa di Pesisir	Nama Wisata Bahari	Luas Daerah Beresiko Tsunami (Ha)
1.	Keboireng	- Pantai Gemah - Pantai Klatak - Pantai Bayem	22,209
2.	Besuki	-	16,298
3.	Besole	- Pantai Popoh - Pantai Sidem - Pantai Coro	55,536

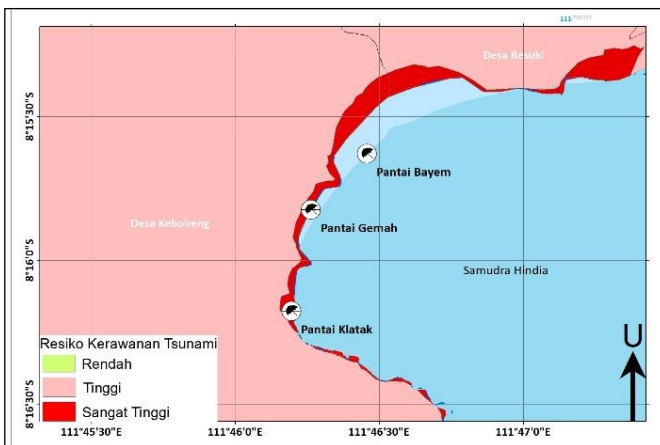
Lanjutan Tabel 4.9

No.	Nama Desa di Pesisir	Nama Wisata Bahari	Luas Daerah Beresiko Tsunami (Ha)
4.	Ngrejo	- Pantai Brumbun - Pantai Gerangan	40,587
5.	Jengglunharjo	- Pantai Sanggar - Pantai Ngalur	32,713
6.	Kalibatur	Pantai Sine	38,687
7.	Rejosari	Pantai Dlodo Kalidawir	22,365
8.	Panggungkalak	Pantai Dlodo Pucanglaban	7,944
9.	Pucanglaban	Pantai Kedung Tumpang	25,003

Dari Tabel 4.9 dapat diketahui bahwa dari luas daerah yang beresiko bencana tsunami, lokasi wisata bahari yang memiliki resiko sangat tinggi terkait adanya bencana tsunami tersebut adalah di Desa Besole, diikuti Desa Ngrejo dan Desa Kalibatur.

Dibawah ini merupakan rincian masing-masing desa di kawasan pesisir dengan rincian sebagai berikut:

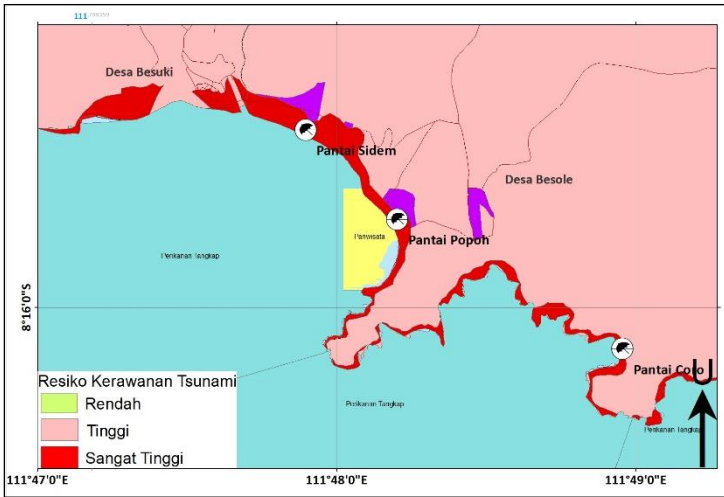
a. Desa Keboireng



Gambar 4. 9 Resiko Bencana Tsunami di Lokasi Wisata Bahari Desa Keboireng

Dari Gambar 4.9 tersebut dapat diketahui bahwa lokasi wisata yang memiliki resiko bencana tsunami dengan tingkat sangat tinggi adalah di Pantai Klatak, Pantai Gemah, Pantai Bayem. Ketiga pantai tersebut berada di Desa Keboireng Kec. Besuki.

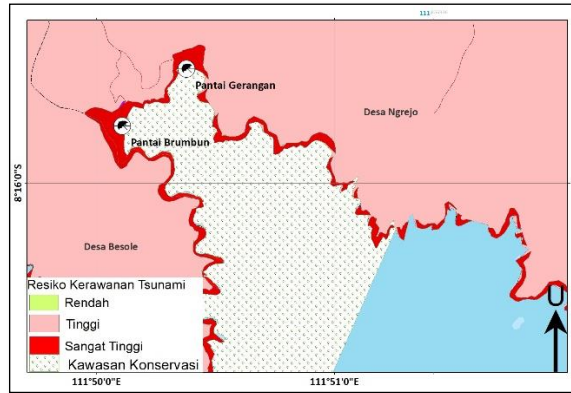
b. Desa Besole



Gambar 4. 10 Resiko Bencana Tsunami di Lokasi Wisata Bahari Desa Besole

Dari Gambar 4.10 tersebut dapat dilihat bahwa lokasi wisata yang memiliki resiko bencana tsunami dengan tingkat sangat tinggi adalah di Pantai Sidem, Pantai Popoh, dan Pantai Coro. Ketiga Pantai tersebut berada di Desa Besole Kec. Besuki yang wilayah wisata tersebut juga berada di sekitar pemukiman nelayan.

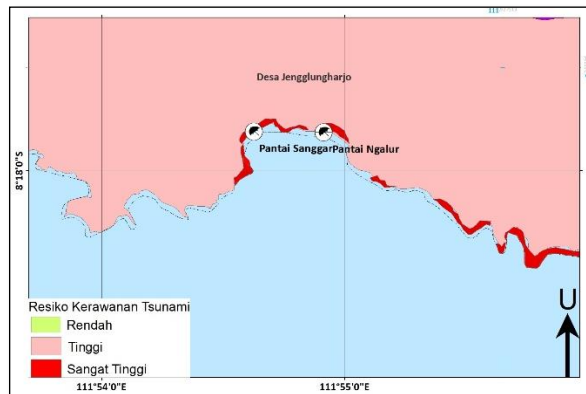
c. Desa Ngrejo



Gambar 4. 11 Resiko Bencana Tsunami di Lokasi Wisata Bahari
Desa Ngrejo

Dari Gambar 4.11 tersebut dapat dilihat bahwa lokasi wisata yang memiliki resiko bencana tsunami dengan tingkat sangat tinggi adalah di Pantai Brumbun dan Pantai Gerangan. Ketiga Pantai tersebut berada di Desa Ngrejo Kec. Tanggunggunung.

d. Desa Jengglunharjo



Gambar 4. 12 Resiko Bencana Tsunami di Lokasi Wisata Bahari
Desa Jengglunharjo

Dari Gambar 4.12 tersebut dapat dilihat bahwa lokasi wisata yang memiliki resiko bencana tsunami dengan tingkat sangat tinggi adalah di Pantai Sanggar dan Pantai Ngalur. Kedua Pantai tersebut berada di Desa Jengglunharjo Kec. Tanggunggunung.

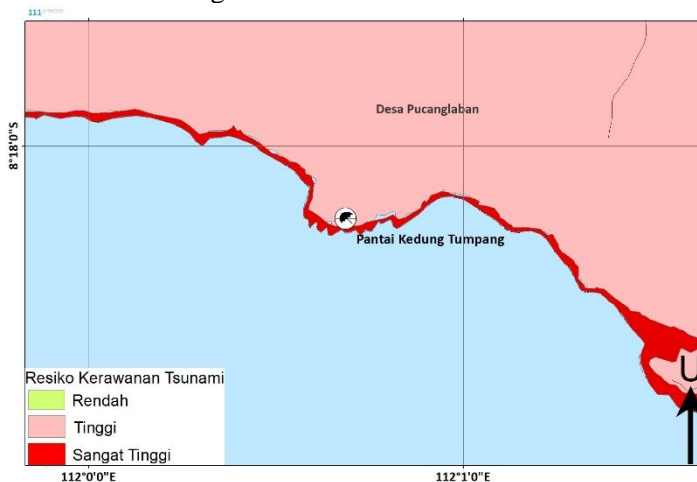
e. Desa Kalibatur, Desa Rejosari, Desa Panggungkalak



Gambar 4. 13 Resiko Bencana Tsunami di Lokasi Wisata Bahari Desa Kalibatur, Desa Rejosari, Desa Panggungkalak

Dari Gambar 4.13 tersebut dapat dilihat bahwa lokasi wisata yang memiliki resiko bencana tsunami dengan tingkat sangat tinggi adalah di Pantai Sine Desa Kalibatur Kec. Kalidawir; Pantai Dodo Desa Rejosari Kec. Kalidawir; dan Pantai Dodo Pucanglaban Kec. Pucanglaban.

f. Desa Pucanglaban



Gambar 4. 14 Resiko Bencana Tsunami di Lokasi Wisata Bahari Desa Pucanglaban

Dari Gambar 4.14 tersebut dapat dilihat bahwa lokasi wisata yang memiliki resiko bencana tsunami dengan tingkat sangat tinggi adalah di Pantai Kedung Tumpang Desa dan Kec. Pucanglaban.

Dari 14 lokasi wisata bahari yang di dapat dari survei lapangan maupun dari dokumen, semuanya terindikasi berada dalam zona resiko kerawanan tsunami dengan tingkat resiko sangat tinggi yang ditunjukkan dengan warna merah. Untuk daerah diluar kawasan wisata terindikasi berada dalam zona resiko rawan tsunami dengan tingkat resiko tinggi yang ditunjukkan dengan warna merah muda. Serta untuk warna hijau merupakan daerah yang rendah terhadap resiko rawan tsunami. Pantai-pantai tersebut berada dalam kawasan yang beresiko sangat tinggi akan adanya bencana tsunami karena semua wilayahnya menghadap langsung ke arah Samudra Hindia.

Peta resiko bencana tsunami di lokasi wisata bahari akan ditampilkan pada Lampiran 7.

“Halaman ini sengaja di kosongkan”

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai upaya tertib administrasi kelautan, empat (4) komponen administrasi kelautan adalah sebagai berikut:
 - a. Menurut penguasaan laut (*marine tenure*)
Pengelola wisata bahari di Kabupaten Tulungagung di pegang oleh 3 pihak, yaitu Pihak Pertama Perhutani yaitu sebagai pemilik lahan dengan menerima bagi hasil sebesar 30%, pihak kedua pemerintah menerima bagi hasil sebesar 20%, dan pihak ketiga masyarakat lokal menerima bagi hasil sebesar 50%.
 - b. Menurut pemanfaatan laut (*marine use*)
Pemanfaatan ruang laut dan pesisir di Kabupaten Tulungagung selain digunakan untuk pariwisata juga digunakan untuk pemanfaatan lain seperti: kawasan konservasi, kawasan perikanan tangkap, kawasan perikanan budidaya, kawasan migrasi biota laut, dan Pelabuhan Penangkapan Ikan.
 - c. Menurut pengembangan kelautan (*marine development*)
 - Menurut dokumen RZWP-3-K Jawa Timur Tahun 2016, pemanfaatan di wilayah ruang laut untuk wisata bahari hanya terdapat di Desa Besuki, yaitu Pantai Popoh.
 - Menurut dokumen RTRW Kabupaten Tulungagung tahun 2012-2032 Skala 1:200.000 tidak terdapat perencanaan wilayah pesisir ataupun ruang laut yang akan digunakan sebagai lokasi wisata bahari. Namun, kawasan pariwisata tersebut terdapat dalam Ripparda (Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata) Kabupaten Tulungagung.

- Menurut kondisi eksisting, lokasi wisata bahari saat ini seluruhnya sesuai dengan perencanaan pada dokumen Ripparda dalam Peta KSP (Kawasan Strategis Pariwisata).
- d. Menurut nilai/ pajak kelautan (*marine tax/value*)
 - Estimasi retribusi yang diterima pihak kedua yaitu Pemerintah Kabupaten Tulungagung dari 10 wisata bahari adalah sebesar Rp. 2.032.320.000,00 pertahun. Sedangkan apabila 4 lokasi wisata yang dikelola oleh selain Pemkab diambil alih oleh Pemkab menghasilkan tambahan estimasi retribusi sebesar Rp. 12.000.000,00 pertahun.
- 2. Semua lokasi wisata bahari terindikasi berada dalam zona resiko kerawanan tsunami, lokasi yang paling beresiko berada di Desa Besole, Desa Ngrejo dan Desa Kalibatur dengan tingkat resiko sangat tinggi sesuai dengan Peta Resiko Tsunami Tahun 2015 Skala 1:45.000 dari BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Tulungagung.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan proses dan hasil penelitian meliputi aspek penerapan dan aspek pengembangan adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan suatu kajian tentang pengelolaan pemanfaatan ruang laut dan pesisir, agar sesuai tertib administrasi kelautan sehingga memudahkan pembaharuan data.
2. Diperlukan kajian mengenai perencanaan lokasi wisata pada dokumen RTRW agar daerah wisata sesuai dengan perencanaan ruang wilayah dan supaya sesuai dengan pemanfaatan wilayah yang lain.
3. Diperlukan pembaharuan data pada dokumen RZWP-3-K agar dapat diketahui pemanfaatan ruang laut dan pesisir terbaru, sehingga pemanfaatannya tidak menyimpang dari dokumen yang sudah direncanakan.

4. Diperlukan pembangunan jalan menuju lokasi wisata bahari agar semakin banyak pengunjung dan penghasilan retribusi meningkat.
5. Untuk penelitian selanjutnya dapat membahas jalur evakuasi di pesisir apabila di lokasi wisata bahari terjadi bencana tsunami, sehingga akan meminimalisir korban dan kerugian.

“Halaman ini sengaja di kosongkan”

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2001. "Naskah Akademik Pengelolaan Wilayah Pesisir Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan". Jakarta
- Astor, Y., Sulasdi, W. N., Hendriatiningsih, & Wisayantono, D. 2014. "Konstruksi Integrasi Unsur-unsur Pemanfaatan Laut Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Kadaster Kelautan". Bandung: Politeknik Negeri Bandung.
- Astor, Yackob. 2016. "Membangun Kadaster Kelautan untuk Mewujudkan Pemerintahan di Laut". Bandung: Politeknik Negeri Bandung.
- Astuti, Resti Y., Yanto Budisusanto, Danar G.P., dan Muhandis Sidqi. 2017. "Analisa Kesesuaian RZWP-3-K dengan Eksisting Penggunaan Ruang Laut Berdasarkan UU. No. 1 tahun 2014 dan Permen-KP No. 23 Tahun 2016". Surabaya: Teknik Geomatika ITS.
- Binns, A. 2004. *"Defining a Marine Cadastre: Legal and Institutional Aspects, Masters Thesis"*. The University of Melbourne.
- BPN-RI dan LPPM-ITB. 2000. "Objek – Objek Kadaster Kelautan". 6–24.
- Collier, P. A., Leahy, F. J., and Williamson, I. P. 2001. *"Defining a Marine Cadastre for Australia. Proceedings of the 42nd Australian Surveyors Congress"*. October 2015, 1–10.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2018. "Retribusi Daerah". Jakarta.
- Djunarsjah, Eka. 2007. "Catatan Kuliah GD-3121 Hidrografi I". Bandung: Penerbit ITB.
- Hanna, S., Folke, C., and Maler, K G. 1996. *"Rights to Nature: Ecological, Economic, Cultural, and Political Principles of Institution for The Environment"*. USA: Island Press.
- Kementrian Kelautan dan Perikanan. 2013. "Pedoman Teknis Penyusunan RZWP-3-K Provinsi". Jakarta.

- Kusumastanto. T. 2002. "Reposisi "*Ocean Policy*" dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia di Era Otonomi Daerah". Bogor: IPB.
- Maulana, S., Astor, Y., & Supriyadi, D. 2016. "Membangun Peta Kadaster Kelautan Dalam Perspektif UU RI No . 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial (Wilayah Studi: Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat)". Institut Teknologi Nasional, Bandung.
- Nikijuluw. 2002. "Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan. Kerjasama P3R dengan PT Pustaka Cidesindo". Jakarta.
- PCGIAP-WG3. 2004. "*Report on the International Workshop on Administering the Marine Environment – the Spatial Dimensions*". Kuala Lumpur.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung. 2012. "Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2032". Jakarta.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung. 2016. "Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Usaha". Jakarta.
- Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. 2018. "Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038". Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1945. "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1". Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1945. "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18". Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1945. "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 25". Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2000. "UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah". Jakarta.

- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. "Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil". Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1996. "Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia'. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. "Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah". Jakarta.
- Pramudji. 2002. "Pengelolaan Kawasan Pesisir Dalam Upaya Pengembangan Wisata Bahari Oleh Pramudji". XXVII(1), 27–35.
- Purwaningdyah, dan Wahyudi, A. 2017. "Administrasi Pertanahan". 518.
- Raharjo, T. S. 2002. "Taman Wisata Bahari di Gili Trawangan, Lombok Sebagai perwujudan pendekatan Arsitektur Organik pada Tata ruang luar dan Penampilan bangunan". Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Rajabifard, A., Binns, A., & Williamson, I. 2005. "Administering the marine environment—the spatial dimension". *Journal of Spatial Science*, 50(2), 69–78.
- Sari, N. I. K. 2013. "Peranan Retribusi Obyek Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik (Studi Kasus Pada Wisata Religi Makam Sunan Giri di Kabupaten Gresik)". Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Tamtomo, J. P. 2006. "Analisis Kebijakan Pemanfaatan Ruang Pesisir Dan Laut Dalam Kerangka “*Marine Cadastre*” Thesis". IPB.

“Halaman ini sengaja di kosongkan”

LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Karakteristik Wisata


Nama Wisata Bahari: Pantai Popoh

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Tulungagung

Informasi Umum	
Lokasi	Desa Besole, Kecamatan Besuki
Koordinat	-8.2617701, 111.8033
Jenis Objek	Wisata Alam
Deskripsi Objek	Pantai popoh memiliki pemandangan pantai dengan latar belakang perbukitan yang indah. Selain itu, pantai popoh dilengkapi dengan sarana penginapan, pasar ikan, wisata bahari dan beberapa tempat yang nyaman untuk memancing. Setiap bulan Suro (Muharam) diselenggarakan Upacara “Larung Semboyo”.
Status Pengembangan	Sudah dikembangkan
Daya Tarik	
Daya Tarik Utama	Pantai
Daya tarik penunjang	Labuhan Semboyo Ritual labuhan semboyo dilaksanakan saat malam Suro (bulan Muharam). Prosesi ritual dimulai dengan mempersiapkan berbagai sesaji yang siap dihanyutkan ke laut sebagai tolak balak doa selamat. Setelah segala sesaji dipersiapkan, selanjutnya diadakan doa bersama atau selamatan dengan berbagai makanan, kemudian setelah doa selesai makanan yang ada tersebut menjadi rebutan warga,

	<p>karena dipercaya bisa membawa berkah. Setelah semua prosesi selesai dilaksanakan, giliran sesaji di larung ke tengah laut.</p> <p>Paleraman Nyai Roro Kidul</p> <p>Di lokasi ini, banyak wisatawan yang datang untuk mengenal kisah nyai roro kidul. Beberapa wisatawan yang memiliki kepercayaan khusus juga datang untuk mencari berkah di hari-hari tertentu, seperti malam 1 suro.</p>
Catatan terkait daya tarik	Pantai Popoh memiliki gedung untuk pertunjukan kesenian
Nilai Sumberdaya	
Ketersediaan ruang terbuka yang alami	Masih tersedia ruang terbuka di pantai popoh.
Nilai atraksi (variasi daya tarik)	Aktivitas nelayan
Nilai keunikan	Ritual satu suro (Labuhan Semboyo)
Tingkat ketersediaan atraksi	Tersedia lokasi aula panggung hiburan, tempat makan dan bale di kompleks bangunan di pinggir bagian utara pantai popoh. Keberadaan kapal nelayan dan aktivitas perdagangan nelayan di sisi timur pantai.
Nilai kelangkaan	Pantai popoh merupakan pantai utama yang di tulungagung yang sudah dikembangkan sejak tahun 1990an.
Aksesibilitas	
Kualitas jalan menuju objek	Jalan utama sudah di aspal dan dapat dilalui kendaraan roda empat (bus, mobil pribadi).
Kualitas jalan di dalam objek	Jalan di dalam objek sudah di aspal.

Kualitas jalan ke objek lain	Jalan menuju objek wisata lain sudah di aspal.	
Ketersediaan moda transportasi	Tersedia transportasi umum.	
Kemudahan pencapaian (waktu tempuh dan ketersediaan rambu-rambu petunjuk arah)	Masih minimnya papan petunjuk arah dari pusat kota Tulungagung.	
Kendala/ permasalahann/ catatan	Kealamian pantai terganggu karena adanya pelabuhan nelayan di dekat area pantai.	
Sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none"> - Jalan - Telepon/hp - Toko cinderamata - Penginapan - Tempat sampah - Listrik 	<ul style="list-style-type: none"> - Toilet/wc - Panggung hiburan - Air bersih - Parkiran - Warung
Aspek Pasar		
Besarnya jumlah wisatawan (lokal, nusantara, dan mancanegara) yang datang ke objek	Sekitar 115.200 orang/ tahun	
Skala jangkauan pemasaran	Wisatawan mancanegara dan domestik.	
Tiket Masuk	Rp 8.000,00 – Rp 10.000,00 per orang	
Investasi		
Investasi yang telah ada di lokasi objek wisata	Sudah ada	
Stakeholders yang berperan dalam investasi	Sudah ada	

Stakeholders yaitu berkaitan dengan struktur bagi hasil dalam pengelolaan objek	Perhutani, Pemkab (Disbudpar), Bumdes (Pokdarwis)
Kelembagaan	
Pengelolaan objek saat ini	Perhutani, Pemkab (Disbudpar), Bumdes (Pokdarwis)
Ketersediaan struktur lembaga pengelola	Sudah tersedia
Aspirasi masyarakat sekitar objek	Kealamian pantai terus dijaga
Permasalahan	
Permasalahan mendasar yang perlu diperhatikan dan perlu segera ditangani	Kebersihan
Permasalahan jangka panjang yang mungkin muncul	Kenyamanan lokasi pantai
Catatan Tambahan	
Kepemilikan Tanah	Milik Perhutani
Luas wisata	Panjang pantai 722m, garis pantai ke darat 100m
Dokumentasi	
	
Lokasi Pantai Popoh dekat dengan Pantai Sidem dan Pantai Coro (sumber: Google Maps)	



Pendopo Popoh



Larung Semboyo



Palereman Nyai Roro Kidul



Nama Wisata Bahari: Pantai Sidem

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Tulungagung

Informasi Umum	
Lokasi	Desa Besole, Kecamatan Besuki
Koordinat	-8.256787, 111.798268
Jenis Objek	Wisata alam
Deskripsi Objek	Pantai Sidem terletak tidak jauh dari pantai popoh. Pantai Sidem memiliki karakter pasir pantai berwarna hitam dengan pohon cemara laut di sekitarnya. Di pantai ini wisatawan dapat menikmati sunset di sore hari dengan pemandangan berlatar perbukitan. Di pantai sidem juga tersedia toko cinderamata dan warung makan dengan menu ikan segar.
Status Pengembangan	Sudah dikembangkan
Daya Tarik	
Daya Tarik Utama	Pantai
Daya tarik penunjang	Sunset dan trail pantai
Catatan terkait daya tarik	-
Nilai Sumberdaya	
Ketersediaan ruang terbuka yang alami	Masih tersedia ruang terbuka di pantai sidem.
Nilai atraksi (variasi daya tarik)	Pantai, matahari tenggelam, dan kuliner ikan segar.
Nilai keunikan	Pemandangan perbukitan.
Tingkat ketersediaan atraksi	Trail pantai
Nilai kelangkaan	-

Aksesibilitas											
Kualitas jalan menuju objek	Jalan menuju objek sudah beraspal dan dapat dilalui kendaraan roda empat (bus, mobil).										
Kualitas jalan di dalam objek	Kualitas jalan di dalam objek sudah beraspal.										
Kualitas jalan ke objek lain	Jalan menuju objek wisata sekitar sudah beraspal dan terdapat beberapa petunjuk arah.										
Ketersediaan moda transportasi	Tersedia transportasi menuju Pantai Sidem										
Kemudahan pencapaian (waktu tempuh dan ketersediaan rambu-rambu petunjuk arah)	Dari pusat kota masih minimnya petunjuk arah.										
Kendala/permasalahann/catatan	Lokasi ini berdekatan dengan kampung nelayan, PLTA dan terutama Pantai Popoh yang sudah terkenal di Kabupaten Tulungagung.										
Sarana dan prasarana	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>- Jalan</td> <td>- Tempat sampah</td> </tr> <tr> <td>- Telepon/hp</td> <td>- Toilet/wc</td> </tr> <tr> <td>- Toko cinderamata</td> <td>- Air bersih</td> </tr> <tr> <td>- Penginapan</td> <td>- Parkiran</td> </tr> <tr> <td>- Listrik</td> <td>- Warung</td> </tr> </tbody> </table>	- Jalan	- Tempat sampah	- Telepon/hp	- Toilet/wc	- Toko cinderamata	- Air bersih	- Penginapan	- Parkiran	- Listrik	- Warung
- Jalan	- Tempat sampah										
- Telepon/hp	- Toilet/wc										
- Toko cinderamata	- Air bersih										
- Penginapan	- Parkiran										
- Listrik	- Warung										
Aspek Pasar											
Besarnya jumlah wisatawan (lokal, nusantara, dan mancanegara) yang datang ke objek	Sekitar 12.000 orang/tahun										

Skala jangkauan pemasaran	Wisatawan mancanegara dan domestik
Tiket Masuk	Rp 8.000,00 – Rp 10.000,00 per orang (jadi satu dengan Pantai Popoh)
Investasi	
Investasi yang telah ada di lokasi objek wisata	Belum ada
Stakeholders yang berperan dalam investasi	Belum ada
Stakeholders yaitu berkaitan dengan struktur bagi hasil dalam pengelolaan objek	Perhutani, Pemkab (Disbudpar), Bumdes (Pokdarwis)
Kelembagaan	
Pengelolaan objek saat ini	Perhutani, Pemkab (Disbudpar), Bumdes (Pokdarwis)
Ketersediaan struktur lembaga pengelola	Belum tersedia
Aspirasi masyarakat sekitar objek	Pantai sidem tetap dipertahankan kealamiannya agar memiliki ciri khas sendiri dari pantai-pantai di sekitarnya.
Permasalahan	
Permasalahan mendasar yang perlu diperhatikan dan perlu segera ditangani	Kebersihan.

Permasalahan jangka panjang yang mungkin muncul	Kerusakan lingkungan (kebersihan).
Catatan Tambahan	
Kepemilikan Tanah	Milik Perhutani
Luas wisata	Panjang pantai 730m, garis pantai ke darat 100m
Dokumentasi	
	
Lokasi Pantai Sidem dekat dengan Pantai Popoh dan Pantai Coro (sumber: Google Maps)	
	
Pantai Sidem	



Nama Wisata Bahari: Pantai Sine

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Tulungagung

Informasi Umum	
Lokasi	Desa Kalibatur, Kalidawir
Koordinat	-8.282311, 111.939107
Jenis Objek	Wisata alam
Deskripsi Objek	Pantai sine memiliki karakter pasir pantai berwarna hitam yang tidak lengket. Di pantai ini juga banyak dijumpai perahu-perahu nelayan yang telah menetap di kawasan pantai sine. Terdapat banyak pohon cemara yang dapat digunakan pengunjung untuk berteduh.
Status Pengembangan	Sudah dikembangkan
Daya Tarik	
Daya Tarik Utama	Pantai
Daya tarik penunjang	Kuliner ikan dan laguna yang menghubungkan antara Pantai Sine dengan Pantai Sanggar, dapat digunakan untuk berenang, snorkling. Dapat menyewa perahu untuk berkeliling di laut.
Catatan terkait daya tarik	Rawan terjadi tsunami.
Nilai Sumberdaya	
Ketersediaan ruang terbuka yang alami	Masih tersedia
Nilai atraksi (variasi daya tarik)	Pantai, dan kuliner ikan segar
Nilai keunikan	Pemandangan perbukitan dan Samudra Hindia karena pantai menghadap ke tenggara.

Tingkat ketersediaan atraksi	Trail pantai, ATV, fotografi	
Nilai kelangkaan	Terdapat banyak pohon cemara atau biasa disebut dengan cemoro sewu.	
Aksesibilitas		
Kualitas jalan menuju objek	Jalan utama menuju Pantai Sine sudah beraspal dan dapat dilalui kendaraan roda empat (bus, mobil).	
Kualitas jalan di dalam objek	Kualitas jalan di dalam objek sudah beraspal	
Kualitas jalan ke objek lain	Untuk menuju pantai sanggar hanya dapat menggunakan kendaraan roda dua. Terdapat alternatif jasa ojek yang mengantar wisatawan dari Pantai Sine menuju Pantai Sanggar.	
Ketersediaan moda transportasi	Tersedia transportasi dari pantai sine menuju pantai dlodo dengan menyewa kendaraan Jib dengan membayar 600-700 ribu per kendaraan per sekali sewa, dan untuk ATV 70-100 ribu perjam perkendaraan.	
Kemudahan pencapaian (waktu tempuh dan ketersediaan rambu-rambu petunjuk arah)	Sudah tersedia rambu-rambu petunjuk jalan namun belum banyak.	
Kendala/ permasalahann/ catatan	Kampung nelayan yang kumuh dan tidak tertata, pantai kotor di beberapa titik.	
Sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none"> - Jalan - Telepon/hp - Toko cinderamata - Penginapan - Tempat sampah 	<ul style="list-style-type: none"> - Listrik - Toilet/wc - Air bersih - Parkiran - Warung

Aspek Pasar	
Besarnya jumlah wisatawan (lokal, nusantara, dan mancanegara) yang datang ke objek	Sekitar 530.880 orang/tahun
Skala jangkauan pemasaran	Wisatawan mancanegara dan domestik.
Tiket Masuk	Rp 5.000,00 – Rp 15.000,00 per orang
Investasi	
Investasi yang telah ada di lokasi objek wisata	Belum ada
Stakeholders yang berperan dalam investasi	Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pengadaan tempat pengepulan ikan.
Stakeholders yaitu berkaitan dengan struktur bagi hasil dalam pengelolaan objek	Perhutani, Pemkab (Pokdarwis), Bumdes (Pokdarwis)
Kelembagaan	
Pengelolaan objek saat ini	Perhutani, Pemkab (Pokdarwis), Bumdes (Pokdarwis)
Ketersediaan struktur lembaga pengelola	Sudah tersedia
Aspirasi masyarakat sekitar objek	Keamanan dan kealamian pantai
Permasalahan	
Permasalahan mendasar yang perlu diperhatikan dan perlu segera ditangani	Penataan rumah-rumah nelayan, kebersihan, tata ruang lansekap.

Permasalahan jangka panjang yang mungkin muncul	Kebersihan, sampah
Catatan Tambahan	
Kepemilikan Tanah	Milik Perhutani
Luas wisata	Panjang pantai 1750m, garis pantai ke darat 150m
Dokumentasi	
	
Lokasi Pantai Sine (sumber: Google Maps)	
	
Akses jalan menuju pantai	



Pantai Sine



Pohon cemoro sewu (cemara seribu) dan warung di bawah cemoro sewu di pesisir


Nama Wisata Bahari: Pantai Kedung Tumpang

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Tulungagung

Informasi Umum	
Lokasi	Desa Pucanglaban, Kecamatan Pucanglaban
Koordinat	-8.303226, 112.011435
Jenis Objek	Wisata Alam
Deskripsi Objek	Pantai Kedung Tumpang mulai di buka pada libur lebaran Hari Raya Idul Fitri 2015. Pantai Kedung Tumpang memiliki keunikan karena beberapa kolam alami yang terbentuk dari cipratan ombak. Di kolam alami ini wisatawan dapat melakukan <i>snorkling</i> . Selain kolam alami, di Pantai Kedung Tumpang juga terdapat air terjun.
Status Pengembangan	Belum dikembangkan
	Daya Tarik
Daya Tarik Utama	Pantai dengan kolam alami yang terbentuk melalui cipratan ombak.
Daya tarik penunjang	Air Terjun Jurug Wangi Air Terjun Jurug Wangi terletak tidak jauh dari Pantai Kedung Tumpang. Air terjun ini memiliki air yang terus mengalir meskipun di musim kemarau. Di sini biasanya wisatawan melakukan bilas setelah <i>snorkeling</i> di Pantai Kedung Tumpang.
Catatan terkait daya tarik	Diperlukan <i>trekking</i> kurang lebih 30 menit untuk mencapai Pantai Kedung Tumpang.

Nilai Sumberdaya	
Ketersediaan ruang terbuka yang alami	Masih tersedia ruang terbuka.
Nilai atraksi (variasi daya tarik)	Kolam alami berwarna hijau toska dan coklat, batu-batu karang, dan air terjun.
Nilai keunikan	Kolam alami yang dapat digunakan untuk <i>snorkeling</i> .
Tingkat ketersediaan atraksi	<i>Trekking</i> , <i>snorkeling</i> , dan aktivitas fotografi.
Nilai kelangkaan	Kolam alami yang terbentuk karena cipratan ombak.
Aksesibilitas	
Kualitas jalan menuju objek	Jalan utama menuju objek sudah beraspal dan dapat dilalui kendaraan roda empat (bus, mobil pribadi).
Kualitas jalan di dalam objek	Jalan di dalam objek belum beraspal. Wisatawan yang menggunakan mobil diwajibkan untuk berhenti di kantor parkir dan selanjutnya bisa menggunakan jasa ojek dengan membayar Rp. 10.000,00.
Kualitas jalan ke objek lain	Untuk menuju Pantai Lumbung dan sekitarnya masih sangat sulit karena jalur <i>trekking</i> belum dibuka.
Ketersediaan moda transportasi	Tersedia jasa ojek dari pintu masuk sampai tempat parkir, dari tempat parkir ke pantai ditempuh dengan jalan kaki.
Kemudahan pencapaian (waktu tempuh dan	Petunjuk jalan masih minim, jarak tempuh dari kantor parkir mobil menuju pantai kedung

ketersediaan rambu-rambu petunjuk arah)	tumpang adalah 4km, dengan jarak parkir motor ke pantai ditempuh 30 menit.								
Kendala/ permasalahann/ catatan	Tanah milik Perhutani								
Sarana dan prasarana	<table border="1"> <tr> <td>- Jalan</td> <td>- Toilet/wc</td> </tr> <tr> <td>- Telepon/hp</td> <td>- Parkiran</td> </tr> <tr> <td>- Tempat sampah</td> <td>- Warung</td> </tr> <tr> <td>- Listrik</td> <td></td> </tr> </table>	- Jalan	- Toilet/wc	- Telepon/hp	- Parkiran	- Tempat sampah	- Warung	- Listrik	
- Jalan	- Toilet/wc								
- Telepon/hp	- Parkiran								
- Tempat sampah	- Warung								
- Listrik									
Aspek Pasar									
Besarnya jumlah wisatawan (lokal, nusantara, dan mancanegara) yang datang ke objek	Sekitar 96.000 orang/tahun								
Skala jangkauan pemasaran	Wisatawan mancanegara dan domestik								
Tiket Masuk	Rp 5.000,00 – Rp 12.000,00 per orang								
Investasi									
Investasi yang telah ada di lokasi objek wisata	Belum ada								
Stakeholders yang berperan dalam investasi	Belum ada								
Stakeholders yaitu berkaitan dengan struktur bagi hasil dalam pengelolaan objek	Perhutani, Pemkab (Disbudpar), Bumdes (Pokdarwis)								
Kelembagaan									
Pengelolaan objek saat ini	Perhutani, Pemkab (Disbudpar), Bumdes (Pokdarwis)								

Ketersediaan struktur lembaga pengelola	Sudah terbentuk pokdarwis yang tergabung dari 3 desa di Kecamatan Pucanglaban.
Aspirasi masyarakat sekitar objek	Masyarakat ingin membangun fasilitas di Kedung Tumpang seperti warung makan, toilet, kantong parkir, serta sekretariat pokdarwis dan SAR. Selain itu masyarakat juga menginginkan pengembangan Air Terjun Jurug Wangi menjadi taman.
Permasalahan	
Permasalahan mendasar yang perlu diperhatikan dan perlu segera ditangani	Minimnya sarana prasarana, akses jalan menuju objek yang sulit dijangkau jalur trekking yang cukup berbahaya, faktor keamanan (saat air laut pasang).
Permasalahan jangka panjang yang mungkin muncul	Kerusakan lingkungan
Catatan Tambahan	
Kepemilikan Tanah	Milik Perhutani
Luas wisata	Panjang pantai 445m, garis pantai ke darat 200m
Dokumentasi	
 <p>Pantai Kedung Tumpang</p> <p>Kedung Lumpang Pantai Lumpang Pantai Maling</p> <p>Google</p>	
Lokasi Pantai Kedung Tumpang	



Pantai Kedung Tumpang



Akses jalan menuju pantai

Nama Wisata Bahari: Pantai Dlado (Pucanglaban)



Sumber: Suropto (Anggota Pokdarwis). Pada Minggu, 10 Maret 2019. Pukul 10.00 WIB

Informasi Umum	
Lokasi	Desa Panggungkalak, Kec. Pucanglaban
Koordinat	-8.282759, 111.977215
Jenis Objek	Wisata alam
Deskripsi Objek	<p>Dibuka pada tahun 2017 akhir, tahun 2018 awal terkena dampak gempa Lombok sehingga terjadi kenaikan gelombang ke darat sejauh 200 meter dan merusak tanaman yang baru saja dibangun. Pasir berwarna hitam dan putih, berada di 2 kecamatan: Kalidawir dan Pucanglaban. Bibir pantai yang panjang hingga 1500 meter, terdapat banyak pohon kelapa milik Dinas Perkebunan di sekitar jalan menuju objek dan terdapat sungai air tawar di luar bibir pantai. Ombak cenderung besar sehingga tidak dapat dimanfaatkan untuk berenang ataupun snorkling. Tidak terdapat nelayan karena ombak yang cenderung besar tersebut.</p>
Status Pengembangan	Belum
Daya Tarik	
Daya Tarik Utama	Pantai yang luas dan ombak yang besar

Daya tarik penunjang	Dekat dengan Pantai Sine dan Pantai Kedung Tumpang. Banyaknya pohon-pohon kelapa terlihat bagus untuk digunakan sebagai spot foto.
Catatan terkait daya tarik	Pohon kelapa milik Dinas Perkebunan yang di sewa perusahaan swasta.
Nilai Sumberdaya	
Ketersediaan ruang terbuka yang alami	Masih tersedia
Nilai atraksi (variasi daya tarik)	Kealamian pasir pantai yang tidak tercampur tanah.
Nilai keunikan	Bibir pantai paling panjang setelah Pantai Sine, ombak besar dan langsung menghadap ke Samudra Hindia karena pantai menghadap kearah selatan.
Tingkat ketersediaan atraksi	Aktivitas fotografi dan trail pantai, namun trail pantai hanya diadakan setiap satu bulan sekali karena wilayah Pucanglaban menggunakan sistem arisan dan yang menentukan kapan waktunya adalah Pokdarwis.
Nilai kelangkaan	Pasir yang belum tercampur tanah dan sungai air tawar di luar bibir pantai sekitar 10 meter.
Aksesibilitas	
Kualitas jalan menuju objek	Jalan utama sudah beraspal, dapat dilalui motor dan mobil.
Kualitas jalan di dalam objek	Beraspal tetapi rusak, setelah itu makadam, kemudian untuk naik untuk menuju ke pantai jalannya berupa jalan setapak.

Kualitas jalan ke objek lain	<p>Untuk menuju ke Pantai Sine terdapat jalan pintas sejauh 10km yang dapat ditempuh dengan waktu 30menit dengan kualitas jalan beraspal namun rusak dengan kanan kirinya masih terdapat banyak pohon jati, dan tidak ditemukan perumahan warga.</p> <p>Untuk menuju ke Pantai Kedung Tumpang sejauh 16,5km dengan waktu tempuh sekitar 45 menit.</p>	
Ketersediaan moda transportasi	Terdapat ojek untuk menuju ke Pantai Sine.	
Kemudahan pencapaian (waktu tempuh dan ketersediaan rambu-rambu petunjuk arah)	Terdapat banyak rambu-rambu petunjuk arah yang merupakan promosi dari hotel swasta.	
Kendala/ permasalahan/catatan	Pantai ini belum jelas kepemilikan tanahnya, karena dianggap milik perhutani tapi kerjasama dengan BUMDES. Pihak Pokdarwis Pantai Dlodo Pucanglaban sedang dalam proses pengajuan kejelasan kepemilikan agar segera dikelola dengan baik dan benar.	
Sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none"> - Jalan - Sinyal (telkomsel) - Tempat sampah - Warung 	<ul style="list-style-type: none"> - Air bersih - Parkiran (masih rusak terkena puting beliung) - Toilet/wc

Aspek Pasar	
Besarnya jumlah wisatawan nusantara, dan mancanegara) yang datang ke objek (lokal,	Sekitar 9.600 orang/tahun
Skala jangkauan pemasaran	Domestik
Tiket Masuk	Rp 5.000,00 – Rp 10.000,00 per orang
Investasi	
Investasi yang telah ada di lokasi objek wisata	Belum ada
Stakeholders yang berperan dalam investasi	Belum ada
Stakeholders yaitu berkaitan dengan struktur bagi hasil dalam pengelolaan objek	Perhutani, Pemkab (Disbudpar), Bumdes (Pokdarwis)
Kelembagaan	
Pengelolaan objek saat ini	Perhutani, Pemkab (Disbudpar), Bumdes (Pokdarwis)
Ketersediaan struktur lembaga pengelola	Tersedia
Aspirasi masyarakat sekitar objek	Pokdarwis ingin membangun penginapan, mushala dan listrik, serta menyediakan alat pengangkut sampah.
Permasalahan	
Permasalahan mendasar yang perlu diperhatikan dan perlu segera ditangani	Belum ada alat pengangkut sampah, kebersihan, akses jalan, dibutuhkan kesepakatan akses jalan menuju lokasi yang berbeda.

Permasalahan jangka panjang yang mungkin muncul	Kebersihan, keamanan.
Catatan Tambahan	
Kepemilikan Tanah	Milik Perhutani
Luas wisata	Panjang pantai 1000m, garis pantai ke darat
Dokumentasi	
	
Lokasi Pantai Dlado Pucanglaban satu garis pantai dengan Pantai Dlado Kalidawir (sumber: Google Maps)	
	
Sungai perbatasan Pantai Dlado Pucanglaban dengan Kalidawir	



Sungai di Pantai Dlodo Pucanglaban



Pantai Dlodo

Nama Wisata Bahari: Pantai Dlodo (Kalidawir)

Narasumber: Kayani (penjaga parkir). Pada hari Minggu, 10 Maret 2019). Pukul 12.10 WIB.

Informasi Umum	
Lokasi	Desa Rejosari, Kec. Kalidawir
Koordinat	-8.280324, 111.971134
Jenis Objek	Wisata alam
Deskripsi Objek	<p>Pasir berwarna hitam dan putih, berada di 2 kecamatan: Kalidawir dan Pucanglaban. Bibir pantai lebih pendek dari Pantai Dlodo Pucanglaban, terdapat banyak pohon kelapa milik Dinas Perkebunan di sekitar jalan menuju objek dan terdapat sungai air tawar di luar bibir pantai.</p> <p>Ombak cenderung besar sehingga tidak dapat dimanfaatkan untuk berenang ataupun snorkling. Tidak terdapat nelayan karena ombak yang cenderung besar tersebut. Pasir yang hitam mengandung besi sehingga apabila dijual bernilai tinggi.</p>
Status Pengembangan	Belum
Daya Tarik	
Daya Tarik Utama	Pantai yang luas, pasir berbukit, dan ombak yang besar.
Daya tarik penunjang	Dekat dengan Pantai Dlodo Pucanglaban, Pantai Sine dan Pantai Kedungtumpang.

	Banyaknya pohon-pohon kelapa terlihat bagus untuk digunakan sebagai spot foto.
Catatan terkait daya tarik	Pohon kelapa milik Dinas Perkebunan yang di sewa perusahaan swasta.
Nilai Sumberdaya	
Ketersediaan ruang terbuka yang alami	Masih tersedia
Nilai atraksi (variasi daya tarik)	Kealamian pasir pantai yang tidak tercampur tanah.
Nilai keunikan	Ombak besar dan langsung menghadap ke Samudra Hindia karena pantai menghadap kearah selatan.
Tingkat ketersediaan atraksi	Belum tersedia
Nilai kelangkaan	Pasir yang belum tercampur tanah dan sungai air tawar di luar bibir pantai sekitar 10meter.
Aksesibilitas	
Kualitas jalan menuju objek	Jalan utama sudah beraspal, dapat dilalui motor dan mobil.
Kualitas jalan di dalam objek	Beraspal rusak, setelah itu makadam kemudian turun untuk menuju ke pantai jalannya makadam dan berpasir.
Kualitas jalan ke objek lain	Untuk menuju ke Pantai Sine terdapat jalan pintas sejauh 10km yang dapat ditempuh dengan waktu 30menit dengan kualitas jalan beraspal namun rusak dengan kanan kirinya masih

	<p>terdapat banyak pohon jati, dan tidak ditemukan perumahan warga.</p> <p>Untuk menuju ke Pantai Kedung Tumpang sejauh 16,5km dengan waktu tempuh sekitar 45 menit.</p>	
Ketersediaan moda transportasi	Belum terdapat ojek untuk ke objek terdekat.	
Kemudahan pencapaian (waktu tempuh dan ketersediaan rambu-rambu petunjuk arah)	Terdapat banyak rambu-rambu petunjuk arah karena merupakan promosi dari hotel swasta, namun ketika sampai di simpang tiga, kearah kiri adalah ke wilayah Pucanglaban, dan ke kanan ke wilayah pantai Kalidawir, namun tidak ada petunjuknya.	
Kendala/ permasalahann/ catatan	Pantai Dlodo di Kecamatan Kalidawir belum dikembangkan karena jalan masih milik pemerintah Pucanglaban. Jalan untuk ke Pantai Dlodo Kalidawir masih menggunakan jalan diwilayah Pucanglaban sehingga petunjuk arah untuk ke Dlodo Kalidawir tidak diperbolehkan.	
Sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none"> - Jalan - Sinyal (telkomsel) - Tempat sampah - Warung (hari libur saja) - Mushala (masih darurat, terbuat dari bambu) 	<ul style="list-style-type: none"> - Toilet/wc (darurat) - Air bersih - Parkiran (masih rusak terkena puting beliung)

Aspek Pasar	
Besarnya jumlah wisatawan (lokal, nusantara, dan mancanegara) yang datang ke objek	Sekitar 2.400 orang/tahun
Skala jangkauan pemasaran	Domestik
Tiket Masuk	Rp 5.000,00 per orang
Investasi	
Investasi yang telah ada di lokasi objek wisata	Belum ada
Stakeholders yang berperan dalam investasi	Belum ada
Stakeholders yaitu berkaitan dengan struktur bagi hasil dalam pengelolaan objek	Perhutani, Bumdes, Masyarakat lokal
Kelembagaan	
Pengelolaan objek saat ini	Masyarakat lokal
Ketersediaan struktur lembaga pengelola	Belum tersedia
Aspirasi masyarakat sekitar objek	Pokdarwis ingin membangun penginapan, mushala yang lebih layak, listrik, menyediakan alat pengangkut sampah, serta menjaga pasir pantai agar tidak d curi.

Permasalahan	
Permasalahan mendasar yang perlu diperhatikan dan perlu ditangani segera	Belum ada alat pengangkut sampah, kebersihan, akses jalan, dibutuhkan kesepakatan akses jalan menuju lokasi yang berbeda.
Permasalahan jangka panjang yang mungkin muncul	Kebersihan, keamanan
Catatan Tambahan	
Kepemilikan Tanah	Milik Perhutani
Luas wisata	Panjang pantai 460m, garis pantai ke darat 150m
Dokumentasi	
 <p>Pantai Dlado Kalidawir</p>	
Lokasi Pantai Dlado Kalidawir satu garis pantai dengan Pantai Dlado Pucanglaban (sumber: Google Maps)	
	
Bukit Pasir Pantai Dlado	



Mushola



Toilet

Nama Wisata Bahari: Pantai Gemah, Pantai Klatak, Pantai Bayem

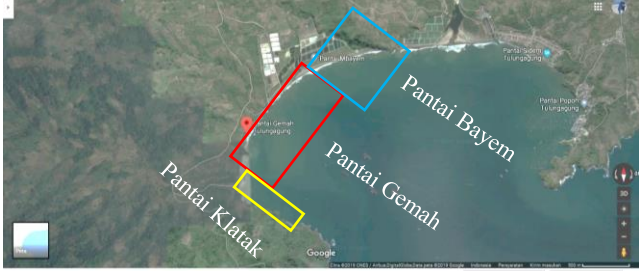
Sumber: Jumarli (Ketua Pokdarwis). Pada hari Senin, 11 Maret 2019. Pukul 13.00 WIB.

Informasi Umum	
Lokasi	Desa Keboireng, Kec. Besuki
Koordinat	-8.263720, 111.771041
Jenis Objek	Wisata alam
Deskripsi Objek	<p>Pantai dibuka pada 1 Januari 2017 dan diresmikan pada Juli 2017 dan adanya kerja sama dengan PKS (Perjanjian Kerja Sama). Pantai Gemah berada di pesisir selatan Tulungagung dengan arah pantainya menghadap ke timur. Lokasi tersebut berada di wilayah Desa Keboireng, Kecamatan Besuki. Sebelum Jalur Lintas Selatan (JLS) mulai dibangun, pantai ini termasuk salah satu tempat yang tersembunyi. Setelah adanya JLS, terbukalah tabir keindahan yang memiliki pesona alam indah tersebut.</p> <p>Karena lokasinya yang sangat berdekatan maka pengelolaannya bergabung dari 3 pantai dikelola oleh 1 Pokdarwis dari Desa Keboireng. Ketiga pantai tersebut diantaranya Pantai Gemah, Pantai Klatak, dan Pantai Bayem.</p>
Status Pengembangan	Belum
Daya Tarik	
Daya Tarik Utama	Pantai dan wahana rekreasi

Daya tarik penunjang	Dapat melihat matahari terbit, dekat dengan kawasan Pantai Bayem dan Klatak yang masih dalam 1 pengelolaan.	
Catatan terkait daya tarik	Wahana rekreasi berupa: - ATV - Perahu - Banana boat - Perahu donat	- <i>Flying fox</i> - <i>Mini trail</i> - Lokasi swafoto - Rumah apung - Kuliner hasil laut
Nilai Sumberdaya		
Ketersediaan ruang terbuka yang alami	Masih tersedia	
Nilai atraksi (variasi daya tarik)	<p>Bibir pantai yang panjang, luas, dan landai. Ombak tidak tinggi karena pantai menghadap ke timur, sehingga dapat digunakan untuk <i>snorkling</i>, berjemur, dan bermain di pasir. Namun untuk <i>snorkling</i>, pemandangan perairan hanya pasir sehingga tidak menarik wisatawan. Pesisir pantai yang luas dapat digunakan untuk berkeliling dengan menggunakan motor ATV dan mini trail.</p> <p>Terdapat acara tahunan setiap 1 Muharram, yakni acara Grebek Suro 1 Muharram, pada acara tersebut menampilkan berbagai</p>	

	macam kesenian daerah, tari-tarian seperti jaran, dll.
Nilai keunikan	Terdapat banyak wahana fasilitas rekreasi, dapat melihat matahari terbit. Pantai yang landai sehingga aman. Pantai menghadap ke timur dan ombak tidak terlalu tinggi. Tiket murah. Tempat parkir di bawah pohon cemara. Tiket murah.
Tingkat ketersediaan atraksi	Aktifitas fotografi, trakking, <i>flying fox</i> , ATV, <i>snorkling</i> .
Nilai kelangkaan	Bibir pantai sangat panjang dan pesisir yang luas serta terdapat rumah apung dengan jarak dari bibir pantai ke arah laut 200m.
Aksesibilitas	
Kualitas jalan menuju objek	Jalanan beraspal dan baru dibangun, yang merupakan Jalur Lintas Selatan. Dapat di lalui mobil dan bus.
Kualitas jalan di dalam objek	Paving dan tanah padat di wilayah pesisir.
Kualitas jalan ke objek lain	Lewat jalan beraspal, 5 menit ke Pantai Klatak dan jalan kaki ke Pantai Bayem 10 menit, serta lewat jalan beraspal 30 menit ke Pantai Coro, Pantai Popoh, dan Pantai Sidem.
Ketersediaan moda transportasi	Terdapat moda transportasi ke pantai sebelah.
Kemudahan pencapaian (waktu tempuh dan ketersediaan rambu-rambu petunjuk arah)	Terdapat cukup rambu petunjuk jalan.

Kendala/ permasalahann/ catatan	Waktu libur tahun baru dan lebaran sering macet, namun dapat diatasi oleh pihak Polsek Besuki.	
Sarana dan prasarana	- Jalan - Signal (telokmsel) - Toko cinderamata - Penginapan/ homestay	- Listrik - Warung - Toilet/wc - Air bersih - Parkiran - Tempat sampah
Aspek Pasar		
Besarnya jumlah wisatawan (lokal, nusantara, dan mancanegara) yang datang ke objek	Sekitar 423.000 orang/tahun	
Skala jangkauan pemasaran	Domestik	
Tiket Masuk	Rp 5.000,00 – Rp 7.500,00 per orang	
Investasi		
Investasi yang telah ada di lokasi objek wisata	Tidak ada	
Stakeholders yang berperan dalam investasi	Tidak ada	
Stakeholders yaitu berkaitan dengan struktur bagi hasil dalam pengelolaan objek	Perhutani, Pemkab (Disbudpar), Bumdes (Pokdarwis)	
Kelembagaan		
Pengelolaan objek saat ini	Pemkab (Disbudpar), Pokdarwis (Pokdarwis Alam Asri)	
Ketersediaan struktur lembaga pengelola	Tersedia, yaitu: Perhutani, Disbudpar, dan Pokdarwis.	

	Ketiga lembaga tersebut menaungi 3 pantai yaitu Pantai Gemah, Pantai Klatak, dan Pantai Mbayem. Namun yang sudah di kelola dengan baik dan telah resmi dibuka adalah Pantai Gemah.
Aspirasi masyarakat sekitar objek	Mengembangkan pantai menjadi ikon wisata bahari di Kabupaten Tulungagung agar segera mendatangkan investor.
Permasalahan	
Permasalahan mendasar yang perlu diperhatikan dan perlu segera ditangani	Kebersihan, sampah.
Permasalahan jangka panjang yang mungkin muncul	Kebersihan, kerusakan lingkungan, sampah di waktu banjir.
Catatan Tambahan	
Kepemilikan Tanah	Perhutani
Luas wisata	Panjang pantai 500m, garis pantai ke darat sekitar 200m, garis pantai ke laut sekitar 200m
Dokumentasi	
	
Lokasi Pantai Gemah dekat dengan Pantai Klatak dan Pantai Bayem (sumber: Google Maps)	



Jalur Lintas Selatan menuju Pantai Gemah



Pantai Gemah



Grebeg Suro di Pantai Gemah



Pantai Mbayem di pagi hari


Nama Wisata Bahari: Pantai Coro

Sumber: Damis Setiawan (masyarakat lokal, penarik tiket masuk).
 Pada hari Senin, 11 Maret 2019. Pukul 13.00 WIB.

Informasi Umum	
Lokasi	Desa Besole, Kecamatan Besuki
Koordinat	-8.268968, 111.815924
Jenis Objek	Wisata alam
Deskripsi Objek	<p>Pantai berpasir putih, bibir pantai sepanjang 200 meter, kanan kiri pantai berupa tebing sehingga deburan ombak yang menabrak tebing terlihat indah, kedalaman cukup dalam, bisa digunakan untuk snorkling asal tidak di bawah tebing.</p> <p>Pantai ini berupa teluk yang menghadap ke barat.</p>
Status Pengembangan	Sedang dalam tahap pengembangan
Daya Tarik	
Daya Tarik Utama	Pantai berpasir putih
Daya tarik penunjang	<p>Dekat dengan Pantai Popoh dan Pantai Sidem, dengan waktu tempuh 15 menit jalan kaki dan 5 menit kendaraan bermotor.</p> <p>Dekat dengan Pantai Banyu Mulok yang tinggal naik, sedang dalam tahap pembukaan jalan agar bisa di lalui kendaraan. Selama ini hanya dapat ditempuh dengan jalan kaki dan motor trail</p>

	dengan jalannya yang hanya setapak.
Catatan terkait daya tarik	Pesisir sedang tahap pelebaran.
Nilai Sumberdaya	
Ketersediaan ruang terbuka yang alami	Masih tersedia.
Nilai atraksi (variasi daya tarik)	Pasir putih yang membentang dari utara ke selatan. Ombak agak tinggi dengan kanan kiri pantai berupa tebing.
Nilai keunikan	Pasir putih dan tidak tercampur tanah dengan panjang bibir pantai hanya sekitar 200m, dan tanah di pesisir yang masih berupa pasir berwarna putih.
Tingkat ketersediaan atraksi	Aktifitas fotografi, <i>trekking</i> , <i>snorkling</i>
Nilai kelangkaan	Pasir pantai dan pasir pesisir yang berwarna putih, terlihat KJA di tengah laut.
Aksesibilitas	
Kualitas jalan menuju objek	Jalan utama sudah beraspal, dapat dilalui kendaraan roda empat karena searah dengan Pantai Popoh dan Pantai Sidem.
Kualitas jalan di dalam objek	Jalan masih makadam karena masih dalam tahap pembukaan jalan, namun dapat di lalui kendaraan roda empat.
Kualitas jalan ke objek lain	Jalan makadam dan beraspal untuk menuju ke Pantai Popoh dan Pantai Sidem.
Ketersediaan moda transportasi	Dari Pantai Coro ke objek lain belum tersedia, namun dari objek

	lain ke Pantai Coro sudah tersedia jasa ojek.	
Kemudahan pencapaian (waktu tempuh dan ketersediaan rambu-rambu petunjuk arah)	Petunjuk jalan masih minim, jarak tempuh dari loket tiket masuk 2 menit dengan jalan masih makadam dan menurun.	
Kendala/ permasalahan/ catatan	Pelebaran pesisir dan pembangunan jalan terhambat. Pemerintah daerah kerja sama dengan swasta untuk pelebaran pesisir.	
Sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none"> - Jalan - Tempat sampah - Warung - Parkiran 	<ul style="list-style-type: none"> - Toilet/wc - Air bersih (setiap <i>weekend</i> dan musim libur)
Aspek Pasar		
Besarnya jumlah wisatawan (lokal, nusantara, dan mancanegara) yang datang ke objek	Sekitar 4.800 orang/tahun	
Skala jangkauan pemasaran	Domestik	
Tiket Masuk	Rp 5.000,00 – Rp 10.000,00	
Investasi		
Investasi yang telah ada di lokasi objek wisata	Swasta	
Stakeholders yang berperan dalam investasi	Ada	
Stakeholders yaitu berkaitan dengan struktur bagi hasil dalam pengelolaan objek	Perhutani, Swasta, Masyarakat Lokal	
Kelembagaan		
Pengelolaan objek saat ini	Masyarakat lokal	

Ketersediaan struktur lembaga pengelola	Sudah tersedia
Aspirasi masyarakat sekitar objek	Mengajukan pembangunan jalan dan listrik.
Permasalahan	
Permasalahan mendasar yang perlu diperhatikan dan perlu segera ditangani	Minimnya sarana dan prasarana, akses jalan masih sulit, belum di aspal, faktor keamanan saat laut pasang.
Permasalahan jangka panjang yang mungkin muncul	Kebersihan lingkungan.
Catatan Tambahan	
Kepemilikan Tanah	Perhutani
Luas wisata	Panjang pantai 200m, garis pantai ke darat 100m, luas keseluruhan sekitar 30 ha, yang dibuka baru 3ha
Dokumentasi	
	
Lokasi Pantai Coro dekat dengan Pantai Banyu Mulok (sumber: Google Maps)	



Proses pembangunan, pelebaran pesisir



Pantai Coro



Jalan menuju Pantai Banyu Mulok



Jalan di pesisir Pantai Coro



Nama Wisata Bahari: Pantai Brumbun

Sumber: Sutrisno (Anggota LMDH). Pada hari Minggu, 24 Maret 2019 Pukul 11.00 WIB.

Informasi Umum	
Lokasi	Desa Ngrejo, Kecamatan Tanggunggunung
Koordinat	-8.262659, 111.83511
Jenis Objek	Wisata alam
Deskripsi Objek	Pantai berpasir hitam, banyak perahu karena terletak di pemukiman nelayan. Ombaknya tenang.
Status Pengembangan	Belum
Daya Tarik	
Daya Tarik Utama	Pantai
Daya tarik penunjang	Terdapat rumah apung dengan membayar jasa penyebrangan sebesar Rp.10.000 dan jasa rumah apung Rp. 5000. Dekat dengan Pantai Gerangan dan Pantai Sawahan Ombo. Terdapat rumah apung di tengah laut. Dan dapat melihat matahari terbit di pagi hari karena pantai menghadap ke timur.
Catatan terkait daya tarik	Pantai terlihat indah apabila dilihat diatas bukit.
Nilai Sumberdaya	
Ketersediaan ruang terbuka yang alami	Masih tersedia.
Nilai atraksi (variasi daya tarik)	Pasir hitam yang membentang dari utara ke selatan. Ombak yang

	landai dengan kanan kiri pantai berupa tebing.	
Nilai keunikan	Terdapat pemukiman nelayan di pesisir pantai.	
Tingkat ketersediaan atraksi	Aktifitas fotografi, <i>trekking</i> , <i>snorkling</i>	
Nilai kelangkaan	-	
Aksesibilitas		
Kualitas jalan menuju objek	Jalan utama sudah beraspal, dapat dilalui kendaraan roda empat, jalan menuju objek aspal rusak dan berbukit kanan kiri jalan berupa sawah masyarakat sekitar.	
Kualitas jalan di dalam objek	Jalan masih makadam, bergelombang, dan terdapat tikungan tajam.	
Kualitas jalan ke objek lain	Jalan makadam menuju Pantai Gerangan dan melewati jembatan kecil untuk menuju Pantai Sawahan Ombo.	
Ketersediaan moda transportasi	Tidak tersedia ojek ke Pantai Gerangan, tetapi tersedia ojek ke Pantai Sawahan Ombo.	
Kemudahan pencapaian (waktu tempuh dan ketersediaan rambu-rambu petunjuk arah)	Petunjuk jalan masih minim, jarak tempuh dari loket tiket masuk 10 menit dengan jalan masih makadam dan menurun.	
Kendala/permasalahann/ catatan	Hanya buka hari libur (Sabtu dan Minggu), selain hari libur tidak membayar tiket masuk.	
Sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none"> - Jalan - Tempat sampah - Warung - Parkiran 	<ul style="list-style-type: none"> - Toilet/wc - Air bersih - Listrik - Masjid

Aspek Pasar	
Besarnya jumlah wisatawan (lokal, nusantara, dan mancanegara) yang datang ke objek	Sekitar 2.400 orang/tahun
Skala jangkauan pemasaran	Domestik
Tiket Masuk	Rp. 5000,-
Investasi	
Investasi yang telah ada di lokasi objek wisata	Belum ada
Stakeholders yang berperan dalam investasi	Belum ada
Stakeholders yaitu berkaitan dengan struktur bagi hasil dalam pengelolaan objek	Perhutani, Bumdes, LMDH
Kelembagaan	
Pengelolaan objek saat ini	LMDH
Ketersediaan struktur lembaga pengelola	Belum tersedia
Aspirasi masyarakat sekitar objek	Pembangunan jalan
Permasalahan	
Permasalahan mendasar yang perlu diperhatikan dan perlu segera ditangani	Minimnya sarana dan prasarana, akses jalan masih sulit, belum di aspal, faktor keamanan saat laut pasang.
Permasalahan jangka panjang yang mungkin muncul	Kebersihan lingkungan.
Catatan Tambahan	
Kepemilikan Tanah	Perhutani

Luas wisata	-
Dokumentasi	
	
Lokasi Pantai Brumbun dengan Pantai Gerangan dan Pantai Sawahan Ombo (sumber: google maps)	
	
Akses Jalan ke Pantai Brumbun	
	
Pemukiman nelayan di pesisir Pantai Brumbun	



Pantai Brumbun



Akses menuju Pantai Sawahan Ombo



Loket rumah apung

Nama Wisata Bahari: Pantai Gerangan

Sumber: Sutrisno (Anggota LMDH). Pada hari Minggu, 24 Maret 2019 Pukul 11.00 WIB.

Informasi Umum	
Lokasi	Desa Ngrejo, Kecamatan Tanggunggunung
Koordinat	-8.258669, 111.839617
Jenis Objek	Wisata alam
Deskripsi Objek	Pantai berpasir hitam, banyak perahu karena terletak di pemukiman nelayan. Ombaknya tenang.
Status Pengembangan	Belum
Daya Tarik	
Daya Tarik Utama	Pantai
Daya tarik penunjang	Terdapat rumah apung dengan membayar jasa penyebrangan sebesar Rp.10.000 dan jasa rumah apung Rp. 5000. Dekat dengan Pantai Brumbun dan Pantai Sawahan Ombo. Terdapat rumah apung di tengah laut. Pantai menghadap ke selatan dan terletak di teluk Samudra Hindia.
Catatan terkait daya tarik	Pantai terlihat indah apabila dilihat diatas bukit.
Nilai Sumberdaya	
Ketersediaan ruang terbuka yang alami	Masih tersedia.
Nilai atraksi (variasi daya tarik)	Pasir hitam yang membentang dari timur ke barat. Ombak yang landai dengan kanan kiri pantai berupa tebing.

Nilai keunikan	Terdapat perumahan nelayan di pesisir pantai.	
Tingkat ketersediaan atraksi	Aktifitas fotografi, <i>trekking</i> , <i>snorkling</i>	
Nilai kelangkaan	-	
Aksesibilitas		
Kualitas jalan menuju objek	Jalan utama sudah beraspal, dapat dilalui kendaraan roda empat, jalan menuju objek aspal rusak dan berbukit kanan kiri jalan berupa sawah masyarakat sekitar.	
Kualitas jalan di dalam objek	Jalan masih makadam, bergelombang, dan terdapat tikungan tajam.	
Kualitas jalan ke objek lain	Jalan makadam menuju Pantai Brumbun dan melewati jembatan kecil untuk menuju Pantai Sawahan Ombo.	
Ketersediaan moda transportasi	Tidak tersedia ojek sekitar.	
Kemudahan pencapaian (waktu tempuh dan ketersediaan rambu-rambu petunjuk arah)	Petunjuk jalan masih minim, jarak tempuh dari loket tiket masuk 10 menit dengan jalan masih makadam dan menurun.	
Kendala/permasalahann/catatan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata belum turun tangan untuk mengelola objek pantai ini. Belum resmi di buka oleh Perhutani.	
Sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none"> - Jalan - Tempat sampah - Warung - Parkiran 	<ul style="list-style-type: none"> - Toilet/wc - Air bersih - Listrik

Aspek Pasar	
Besarnya jumlah wisatawan (lokal, nusantara, dan mancanegara) yang datang ke objek	Sekitar 2.400 orang/tahun
Skala jangkauan pemasaran	Domestik
Tiket Masuk	-
Investasi	
Investasi yang telah ada di lokasi objek wisata	Belum ada
Stakeholders yang berperan dalam investasi	Belum ada
Stakeholders yaitu berkaitan dengan struktur bagi hasil dalam pengelolaan objek	Perhutani, Bumdes, LMDH
Kelembagaan	
Pengelolaan objek saat ini	LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) setempat
Ketersediaan struktur lembaga pengelola	Belum tersedia
Aspirasi masyarakat sekitar objek	Pembangunan jalan
Permasalahan	
Permasalahan mendasar yang perlu diperhatikan dan perlu segera ditangani	Minimnya sarana dan prasarana, akses jalan masih sulit, belum di aspal, faktor keamanan saat laut pasang.

Permasalahan jangka panjang yang mungkin muncul	Kebersihan lingkungan.
Catatan Tambahan	
Kepemilikan Tanah	Milik Perhutani
Luas wisata	Panjang pantai 350m, garis pantai ke darat 120m
Dokumentasi	
	
Lokasi Pantai Gerangan dengan Pantai Brumbun (sumber: Google Maps)	
	
Pemukiman penduduk di pesisir Pantai Gerangan	



Warung di pesisir



Pantai Gerangan



Nama Wisata Bahari: Pantai Ngalur

Sumber: Masyarakat Sekitar (Minggu, 24 Maret 2019 pukul 13.30 WIB)

Informasi Umum	
Lokasi	Desa Jengglunharjo, Kecamatan Tanggunggunung
Koordinat	-8.297357, 111.915232
Jenis Objek	Wisata alam
Deskripsi Objek	Pantai memiliki garis pantai yang panjang, batu karang besar di bibir pantai dan berpasir putih yang masih asri karena jarang di datangi orang, belum resmi di buka sehingga tiket masuk masih bergabung dengan Pantai Sanggar, akses jalannya yang ekstrim.
Status Pengembangan	Belum
Daya Tarik	
Daya Tarik Utama	Pantai berpasir putih
Daya tarik penunjang	Pantai Ngalur memiliki batu karang besar di bibir pantai yang memiliki keunikan bunyi dan semburat ombak ketika dihantam ombak. Dekat dengan Pantai Sanggar yang dapat dijangkau dengan jalan kaki sekitar 10menit.
Catatan terkait daya tarik	Jalannya sulit di jangkau, terjal, dan ekstrim.
Nilai Sumberdaya	
Ketersediaan ruang terbuka yang alami	Masih tersedia.

Nilai atraksi (variasi daya tarik)	Pasir putih yang membentang dari barat ke timur dan pantai menghadap ke selatan.
Nilai keunikan	Pantai berpasir putih.
Tingkat ketersediaan atraksi	Aktifitas fotografi, <i>trekking</i>
Nilai kelangkaan	Masih bersih, belum terjamah banyak orang.
Aksesibilitas	
Kualitas jalan menuju objek	Jalan utama sudah beraspal, dapat dilalui kendaraan roda empat, jalan menuju objek aspal rusak dan berbukit kanan kiri jalan berupa bukit.
Kualitas jalan di dalam objek	Jalan masih makadam, bergelombang, dan terdapat tikungan tajam. Tidak dapat dilalui kendaraan roda empat.
Kualitas jalan ke objek lain	Jalan makadam menuju Pantai Sanggar. Dapat dilalui dengan jalan kaki sekitar 10menit.
Ketersediaan moda transportasi	Tersedia jasa ojek dari tempat parkir ke Pantai Ngalur dengan jarak 1,5km dan membayar 15 ribu sekali jalan.
Kemudahan pencapaian (waktu tempuh dan ketersediaan rambu-rambu petunjuk arah)	Petunjuk jalan masih minim, jarak tempuh dari loket tiket masuk 1,5km dengan jalan masih makadam, menurun dan terjal. Tidak dapat dilalui kendaraan roda empat. Kendaraan roda dua harus di cek kondisinya, cocok untuk motor trail. Dapat dilalui dengan jalan kaki sekitar 30menit dari tempat parkir.

Kendala/ permasalahann/ catatan	Saat ini dijalankan oleh Pokdarwis yang menaungi 5 Pantai: Pantai Sanggar, Pantai Ngalur, Pantai Pathok Gebang, Pantai Jong Pakis, dan Pantai Kalipucung	
Sarana dan prasarana	- Jalan makadam - Tempat sampah - Warung - Parkiran	- Toilet/wc - Air bersih - Mushola
Aspek Pasar		
Besarnya jumlah wisatawan (lokal, nusantara, dan mancanegara) yang datang ke objek	Sekitar 4.800 orang/tahun	
Skala jangkauan pemasaran	Domestik	
Tiket Masuk	-	
Investasi		
Investasi yang telah ada di lokasi objek wisata	Belum ada	
Stakeholders yang berperan dalam investasi	Belum ada	
Stakeholders yaitu berkaitan dengan struktur bagi hasil dalam pengelolaan objek	Perhutani, Pemkab (Disbudpar), Bumdes (Pokdarwis)	
Kelembagaan		
Pengelolaan objek saat ini	Pokdarwis yang bergabung dengan Pantai Sanggar	
Ketersediaan struktur lembaga pengelola	Belum tersedia	
Aspirasi masyarakat sekitar objek	Kejelasan pengelola, pembangunan jalan.	

Permasalahan	
Permasalahan mendasar yang perlu diperhatikan dan perlu segera ditangani	Minimnya sarana dan prasarana, akses jalan masih sulit, belum di aspal, faktor keamanan saat laut pasang.
Permasalahan jangka panjang yang mungkin muncul	Kebersihan lingkungan, akses jalan menuju objek.
Catatan Tambahan	
Kepemilikan Tanah	Milik Perhutani
Luas wisata	Panjang pantai 500m, garis pantai ke darat 35m
Dokumentasi	
 <p>A satellite map from Google Maps showing a coastal area. A red rectangle highlights a section of the beach and the area just inland. The text 'Pantai Ngalur' is visible on the map.</p>	
Lokasi Pantai Ngalur dekat dengan Pantai Sanggar (sumber: Google Maps)	
 <p>A photograph of a tropical beach. In the foreground, a large, weathered log lies on the sand. The beach is white and sandy, leading to clear turquoise water with gentle waves. Lush green trees frame the top and right sides of the image.</p>	
Pantai Ngalur	



Batu karang di bibir pantai



Akses jalan menuju Pantai Ngalur



Nama Wisata Bahari: Pantai Sanggar

Sumber: Masyarakat Sekitar (24 Maret 2019)

Informasi Umum	
Lokasi	Desa Jengglunharjo, Kecamatan Tanggunggunung
Koordinat	-8.297308, 111.9104
Jenis Objek	Wisata alam
Deskripsi Objek	Pantai memiliki garis pantai sepanjang 500 meter, pasir pantai berwarna putih, di kelilingi oleh tebing-tebing, airnya berwarna biru dan sangat jernih, bisa digunakan untuk berenang asal tidak pada waktu pasang karena ombaknya cukup tinggi.
Status Pengembangan	Belum
Daya Tarik	
Daya Tarik Utama	Pantai berpasir putih dan air laut yang jernih
Daya tarik penunjang	Pantai Sanggar memiliki wilayah pesisir yang cukup luas dan pasirmnya berwarna putih, halus. Dapat digunakan untuk berkemah. Terdapat sungai di bibir pantai.
Catatan terkait daya tarik	Jalannya sulit di jangkau, terjal, dan ekstrim.
Nilai Sumberdaya	
Ketersediaan ruang terbuka yang alami	Masih tersedia.
Nilai atraksi (variasi daya tarik)	Pasir putih dan air laut yang jernih, membentang dari barat ke timur dan pantai menghadap ke selatan-tenggara.

Nilai keunikan	Pantai berpasir putih. Dapat melihat matahari terbit di balik bukit.
Tingkat ketersediaan atraksi	Aktifitas fotografi, <i>trekking</i>
Nilai kelangkaan	Masih bersih, belum terjamah banyak orang.
Aksesibilitas	
Kualitas jalan menuju objek	Jalan utama sudah beraspal, dapat dilalui kendaraan roda empat, jalan menuju objek aspal rusak dan berbukit kanan kiri jalan berupa bukit.
Kualitas jalan di dalam objek	Jalan masih makadam, bergelombang, dan terdapat tikungan tajam. Tidak dapat dilalui kendaraan roda empat.
Kualitas jalan ke objek lain	Jalan makadam menuju Pantai Ngalur. Dapat dilalui dengan jalan kaki sekitar 10menit.
Ketersediaan moda transportasi	Tersedia jasa ojek dari tempat parkir ke Pantai Sanggar dengan jarak 3 km dan membayar 20 ribu sekali jalan.
Kemudahan pencapaian (waktu tempuh dan ketersediaan rambu-rambu petunjuk arah)	Petunjuk jalan masih minim, jarak tempuh dari loket tiket masuk 3 km dengan jalan masih makadam, menurun dan terjal. Tidak dapat dilalui kendaraan roda empat. Kendaraan roda dua harus di cek kondisinya, cocok untuk motor trail. Dapat dilalui dengan jalan kaki sekitar 45 menit dari tempat parkir.

Kendala/ permasalahan/ catatan	Saat ini dijalankan oleh Pokdarwis yang menaungi 5 Pantai: Pantai Sanggar, Pantai Ngalur, Pantai Pathok Gebang, Pantai Jong Pakis, dan Pantai Kalipucung	
Sarana dan prasarana	- Jalan makadam - Tempat sampah - Warung - Parkiran	- Toilet/wc - Air bersih - Mushola
Aspek Pasar		
Besarnya jumlah wisatawan (lokal, nusantara, dan mancanegara) yang datang ke objek	Sekitar 4.800 orang/tahun	
Skala jangkauan pemasaran	Domestik	
Tiket Masuk	Rp 5.000,00	
Investasi		
Investasi yang telah ada di lokasi objek wisata	Belum ada	
Stakeholders yang berperan dalam investasi	Belum ada	
Stakeholders yaitu berkaitan dengan struktur bagi hasil dalam pengelolaan objek	Perhutani, Pemkab (Disbudpar), Bumdes (Pokdarwis)	
Kelembagaan		
Pengelolaan objek saat ini	Pokdarwis	
Ketersediaan struktur lembaga pengelola	Belum tersedia	

Aspirasi masyarakat sekitar objek	Pembangunan jalan.
Permasalahan	
Permasalahan mendasar yang perlu diperhatikan dan perlu segera ditangani	Minimnya sarana dan prasarana, akses jalan masih sulit, belum di aspal, faktor keamanan saat laut pasang.
Permasalahan jangka panjang yang mungkin muncul	Kebersihan lingkungan, akses jalan menuju objek.
Catatan Tambahan	
Kepemilikan Tanah	Milik Perhutani
Luas wisata	Panjang pantai 500m, garis pantai ke darat 100m
Dokumentasi	
 <p style="text-align: center;">Pantai Sanggar</p>	
Lokasi Pantai Sanggar dekat dengan Pantai Ngalur (sumber: Google Maps)	
	
Pantai Sanggar	



Akses jalan menuju Pantai Sanggar

Lampiran 2. Dokumentasi



Gambar 1. Survei Lapangan Di Pantai Sine



Gambar 2. Survei Lapangan di Pantai Coro



Gambar 3. Tarif Tiket Masuk Wisata Bahari



Gambar 4. Form Survei



Gambar 5. Rambu Peringatan Bahaya

	Pantai Popok memiliki pasir putih yang terancam pencemaran
	Wali Kabupaten
Kecenderungan rising terhadap yang akan	Masih terdapat ruang terbuka di Pantai Popok
Keperluan kawasan wisata	Aktivitas rekreasi
Masih beresahan	Masih ada saja (pemukim penduduk)
Terdapat area-wisata lain	Tersebutlah bahwa ada yang ingin membangun, tempat makan dan lain-lain di kawasan yang di pinggir pantai yang akan merusak. Diberikan juga kebijakan dan aktivitas perdagangan nelayan di area lain pantai.
Masih keagungan	Pantai Popok merupakan aset wisata yang di Talampong yang sudah dikembangkan sejak tahun 2000.
Aktivitas	Uraian/apa saja menu? Fasilitas Popok sudah lengkap dan dapat dilatih berkreasi pada tempat lain, masih pribadi.
Kendaraan jalan memutar di jalan	Jalan memang sudah selesai
Kualitas jalan di dalam objek	Jalan di dalam objek sudah selesai
Kondisi jalan ke objek lain	Jalan menuju objek wisata lain sudah selesai
Ketersediaan mode transportasi	tersebut transportasi umum
Ketersediaan transportasi	Masih minimnya papan petunjuk arah dari pusat kota Talampong
Ketersediaan parkir dan kendaraan untuk wisata	Kondisi parkir terganggu karena adanya pembangunan lapangan di tempat wisata pantai.

Gambar 6. Contoh form survei dari Dibudpar



Gambar 7. Pemanfaatan Pesisir untuk Warung



Gambar 8. Proses Pelebaran Pesisir untuk Pariwisata

Lampiran 3. Peta Pengelola Wisata Bahari Skala 1:100.000

Lampiran 4. Peta Estimasi Retribusi Tiket Masuk Wisata Bahari
Skala 1:100.000

Lampiran 5. Peta Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir Skala
1:100.000

Lampiran 6. Peta Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir untuk Kegiatan Wisata Bahari dengan Dokumen Perencanaan Skala 1:100.000

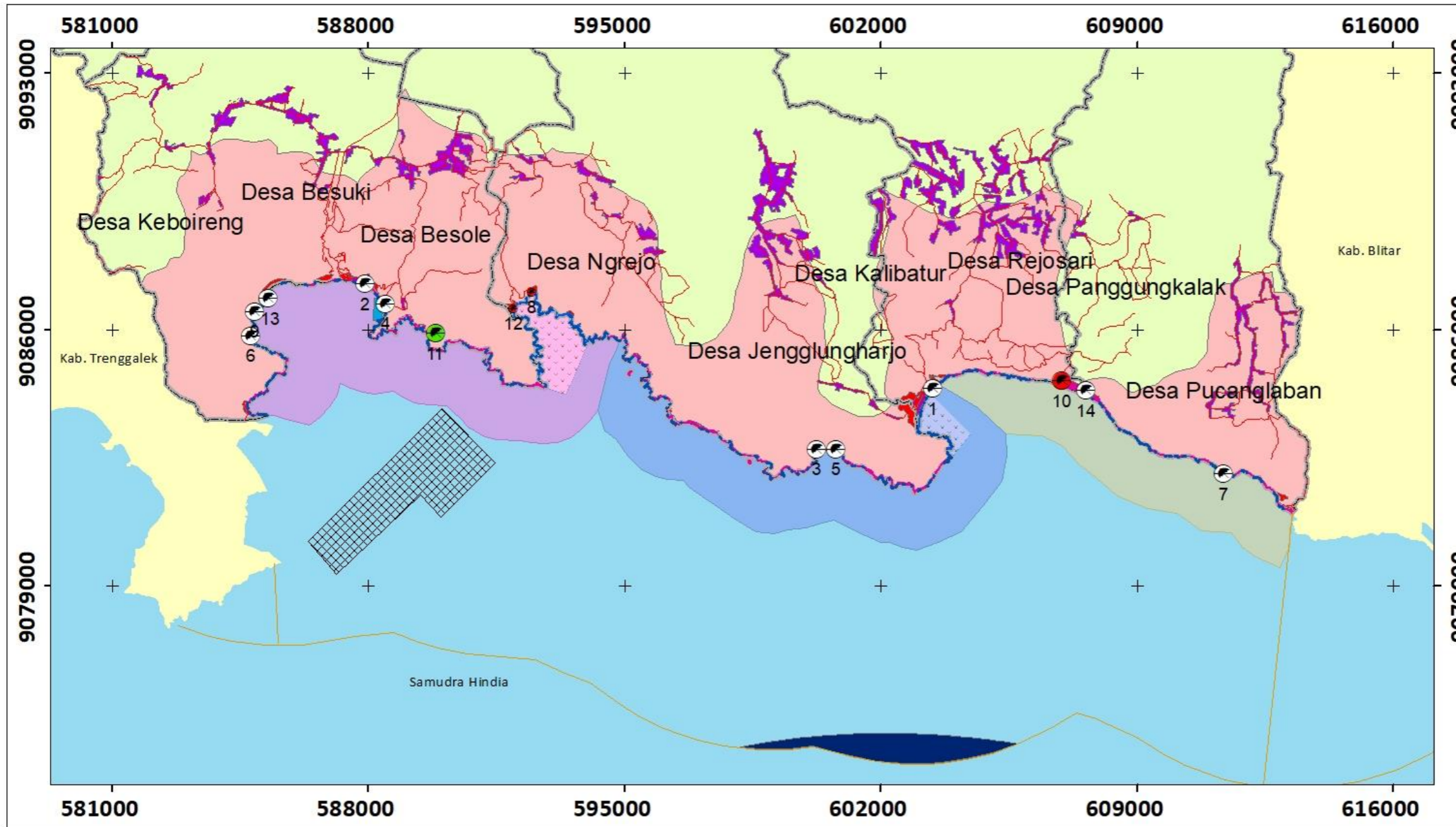
Lampiran 7. Peta Resiko Rawan Bencana Tsunami di Lokasi Wisata Bahari Kabupaten Tulungagung Skala 1:100.000

Lampiran 8. Biodata Penulis

Penulis dilahirkan di Tulungagung, 7 Maret 1996, merupakan anak ke 2 dari 2 bersaudara. Penulis telah menempuh pendidikan formal di Kabupaten Tulungagung yaitu TK RA Raden Fattah Podorejo, SDN 3 Junjung, SMPN 1 Sumbergempol, dan SMAN 1 Kedungwaru. Selama duduk di bangku sekolah penulis aktif mengembangkan diri di bidang olahraga yaitu basket. Setelah lulus dari SMA penulis diterima di Departemen Teknik Geomatika pada tahun 2015 lewat jalur Seleksi Nasional

Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan terdaftar dengan NRP. 3515100048 yang sekarang telah berubah menjadi NRP. 03311540000048. Saat duduk di bangku perkuliahan penulis tergabung sebagai angkatan G17, penulis juga aktif mengikuti organisasi dan komunitas di dalam maupun di luar kampus. Penulis diamanahi menjadi staff Divisi Geomatics Islamic Study (GIS) dan selanjutnya diamanahi menjadi sekretaris Badan Semi Otonom Geomatics Islamic Study (GIS) HIMAGE-ITS. Penulis pernah menjadi relawan mengajar yang tergabung dalam Komunitas Pemuda Peduli Pendidikan Anak Negeri (Padipari). Penulis aktif menjadi panitia pada berbagai kegiatan di lingkup ITS dan mengikuti kompetisi di ITS. Prestasi yang pernah diraih penulis selama kuliah adalah juara 1 Basket Putri SPARTAN FTSP ITS 2016.

Peta Resiko Bencana Tsunami di Lokasi Wisata Bahari

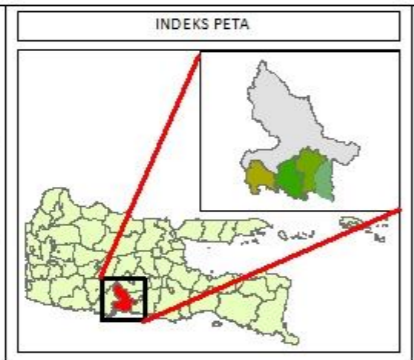


Logo ITS (Institut Teknologi Sepuluh Nopember)

Skala 1:100.000

0 0,5 1 2 3 4 Km

DISCLAIMER
Tingkat kedetailan peta adalah perbesaran dari peta skala 1:250.000



Legenda

Wisata Bahari

Kawasan Strategis

- IV A Pesisir Barat
- IV B Pesisir Tengah
- IV C Pesisir Timur

Tingkat Kerawatan Tsunami

- Rendah
- Tinggi
- Sangat Tinggi

ZONA

- Kawasan Konservasi Pesisir
- Pariwisata
- Wisata Ruang Laut
- Perikanan Tangkap
- Kawasan Konservasi Ruang Laut
- Migrasi Biota Laut
- Perikanan Budidaya

Other symbols: Jalan, Garis Pantai, Batas 4 mil, Pemukiman, Administrasi Kecamatan

DIBUAT OLEH:
Riva Dianita
NRP. 0331154000048

PEMBIMBING:
Yanto Budisusanto, S.T., M.Eng.
Cherie Bhkti Pribadi, S.T., M.T.

Dibuat Pada:
Juli 2019

INFORMASI PETA

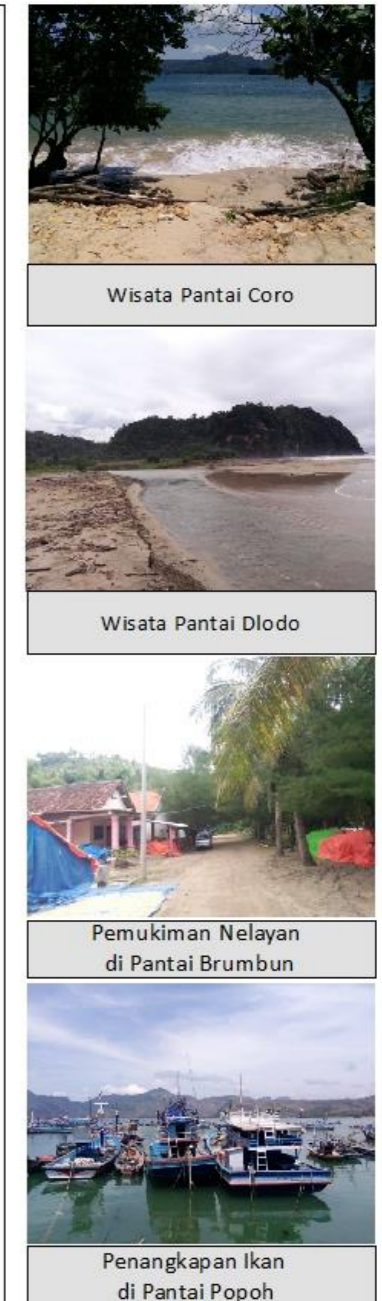
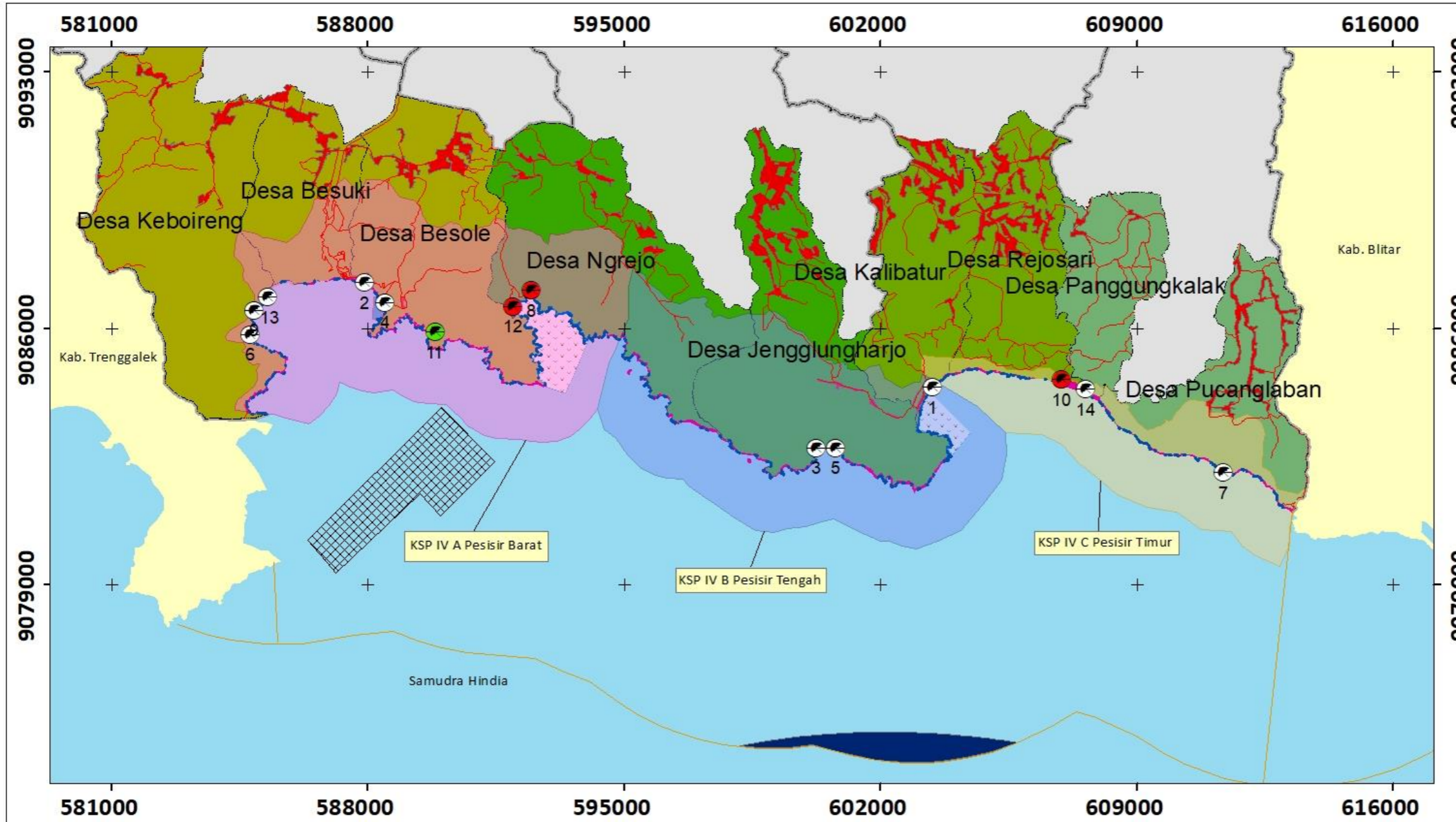
Datum Horizontal : WGS 84
Sistem Proyeksi : UTM Zona 49 S
Satuan : Meter

Departemen Teknik Geomatika
Fakultas Teknik Sipil, Lingkungan, dan Kebumihan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya
2019

INFORMASI SUMBER PETA:

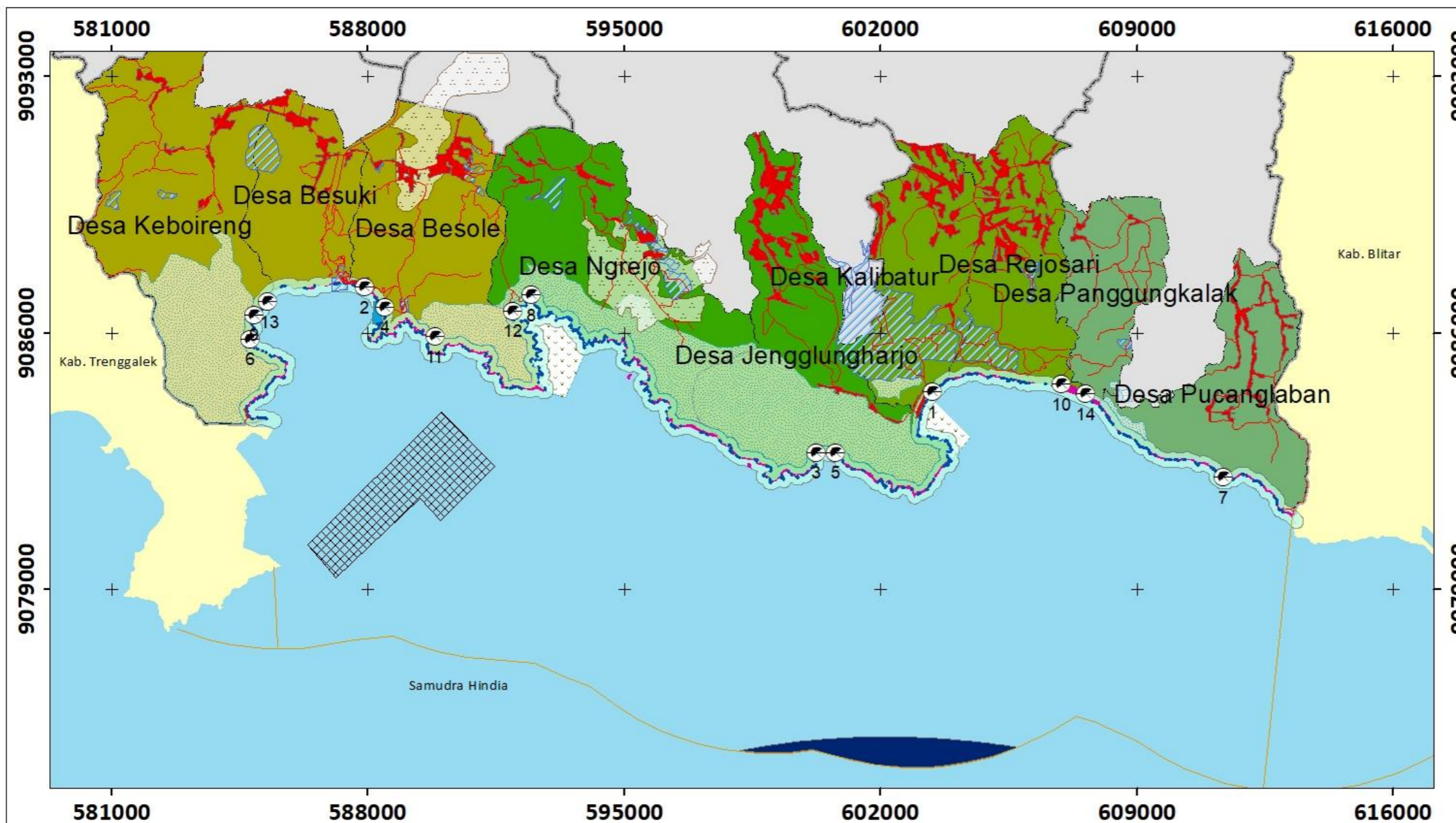
1. Peta Administrasi Kab.Tulungagung 2010
2. Peta RZWP3K.Jatim 2016
3. Peta RTRW Kab. Tulungagung 2012-2032
4. Peta Resiko Tsunami 2015
5. Survei Kondisi Eksisting

Peta Kesesuaian Wisata Bahari Kondisi Eksisting dengan Dokumen Perencanaan



 ITS Institut Teknologi Sepuluh Nopember	INDEKS PETA 	Legenda ● Wisata Bahari Kawasan Strategis ■ IV A Pesisir Barat ■ IV B Pesisir Tengah ■ IV C Pesisir Timur 2. Pantai Sidem 4. Pantai Popoh 6. Pantai Klatak 8. Pantai Gerangan 9. Pantai Gemah 11. Pantai Coro 12. Pantai Brumbun 13. Pantai Bayem 1. Pantai Sine 3. Pantai Sanggar 5. Pantai Ngalur 7. Pantai Kedung Tumpang 10. Pantai Dlado Kalidawir 14. Pantai Dlado Pucanglaban — Jalan — Garis Pantai — Batas 4 mil ■ Pemukiman ■ Kec. Besuki ■ Kec. Tanggunggunung ■ Kec. Kalidawir ■ Kec. Pucanglaban ■ Administrasi Kecamatan ZONA ■ Kawasan Konservasi Pesisir ■ Pariwisata ■ Wisata Ruang Laut ■ Perikanan Tangkap ■ Kawasan Konservasi Ruang Laut ■ Migrasi Biota Laut ■ Perikanan Budidaya	DIBUAT OLEH: Riva Dianita NRP. 03311540000048 PEMBIMBING: Yanto Budisusanto, S.T., M.Eng. Cherie Bhakti Pribadi, S.T., M.T. Dibuat Pada: Juli 2019	INFORMASI PETA Datum Horizontal : WGS 84 Sistem Proyeksi : UTM Zona 49 S Satuan : Meter Departemen Teknik Geomatika Fakultas Teknik Sipil, Lingkungan, dan Kebumihan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya 2019	INFORMASI SUMBER PETA: 1. Peta Administrasi Kab. Tulungagung 2010 2. Peta RZWP3K Jatim 2016 3. Peta RTRW Kab. Tulungagung 2012-2032 4. Peta Ripparda 2015 5. Survei Kondisi Eksisting
Skala 1:100.000  DISCLAIMER Tingkat kedetailan peta adalah perbesaran dari peta skala 1:250.000					

Peta Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir Kabupaten Tulungagung



Wisata Pantai Coro



Wisata Pantai Dlodo



Pemukiman Nelayan di Pantai Brumbun

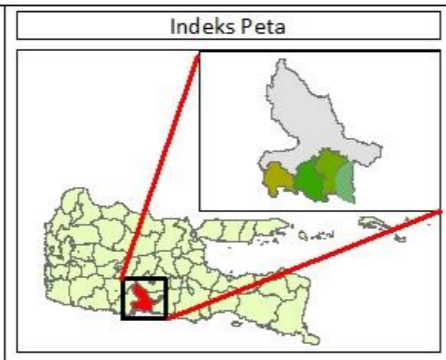


Penangkapan Ikan di Pantai Popoh

Skala 1:100.000

0 0,5 1 2 3 4 Km

DISCLAIMER
Tingkat kedetailan peta adalah perbesaran dari peta skala 1:250.000



Legenda	
● Wisata Bahari	— Jalan
1. Pantai Sine	— Garis Pantai
2. Pantai Sidem	— Batas 4 mil
3. Pantai Sanggar	■ Pemukiman
4. Pantai Popoh	▨ Sawah Tadah Hujan
5. Pantai Ngalur	▨ Kawasan Kars
6. Pantai Klatak	▨ Kawasan Resapan Air
7. Pantai Kedung Tumpang	▨ Sempadan Pantai
8. Pantai Gerangan	■ Kec. Besuki
9. Pantai Gemah	■ Kec. Tanggunggunung
10. Pantai Dlodo Kalidawir	■ Kec. Kalidawir
11. Pantai Coro	■ Kec. Pucanglaban
12. Pantai Brumbun	▨ Administrasi Kecamatan
13. Pantai Bayem	
14. Pantai Dlodo Pucanglaban	

DIBUAT OLEH:
Riva Dianita
NRP. 03311540000048

PEMBIMBING:
Yanto Budisusanto, S.T., M.Eng.
Cherie Bhkti Pribadi, S.T., M.T.

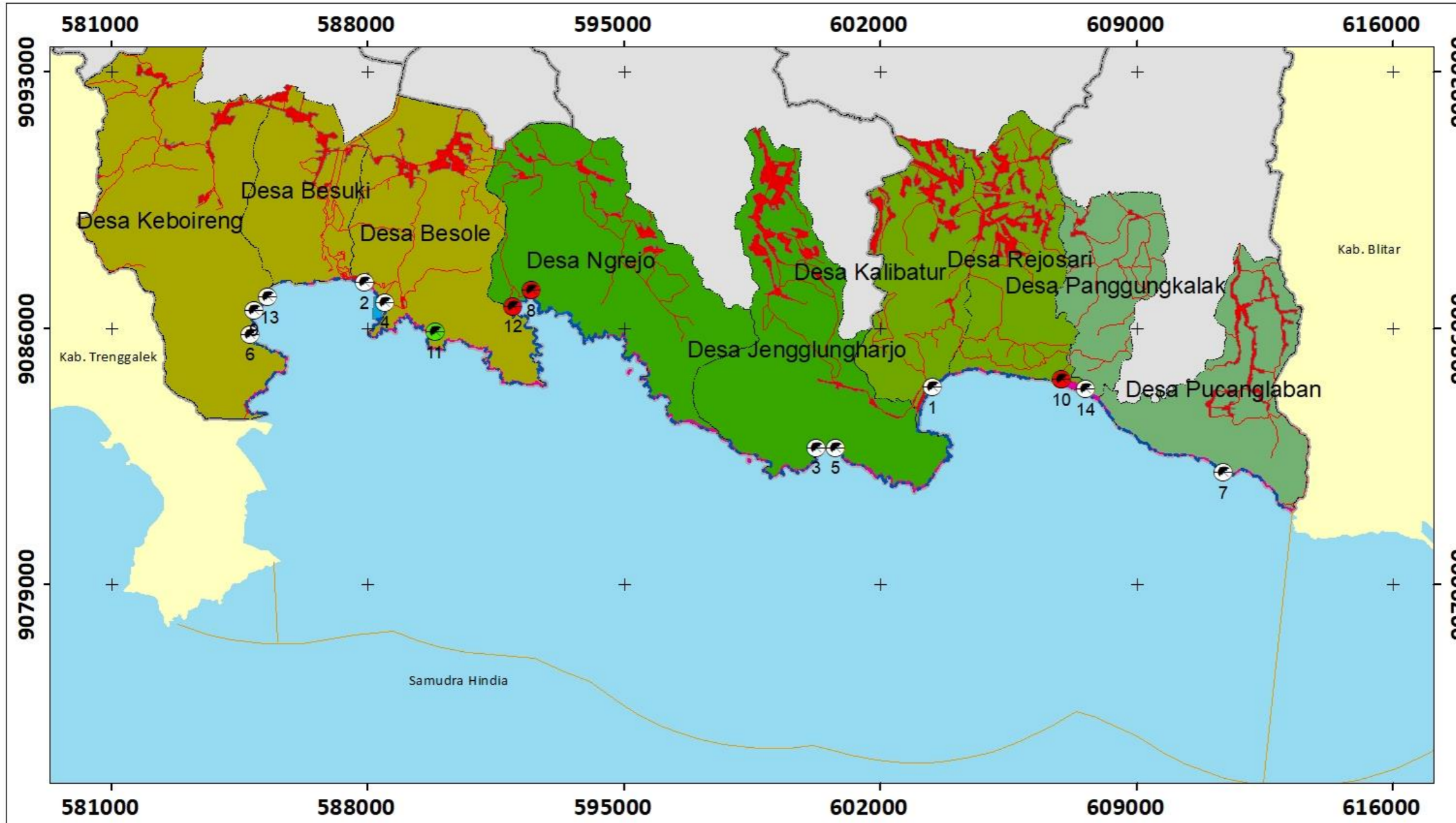
Dibuat Pada:
Juli 2019

INFORMASI PETA
Datum Horizontal : WGS 84
Sistem Proyeksi : UTM Zona 49 S
Satuan : Meter

Departemen Teknik Geomatika
Fakultas Teknik Sipil, Lingkungan, dan Kebumihan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya
2019

INFORMASI SUMBER PETA:
1. Peta Administrasi Kab.Tulungagung 2010
2. Peta RZWP3K.Jatim 2016
3. Peta RTRW Kab. Tulungagung 2012-2032
4. Survei Kondisi Eksisting

Peta Pengelola Wisata Bahari di Kabupaten Tulungagung

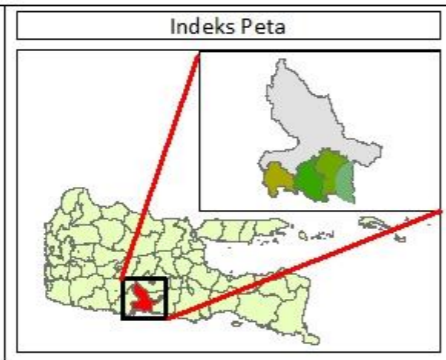


ITS
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Skala 1:100.000

0 0,5 1 2 3 4 Km

DISCLAIMER
Tingkat kedetailan peta adalah perbesaran dari peta skala 1:250.000



Legenda

- Pihak Ke 2 Disbudpar
- Pihak Ke 2 Swasta
- Pihak Ke 2 Bumdes
- 1. Pantai Sine
- 2. Pantai Sidem
- 3. Pantai Sanggar
- 4. Pantai Popoh
- 5. Pantai Ngalur
- 6. Pantai Klatak
- 7. Pantai Kedung Tumpang
- 9. Pantai Gemah
- 13. Pantai Bayem
- 14. Pantai Dodo Pucanglaban
- 8. Pantai Gerangan
- 10. Pantai Dodo Kalidawir
- 12. Pantai Brumbun
- 11. Pantai Coro
- Jalan
- Garis Pantai
- Batas 4 mil
- Pemukiman
- Kec. Besuki
- Kec. Tanggunggunung
- Kec. Kalidawir
- Kec. Pucanglaban
- Administrasi Kecamatan

ZONA

- Kawasan Konservasi Pesisir
- Pariwisata
- Wisata Ruang Laut
- Perikanan Tangkap

Catatan:
Pengelola Pihak ke 1 adalah Dinas Perhutani. Pengelola Pihak ke 3 tercantum dalam analisa di laporan hasil akhir.

DIBUAT OLEH:
Riva Dianita
NRP. 03311540000048

PEMBIMBING:
Yanto Budisusanto, S.T., M.Eng.
Cherie Bhekti Pribadi, S.T., M.T.

Dibuat Pada:
Juli 2019

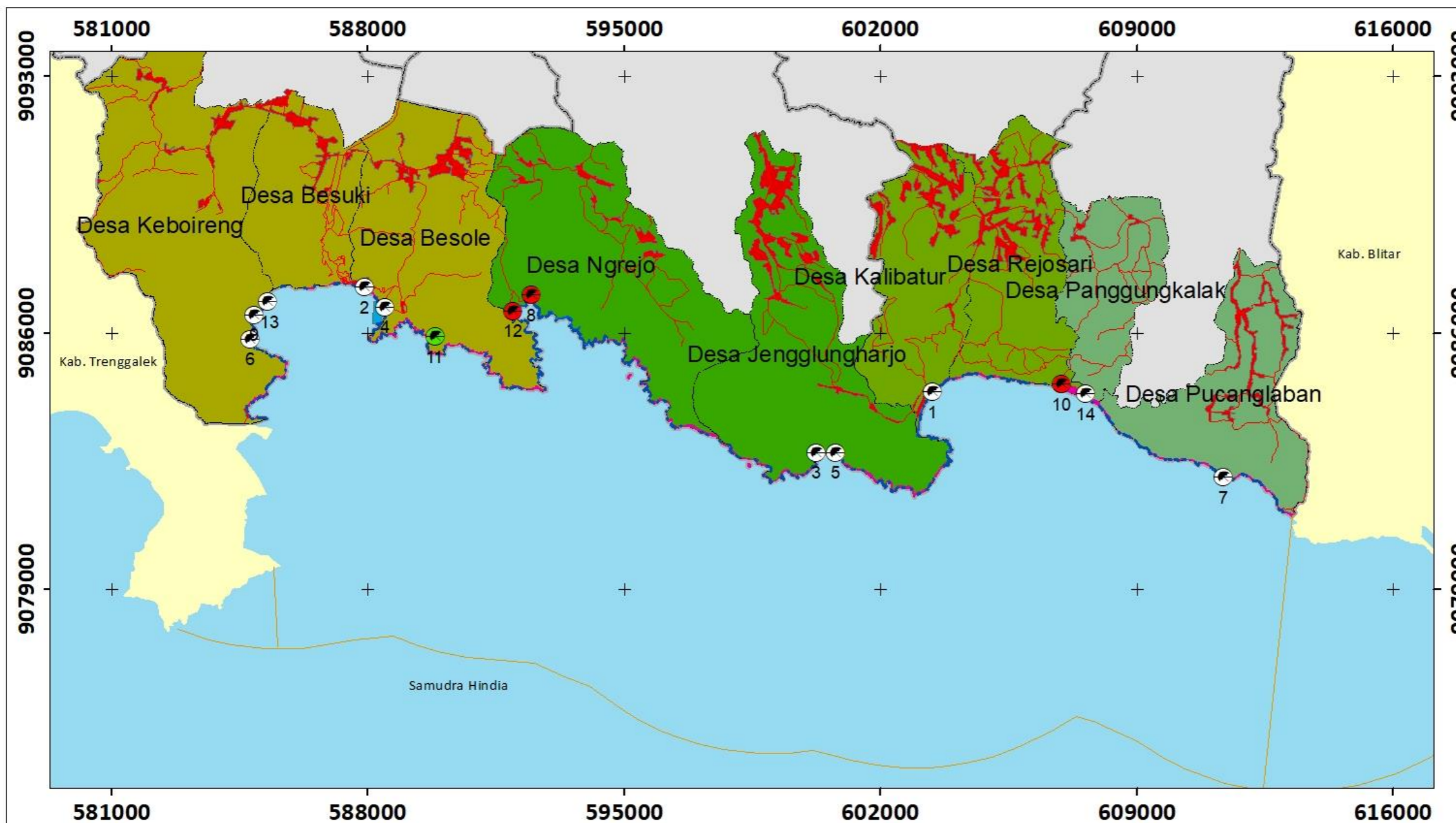
INFORMASI PETA
Datum Horizontal : WGS 84
Sistem Proyeksi : UTM Zona 49 S
Satuan : Meter

**Departemen Teknik Geomatika
Fakultas Teknik Sipil, Lingkungan, dan Kebumihan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya
2019**

INFORMASI SUMBER PETA:

1. Peta Administrasi Kab.Tulungagung 2010
2. Peta RZWP3K.Jatim 2016
3. Peta RTRW Kab. Tulungagung 2012-2032
4. Survei Kondisi Eksisting

Peta Estimasi Retribusi Wisata Bahari untuk Pemerintah Kabupaten Tulungagung



Wisata Pantai Coro



Wisata Pantai Dlado



Pemukiman Nelayan di Pantai Brumbun

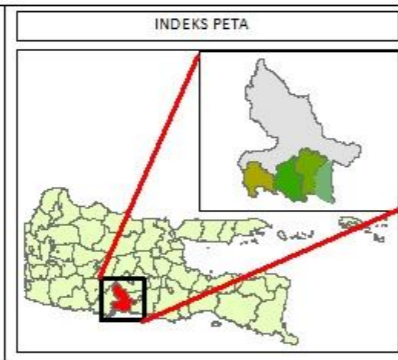


Penangkapan Ikan di Pantai Popoh

Skala 1:100.000

0 0,5 1 2 3 4 Km

DISCLAIMER
Tingkat kedetailan peta adalah perbesaran dari peta skala 1:250.000



Legenda

<ul style="list-style-type: none"> 1. Pantai Sine Rp. 1.061.760.000 2. Pantai Sidem Rp. 21.600.000 3. Pantai Sanggar Rp. 7.200.000 4. Pantai Popoh Rp. 207.360.000 5. Pantai Ngalur Rp. 7.200.000 6. Pantai Klatak Rp. 0 7. Pantai Kedung Tumpang Rp. 172.800.000 8. Pantai Gemah Rp. 540.000.000 9. Pantai Bayem Rp. 0 10. Pantai Dlado Pucanglaban Rp. 14.400.000 11. Pantai Gerangan Rp. 1.200.000 12. Pantai Dlado Kalidawir Rp. 2.400.000 13. Pantai Brumbun Rp. 1.200.000 14. Pantai Coro Rp. 7.200.000 	<ul style="list-style-type: none"> Jalan Garis Pantai Batas 4 mil Pemukiman Kec. Besuki Kec. Tanggunggunung Kec. Kalidawir Kec. Pucanglaban Administrasi Kecamatan 	<p>ZONA</p> <ul style="list-style-type: none"> Kawasan Konservasi Pesisir Pariwisata Wisata Ruang Laut Perikanan Tangkap
---	---	---

Catatan: Besarnya estimasi retribusi diperoleh dari bagi hasil tiap pemangku kepentingan sebesar 20% dari total estimasi retribusi tiket masuk wisata bahari pertahun.

DIBUAT OLEH:
Riva Dianita
NRP. 0331154000048

PEMBIMBING:
Yanto Budisusanto, S.T., M.Eng.
Cherie Bhkti Pribadi, S.T., M.T.

Dibuat Pada:
Juli 2019

INFORMASI PETA
Datum Horizontal : WGS 84
Sistem Proyeksi : UTM Zona 49 S
Satuan : Meter

INFORMASI SUMBER PETA:

1. Peta Administrasi Kab.Tulungagung 2010
2. Peta RZWP3K.Jatim 2016
3. Peta RTRW Kab. Tulungagung 2012-2032
4. Survei Kondisi Eksisting

**Departemen Teknik Geomatika
Fakultas Teknik Sipil, Lingkungan, dan Kebumihan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya
2019**